

DATA STATISTIK

Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika



SEMESTER 2
2015



KATA PENGANTAR

Perkembangan teknologi dan perangkat telekomunikasi di Indonesia yang semakin pesat dalam 5 tahun terakhir perlu dilindungi oleh regulasi (pengaturan) frekuensi dan standardisasi agar dapat melindungi masyarakat pengguna. Untuk itulah keberadaan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi penting untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Buku Data Statistik Tahun 2015 ini disusun sebagai sebuah pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terkait kinerja dan akuntabilitas yang telah dilaksanakan selama tahun 2015. Buku ini memuat data dan informasi dalam memahami pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Berbagai data pada buku ini adalah rangkaian data selama semester 1 yang dimuat pada Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2015 dan gabungan selama satu tahun.

Berbagai gambaran tentang indikator di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan kecenderungan perkembangan dikumpulkan, diolah, dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Tujuannya, selain untuk mempermudah para pengguna dan pemangku kepentingan

dalam memahami makna dari data yang disajikan juga agar Buku Data Statistik Semester 2 Tahun 2015 ini akan menjadi dasar untuk membuat berbagai kebijakan (*evidence-based policy*).

Berbagai upaya verifikasi dan validasi telah dilakukan agar data yang ditampilkan akurat dan sahih. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian buku ini. Untuk kemudahan akses, buku ini juga dapat diunduh melalui laman sdppi.kominfo.go.id atau www.postel.go.id.

Jakarta, Maret 2016

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

iv

Muhammad Budi Setiawan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
1 Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan Penyusunan Buku	7
1.3. Metodologi Penyusunan Buku	7
1.3.1 Identifikasi dan Pengumpulan Data Pendukung	7
1.3.2 Pengolahan Data (<i>Data Processing</i>).....	8
1.3.3 Format Penulisan Buku Data Statistik Ditjen SDPPI	8
1.4. Manfaat Penyusunan Buku	10
2 Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	11
2.1. Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPI	12
2.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Ditjen SDPPI	13
2.2.1. UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).....	14
2.2.2. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio	14
2.3. Pelayanan Publik Ditjen SDPPI	16
2.4. Sertifikasi Mutu Pelayanan	18
2.5. <i>Contact Center</i>	20
3 Sumber Daya Manusia	21
3.1. Jumlah Pegawai	22
3.2. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI	25
3.2.1. Jumlah dan Komposisi Pegawai	25

3.2.2. Pegawai UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio (UPT Monfrek)	26
3.2.3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	28
3.2.4. Pejabat Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio	30
4 Peraturan Perundang-Undangan	33
4.1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	34
4.2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	36
4.3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika	37
4.4. Rangkuman Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDPPI yang Telah Diterbitkan	37
5 Bidang Penataan Sumber Daya	39
5.1. Penataan Spektrum Frekuensi Radio	40
5.2. Nilai BHP Pita Frekuensi Selular, 3G, dan BWA	41
5.3. Pengelolaan Orbit Satelit	42
5.3.1. Pemeliharaan Filing Satelit Indonesia	43
5.3.2. Penerbitan Hak Labuh Satelit	46
5.4. Notifikasi Stasiun Radio	50
6 Bidang operasi sumber daya	53
6.1. Pengelolaan Sumber Daya Frekuensi	55
6.2. Penggunaan Frekuensi (Izin Stasiun Radio/ ISR)	55
6.2.1. Pengguna Kanal Frekuensi Berdasarkan Dinas/Service	57
6.2.2. Pengguna Band Frekuensi Menurut Provinsi	60
6.2.3. Pola Penggunaan Band Frekuensi Menurut Wilayah Kepulauan	61
6.3. Penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) dan Sertifikasi Kecakapan Amatir Radio (SKAR)	65
6.4. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)	66
6.5. Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)	67
6.6. Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)	69
6.7. Layanan Contact Center	71
6.8. Pusat Pelayanan Terpadu	77

7	Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat	81
7.1.	Monitor dan Penertiban spektrum Frekuensi, frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	83
7.1.1	Monitor Penggunaan Frekuensi	83
7.1.2.	Penertiban Frekuensi	93
7.1.3.	Laporan Gangguan Frekuensi	96
7.2.	Monitor dan Penertiban Perangkat	100
7.2.1.	Monitor Sertifikasi Alat/Perangkat Telekomunikasi	100
7.3.	Kondisi Sistem Monitor Frekuensi Radio dan Sistem Informasi Manajemen SDPPI	105
7.3.1.	Kondisi Sistem Monitor Frekuensi Radio (SMFR)	105
7.3.2.	Kondisi Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS)	110
8	Bidang Standardisasi Perangkat	111
8.1.	Penerbitan Sertifikat	112
8.1.1.	Perkembangan Penerbitan Sertifikat Alat dan Perangkat	112
8.1.2.	Penerbitan Sertifikat Menurut Kelompok Jenis Perangkat	113
8.1.3.	Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Perangkat	114
9	Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	119
9.1.	Prosedur Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	120
9.2.	Jumlah Penerbitan SP2 Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	121
9.2.1.	Penerbitan SP2 Alat dan Perangkat Telekomunikasi menurut Negara Asal	122
9.2.2.	Penerbitan SP2 Menurut Kategori Perangkat	123
9.3.	Rekapitulasi Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi	127
9.3.1.	Hasil Pengujian Perangkat Menurut Negara Asal	127
9.3.2.	Hasil Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	127
9.4.	Kalibrasi Alat Uji Perangkat Telekomunikasi	133
10	Ekonomi Bidang SumberDaya dan Perangkat Pos dan Informatika	135
10. 1.	Peran Sektor Pos dan Telekomunikasi dalam Pendapatan Nasional	136

10.2.	Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Penerimaan Negara	138
10.3.	Peran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam Penerimaan Negara.....	142
10.3.1.	PNBP Bidang BHP Frekuensi	143
10.3.2.	PNBP Bidang Standardisasi	144
10.3.3.	PNBP dari Sertifikasi Operator Radio	145
	10.3.3.1. PNBP dari REOR dan SKOR	145
	10.3.3.2 PNBP dari IAR dan IKRAP	146
10.3.4.	PNBP Lainnya	147
10.4.	Perkembangan Ekspor Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi	149



DAFTAR TABEL

• Tabel 2.1. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Seluruh Kota di Indonesia	15
• Tabel 2.2. Rangkuman Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI Tahun 2012 s.d. 2015	17
• Tabel 2.3. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Unit Layanan Publik di Lingkungan Ditjen SDPPI Tahun 2013, 2014, dan 2015	18
• Tabel 2.4. Sertifikasi Mutu ISO untuk Pelayanan yang Dimiliki Unit Kerja di Ditjen SDPPI	19
• Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Ditjen SDPPI Menurut Unit Kerja Semester-2 Tahun 2015	22
• Tabel 3.2. Perbandingan Jumlah Pegawai Ditjen SDPPI Menurut Unit Kerja Tahun 2011 (Semester 1) s.d. 2015 (semester 2)	23
• Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal SDPPI Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 (semester 1) s.d. 2015 (semester 2)	24
• Tabel 3.4. Jumlah Pegawai UPT Ditjen SDPPI Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 (semester 1 & 2)	26
• Tabel 3.5. Jumlah Pegawai Unit Kerja UPT Monfrek Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Semester 2 Tahun 2015	26
• Tabel 3.6. Data PPNS Menurut Unit Kerja Ditjen SDPPI (di Luar UPT Monfrek) Semester 2 Tahun 2015	28
• Tabel 3.7. Data PPNS UPT Monfrek Semester 2 2015	29
• Tabel 3.8. Pejabat Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio Semester 2 2015	30
• Tabel 4.1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang SDPPI Tahun 2015	34
• Tabel 4.2. Peraturan Menteri Kominfo yang Diterbitkan pada Tahun 2015	36

DAFTAR TABEL

• Tabel 4.4. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Menurut Bidang SDPPI Periode 2011 s.d. Tahun 2015	38
• Tabel 5.1. Perhitungan Besaran Tagihan BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) Tahun 2015	41
• Tabel 5.2. Akumulasi Penerimaan BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) Tahun 2013 s.d. Semester-1 Tahun 2015	42
• Tabel 5.3 Tanggapan terhadap Publikasi BRIFIC 2782-2805	43
• Tabel 5.4. Negara dan Jumlah Publikasi <i>Filing</i> Satelitnya dalam BRIFIC 2782-2805 Tahun 2015	45
• Tabel 5.5. Daftar Pengguna Satelit Asing Tahun 2015	47
• Tabel 5.6. Perkembangan Permohonan Hak Labuh Satelit Per-Semester Sejak Tahun 2010 s.d. Tahun 2015	49
• Tabel 5.7. Stasiun Radio Dinas Satelit Indonesia yang Sudah Dinotifikasi ke ITU Tahun 2015	51
• Tabel 5.8. Stasiun Radio Dinas Terestrial Indonesia yang Sudah Dinotifikasi ke ITU Tahun 2015	52
• Tabel 5.9. Stasiun Radio Dinas Maritim Indonesia yang Sudah Dinotifikasi ke ITU Tahun 2015	52
• Tabel 6.1. Jumlah Pengguna Frekuensi (ISR) berdasarkan Band Frekuensi pada Tahun 2012 s.d. Tahun 2015	56
• Tabel 6.2. Jumlah Pengguna Kanal Frekuensi menurut <i>Service</i> Pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015	57
• Tabel 6.3. Jumlah Pengguna Kanal Frekuensi Berdasarkan <i>Service</i> dan <i>Sub-service</i> dari Tahun 2012 s.d. 2015	58
• Tabel 6.4. Jumlah Pengguna Frekuensi (ISR) berdasarkan Band Frekuensi per-Provinsi Tahun 2015	60
• Tabel 6.5. Jumlah Pengguna Band Frekuensi (ISR) Berdasarkan <i>Service</i> dan <i>Sub-service</i> per-Provinsi Tahun 2015	62
• Tabel 6.6. Perbandingan Jumlah Pengguna Band Frekuensi (ISR) Berdasarkan Pulau Besar dan Band Frekuensi Tahun 2012 s.d. 2015	64
• Tabel 6.7. Sebaran Penerbitan SKAR dan IAR Tahun 2015	65
• Tabel 6.8. Sebaran Penerbitan IKRAP pada Tahun 2015	67
• Tabel 6.9. Peserta dan Kelulusan REOR GMDSS Tahun 2013 s.d. 2015	68
• Tabel 6.10. Peserta dan Kelulusan SKOR Tahun 2012 s.d. Tahun 2015	70
• Tabel 6.11. Data Statistik <i>Call Contact Center</i> Ditjen SDPPI Tahun 2015	71
• Tabel 6.12. Data Statistik <i>Ticket Contact Center</i> Ditjen SDPPI Tahun 2015	72

• Tabel 6.13. Data Statistik <i>Ticket Center</i> Tahun 2015 Berdasarkan Unit Kerja	73
• Tabel 6.14. Data Statistik <i>Ticket Contact Center</i> Berdasarkan Provinsi Tahun 2015	75
• Tabel 6.15. Tingkat Penyelesaian <i>Ticket Contact Center</i> Berdasarkan Unit Kerja pada Tahun 2015	77
• Tabel 6.16. Data Pengunjung Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI Tahun 2015	78
• Tabel 6.17 Proporsi Pengunjung Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI Berdasarkan Gender Pada Tahun 2015	80
• Tabel 7.1. Rekapitulasi Hasil Monitor oleh Masing-Masing UPT Tahun 2015	84
• Tabel 7.2. Hasil Monitor Frekuensi Berdasarkan Dinas/Service Tahun 2015)	86
• Tabel 7.3. Hasil Monitor Frekuensi Berdasarkan Band Frekuensi pada Tahun 2015	88
• Tabel 7.4. Hasil Monitor Frekuensi Berdasarkan Dinas Komunikasi 1 Tahun 2015	89
• Tabel 7.5. Hasil Rekapitulasi Monitor Penggunaan Data Selular di Kabupaten/Kota Tahun 2015	90
• Tabel 7.6. Hasil Rekapitulasi Monitor Penggunaan Profil Radio Siaran Secara Nasional di Kabupaten/Kota Tahun 2015	92
• Tabel 7.7. Rekapitulasi Penertiban Spektrum oleh Masing-Masing UPT Tahun 2015	93
• Tabel 7.8. Jumlah Gangguan Frekuensi Berdasarkan Jenis Layanan per-UPT Tahun 2015	97
• Tabel 7.9. Verifikasi/Pengecekan Standardisasi Perangkat Pos dan Telekomunikasi Tahun 2015	101
• Tabel 7.10. Hasil Kegiatan Penertiban Alat dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi Tahun 2015	103
• Tabel 7.11. Hasil Monitor Perdagangan Online Alat dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi Tahun 2015	104
• Tabel 7.12. Hasil Monitor Situs Perdagangan Online Tahun 2015	105
• Tabel 7.13. Rekapitulasi Hasil Kondisi Perangkat Spektrum Frekuensi pada Tahun 2015	106

• Tabel 7.14. Kondisi Perangkat Spektrum Frekuensi Stasiun V-UHF Tahun 2015	108
• Tabel 7.15. Kondisi Sumber Daya dan Beban Kerja Masing-Masing UPT Monitor Frekuensi di Indonesia Tahun 2015	109
• Tabel 7.16. Prosentase fungsi dan operasional modul aplikasi SIMS Tahun 2015	110
• Tabel 7.17. Ketersediaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) Tahun 2015	110
• Tabel 8.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Jenis Permohonan Sertifikat pada Tahun 2011 s.d. 2015	113
• Tabel 8.2. Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat pada Semester 2 Tahun 2015	113
• Tabel 8.3. Penerbitan Sertifikat Bulanan Menurut Jenis Permohonan Sertifikat dari Tahun 2013 s.d. Semester 2 Tahun 2015 ...	114
• Tabel 8.4. Jumlah Sertifikat Menurut Negara Asal Tahun 2011 sampai dengan Semester 2 Tahun 2015	115
• Tabel 8.5. Jumlah dan Persentase Sertifikat Menurut Jenis Permohonan Sertifikat dan Negara Asal Perangkat pada Semester 2 Tahun 2015	116
• Tabel 8.6. Jumlah dan Persentase Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat dan Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2015	118
• Tabel 9.1. Perbandingan Jumlah dan Nilai SP2 pada Semester- 2 Tahun 2014 dan 2015	121
• Tabel 9.2. Perkembangan Jumlah Penerbitan SP2 per Bulan pada Semester-2 Tahun 2012 s.d. 2015	122
• Tabel 9.3. Jumlah dan Nilai Penerimaan SP2 Menurut Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2015 (Total 1650)	122
• Tabel 9.4. Jumlah Penerbitan SP2 Menurut Kategori Perangkat dan Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2015	124
• Tabel 9.5. RHU pada Semester-2 Tahun 2012 s.d 2015	127
• Tabel 9.6. RHU pada Semester-2 Tahun 2014 dan 2015 Berdasarkan Negara Produsen Alat dan Perangkat	128
• Tabel 9.7. RHU Alat dan Perangkat Telekomunikasi pada Semester-2 Tahun 2015	129

• Tabel 9.8. Jumlah Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Diuji Menurut Kategori dan Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2015	130
• Tabel 9.9. Jumlah dan Biaya Kalibrasi Alat Uji pada Semester-2 Tahun 2015	133
• Tabel 10.1. Kontribusi Setiap Lapangan Usaha terhadap PDB atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)	137
• Tabel 10.2. Target Penerimaan Negara berdasarkan RAPBN-P pada Tahun 2015 (Miliar Rupiah)	138
• Tabel 10.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan RAPBN-P pada Tahun 2015 (Miliar Rupiah)	140
• Tabel 10.4. Target PNBP Enam Besar Kementerian/Lembaga Besar pada Tahun 2015 dalam PNBP Lainnya (Milyar Rupiah)	140
• Tabel 10.5. Target dan Realisasi PNBP SDPPI pada Tahun 2015	142
• Tabel 10.6. Realisasi PNBP Bidang SDPPI setiap pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015 (dalam Ribu Rp.)	142
• Tabel 10.7. Perkembangan PNBP dari BHP Frekuensi pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015	143
• Tabel 10.8. Perkembangan PNBP dari Bidang Standardisasi pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015	144
• Tabel 10.9. Perkembangan PNBP dari Bidang REOR dan SKOR pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015	146
• Tabel 10.10. Perkembangan PNBP dari Bidang IAR dan IKRAP pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015	147
• Tabel 10.11. Perkembangan PNBP dari Sumber Lain-Lain pada Tahun 2011 s.d. Semester-1 Tahun 2015	149
• Tabel 10.12. Ekspor dan Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi pada Tahun 2008 s.d. Tahun 2015	150
• Tabel 10.13. Komposisi Ekspor Impor pada Tahun 2015 berdasarkan Kelompok HS (Harmonized System)	151



DAFTAR GAMBAR

• Gambar 1. Profil Data Demografi Kependudukan Republik Indonesia	5
• Gambar 2. Profil Data Digital Penduduk Indonesia	5
• Gambar 3. Profil Kenaikan Tahunan Data Digital Penduduk Indonesia	6
• Gambar 4.1. Komposisi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang SDPPI Tahun 2015	35
• Gambar 4.2. Komposisi Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDPPI Menurut Bidang Kerja Tahun 2015	35
• Gambar 4.3. Komposisi Peraturan Perundang-Undangan yang Diterbitkan Sejak Dibentuknya Ditjen SDPPI	38
• Gambar 5.1. Jumlah Pemohonan Hak Labuh Satelit Tahun 2010 s.d. 2015	50
• Gambar 6.1. Jumlah Pengguna Frekuensi Berdasarkan Band Frekuensi di Indonesia Tahun 2012 s.d. 2015	56
• Gambar 6.2. Persentase Jumlah Pengguna Kanal Frekuensi Menurut Service Tahun 2012 s.d. 2015	58
• Gambar 6.3. Persentase Jumlah Pengguna Kanal Frekuensi Berdasarkan Service dan Sub-Service Tahun 2015	59
• Gambar 6.4. Jumlah dan Persentase Pengguna Band Frekuensi ISR Berdasarkan Pulau Besar Tahun 2015	61
• Gambar 6.5. Tingkat Kelulusan REOR Menurut Kota Tahun 2013 s.d. 2015	69
• Gambar 6.7. Data Statistik Ticket Contact Center Tahun 2015 Berdasarkan Unit Kerja	74
• Gambar 6.8. Data Statistik Ticket Contact Center Berdasarkan Pulau Besar Tahun 2015	74
• Gambar 6.9. Rekapitulasi Pengunjung Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI Tahun 2015	79
• Gambar 7.1A Komposisi Jenis Pelanggaran Tahun 2015	94
• Gambar 7.1B Komposisi Jenis Tindakan Penertiban Tahun 2015	95

• Gambar 7.2. Sebaran Jenis Pelanggaran dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Tahun 2011 s.d. 2015	95
• Gambar 7.3. Distribusi Temuan Gangguan Frekuensi Menurut Pulau Besar pada Tahun 2011 s.d. 2015	96
• Gambar 7.4. Jumlah Gangguan Frekuensi Menurut Jenis Layanan Frekuensi pada Tahun 2015	99
• Gambar 7.5. Distribusi Gangguan Frekuensi Menurut Jenis Layanan di Pulau Besar Tahun 2015	99
• Gambar 7.6. Tingkat Kepatuhan Sertifikat dan Label Alat dan Perangkat Tahun 2015	102
• Gambar 7.7. Tingkat Kepatuhan Sertifikat dan Label Alat dan Perangkat Menurut Kota/Daerah pada Tahun 2015	102
• Gambar 7.8. Komposisi Perangkat Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2015	108
• Gambar 10.1. Komposisi Target Penerimaan Negara berdasarkan RAPBN pada Tahun 2015	139
• Gambar 10.2. Komposisi Target PNPB Enam Besar Kementrian/Lembaga Tahun 2015	141
• Gambar 10.3. Tren Perkembangan Target dan Realisasi pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015	143
• Gambar 10.4. Tren Perkembangan Target dan Realisasi PNPB Dit. Standardisasi pada Tahun 2011 s.d. Semester-1 Tahun 2015	144
• Gambar 10.5. Perkembangan PNPB Sertifikasi Operator Radio pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015 (Ribu Rp.)	145
• Gambar 10.6. Perkembangan Target dan Realisasi REOR dan SKOR pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015	146
• Gambar 10.7. Perkembangan Target dan Realisasi IAR dan IKRAP pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015	147
• Gambar 10.8. Proporsi PNPB Lainnya pada Tahun 2015	148
• Gambar 10.9. Perkembangan dan Realisasi Target PNPB Sumber Lainnya pada Tahun 2011 Tahun 2015	149
• Gambar 10.10. Kontribusi Ekspor pada Tahun 2015 berdasarkan Kelompok Penomoran Harmonized System	151
• Gambar 10.11. Kontribusi Impor pada Tahun 2015 berdasarkan Kelompok Penomoran Harmonized System	152

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 10.12 Tren Perkembangan Nilai Ekspor Impor
pada Tahun 2010 s.d. Tahun 2015 153
- Gambar 10.13 Tren Perkembangan Berat Ekspor Impor
pada Tahun 2010 s.d. Tahun 2015 154





1

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

2 Selama periode 2015, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui berbagai upaya pencapaian yang diturunkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen SDPPI sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019. Renstra Kemkominfo 2015-2019 yang telah disusun, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019, sejatinya mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan visi dimaksud disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Ditjen SDPPI diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab

mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional dan teknis, serta pelaksanaannya di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam penyusunan kebijakan, Ditjen SDPPI sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tentunya perlu merujuk pada kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pelaksanaan visi, misi, dan agenda prioritas Presiden terpilih pada Pemilihan Umum 2014. Pemerintahan baru telah menyusun Kabinet Kerja dan menyusun sasaran serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti. Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri dalam ekonomi; dan (3) berkepribadian dalam budaya.

Ditjen SDPPI merupakan unit kerja eselon I di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, dimana terdapat empat fungsi pokok di bidang pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika nasional yaitu sebagai berikut:

- a. **Fungsi Penataan**, meliputi perencanaan dan pengaturan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit termasuk di dalamnya Hak Labuh Satelit, agar menghasilkan kualitas telekomunikasi nirkabel yang berstandar internasional, mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan meningkatkan nilai ekonomis sumber daya spektrum frekuensi radio;
- b. **Fungsi Pelayanan**, meliputi pelayanan izin spektrum frekuensi radio, pelayanan sertifikasi operator radio, pelayanan standardisasi perangkat pos dan informatika yang di dalamnya terdapat sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi agar sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
- c. **Fungsi Pengendalian**, meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta

kewajiban sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi agar penggunaan sumber daya dan perangkat informatika sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dengan spektrum frekuensi radio dan standardisasi alat dan perangkat informatika yang telah ditetapkan;

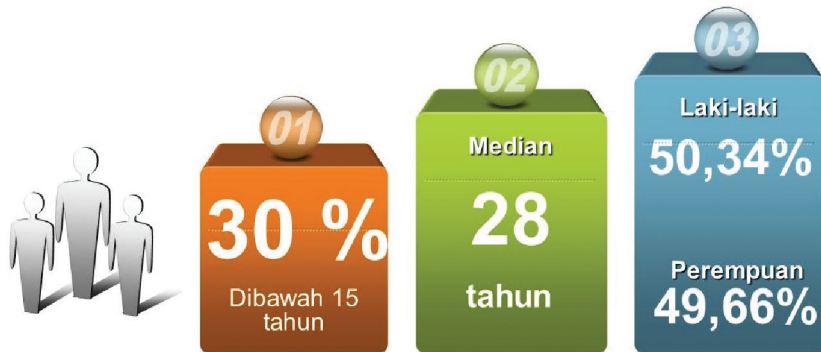
- d. **Fungsi Penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**, Ditjen SDPPI merupakan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai penghasil PNBP atas sumber daya milik negara yang dikelolanya melalui izin spektrum frekuensi radio serta pelayanan lainnya yang terkait dengan pelayanan sertifikasi operator radio serta standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi, yang meliputi sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

4

Data demografi penduduk Indonesia, menunjukkan bahwa 30 % dari total jumlah penduduk Indonesia merupakan usia produktif yang membutuhkan layanan pita lebar (*broadband*) yang dapat meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi negara (lihat gambar 1). Kebutuhan layanan pita lebar ini diperkuat oleh hasil lembaga riset *We Are Social* yang berbasis di Singapura dimana pada tahun 2015, dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255,5 juta jiwa, terdapat 72,7 juta jiwa merupakan pengguna internet aktif, mengalami penambahan 28 % dari tahun sebelumnya. Data lain menunjukkan, pemakai telepon seluler mengalami penambahan yang sangat signifikan menjadi 308,2 juta pengguna, dimana mengalami kenaikan sebesar 9 % dari tahun sebelumnya (lihat gambar 2 dan gambar 3). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pita lebar cukup signifikan, terlihat dari berbagai trend data digital yang ada di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan pita lebar dan mendukung digital ekonomi, Ditjen SDPPI telah berhasil melakukan penataan (refarming) pita frekuensi 1800 MHz dengan teknologi 4G LTE (*Long Term Evaluation*) dalam lingkup nasional yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Jumat 11 Desember 2015.

241,04 juta jiwa (Sensus 2010)
255,4 juta jiwa (2015)

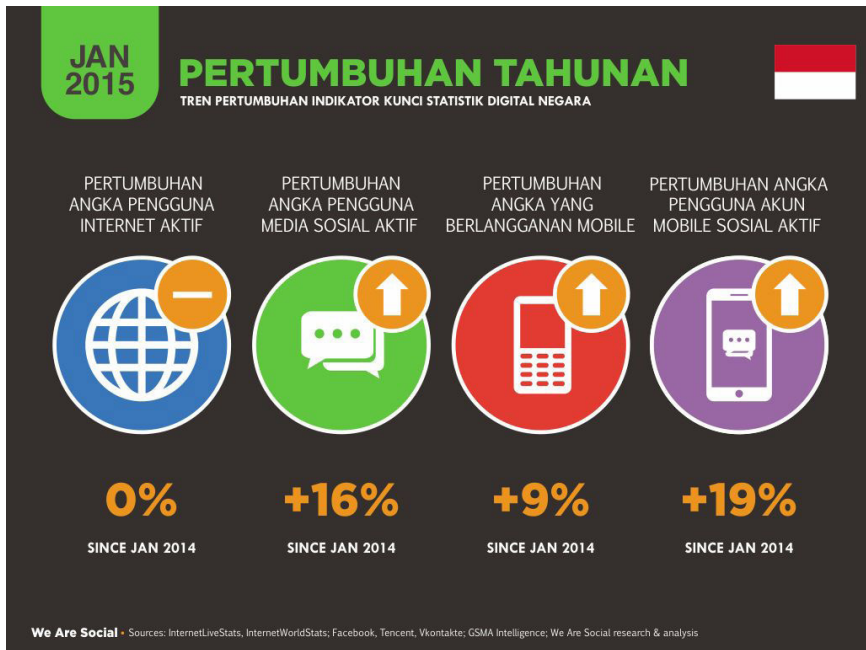


Gambar 1. Profil Data Demografi Kependudukan Republik Indonesia



Gambar 2. Profil Data Digital Penduduk Indonesia

DATA STATISTIK DITJEN SDPPI SEMESTER 2 TAHUN 2015



Gambar 3. Profil Kenaikan Tahunan Data Digital Penduduk Indonesia

Selain peningkatan layanan pitalebar, Ditjen SDPPI pada tahun 2015 juga merespon kebutuhan masyarakat khususnya industri telekomunikasi dengan meluncurkan Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio melalui sistem *Machine to Machine Interface* (M2M). Percepatan layanan perzinanan frekuensi radio ini menggunakan media antar muka secara daring.

Isu lain yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja Ditjen SDPPI adalah *digital economy*. Saat ini globalisasi telah menjadi isu yang menjadi *trend* dalam perkembangan dunia kontemporer. Globalisasi yang meniadakan jarak, ruang, dan waktu mengintervensi adanya teknologi yang memanfaatkan dunia digital. Berkaitan dengan hal tersebut, ditjen SDPPI memiliki kewenangan untuk membuat dan menyusun regulasi mengenai perangkat telekomunikasi yang menunjang praktik pelaksanaan *digital economy*. Tahun 2015, Ditjen SDPPI melalui Direktorat Penataan Sumber Daya telah menentukan filing satelit BRISat, satelit PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2016.

Untuk mendukung kebijakan Ditjen SDPPI khususnya dibidang pengendalian, pada tahun 2015 diluncurkan Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang diharapkan dapat menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio. Selain itu, pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) terus dioptimalkan melalui pencapaian sertifikasi ISO di berbagai unit kerja SDPPI.

Bila dilihat dari aspek ekonomi nasional, pendapatan dalam negeri terdiri dari pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencakup semua penerimaan pemerintah yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). PNBP Lainnya meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/ Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada tahun 2015, Ditjen SDPPI berhasil mendapatkan Rp. 13,653 Trilyun, melebihi dari target yang dicanangkan dalam APBN yaitu sebesar Rp. 11,465 Trilyun atau mencapai 119,08 % dari target PNBP yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN BUKU

Tujuan kegiatan penyusunan buku Data Statistik Ditjen SDPPI semester-2 tahun 2015 ini adalah merangkum dan menyusun data statistik dalam lingkup Ditjen SDPPI yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Ditjen SDPPI maupun para pemangku kepentingan lain dalam menentukan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya.

1.3. METODOLOGI PENYUSUNAN BUKU

Penyusunan buku Data Statistik Ditjen SDPPI semester-2 tahun 2015 dilakukan melalui beberapa tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Identifikasi dan Pengumpulan Data Pendukung

Dalam penyusunan buku Data Statistik Ditjen SDPPI semester-2 tahun 2015,

dibutuhkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:-

- a) Data yang berasal dari unit kerja di lingkungan Ditjen SDPPI, seperti Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) SDPPI, Direktorat di lingkungan Ditjen SDPPI, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, dan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio (data sampai dengan 31 Desember 2015);
- b) Sumber data lain yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait maupun para pemangku kepentingan lainnya, seperti data dari publikasi Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Ditjen SDPPI sendiri dan laporan riset pasar dari lembaga riset internasional We Are Social.

1.3.2 Pengolahan Data (*Data Processing*)

Proses tahapan pengolahan data dari buku Data Statistik Ditjen SDPPI semester-2 tahun 2015, setelah data terkumpul dilakukan pengembangan tata cara penyajian data. Pengembangan tata cara penyajian data dilakukan dengan menampilkan data yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika dikaitkan dengan data demografi dan data pertumbuhan atau perkembangan ekonomi untuk setiap wilayah. Pada buku Data Statistik Ditjen SDPPI semester-2 tahun 2015, penyajian data dilakukan dengan pemilihan jenis grafik dan tabel yang digunakan. Sehingga diharapkan akan menarik dan mempermudah pembaca memahami isi dari buku ini.

1.3.3 Format Penulisan Buku Data Statistik Ditjen SDPPI

1. Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisikan uraian tentang latar belakang, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, serta manfaat penyusunan buku Data Statistik Ditjen SDPPI.

2. Profil Ditjen SDPPI

Pada bab ini berisikan informasi meliputi: (i) Tugas dan fungsi Ditjen SDPPI;

(ii) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen SDPPI; (iii) Pelayanan Publik Ditjen SDPPI; (iv) Sertifikasi Kelembagaan; dan (v) *Contact Center*.

3. Sumber Daya Manusia

Pada bab ini berisikan data terkait jumlah pegawai, jabatan struktural, tingkat pendidikan pegawai, dan pegawai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen SDPPI.

4. Peraturan Perundang-undangan

Pada bab ini berisikan uraian tentang jumlah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.

5. Bidang Penataan Sumber Daya

Pada bab ini berisikan data terkait penataan sumber daya spektrum frekuensi radio dan pengelolaan sumber daya orbit satelit.

6. Bidang Operasi Sumber Daya

Pada bab ini menyajikan data tentang penggunaan frekuensi (Izin Stasiun Radio/ISR), penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP), Sertifikasi Operator Radio dan layanan *contact center*.

7. Bidang Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat

Pada bab ini ditampilkan data terkait monitor dan penertiban frekuensi, monitor dan penertiban perangkat, kondisi Sistem Monitor Frekuensi Radio (SMFR) dan kondisi jaringan Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS).

8. Bidang Standardisasi Perangkat

Pada bab ini disajikan data terkait perkembangan penerbitan sertifikat alat dan perangkat, penerbitan sertifikat menurut kelompok jenis perangkat,

fluktuasi penerbitan sertifikat bulanan, dan penerbitan sertifikat menurut negara asal perangkat.

9. Bidang Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Pada bab ini berisikan data dan informasi tentang statistik pengujian alat/perangkat telekomunikasi, Surat Perintah Pembayaran (SP2) Pengujian, dan pengujian kalibrasi perangkat.

10. Ekonomi Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Pada bab ini berisikan data informasi tentang peran industri pos dan telekomunikasi dalam pendapatan nasional, peran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam penerimaan negara, perkembangan ekspor impor alat dan perangkat telekomunikasi, dan prospek pengembangan ekonomi bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

1.4. MANFAAT PENYUSUNAN BUKU

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan buku statistik ini adalah:

- 1) Memberikan informasi yang terkini berupa data yang terdapat dalam ruang lingkup Ditjen SDPPI dan data pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang telah disusun secara sistematis, jelas dan ringkas;
- 2) Memberi informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat umum dapat mempergunakan data statistik Ditjen SDPPI untuk masing-masing keperluan;
- 3) Sebagai referensi bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Sebagai referensi terpercaya berbagai studi mengenai teknologi informasi dan komunikasi.





2

PROFIL DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Bab ini menyajikan profil Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). Data dan informasi yang disajikan, antara lain: (i) Tugas dan fungsi Ditjen SDPPI; (ii) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen SDPPI; (iii) Pelayanan publik Ditjen SDPPI; (iv) Sertifikasi kelembagaan; dan (v) *Contact Center*.

2.1. TUGAS DAN FUNGSI DITJEN SDPPI

Ditjen SDPPI adalah salah satu Direktorat Jenderal yang terbentuk melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ditjen SDPPI merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang memiliki fokus pada pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang terkait dengan penggunaan oleh pemerintah, maupun publik/masyarakat.

Ditjen SDPPI memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen SDPPI menyelenggarakan fungsi:

- (a). Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (b). Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (c). Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (d). Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- (e). Pelaksanaan administrasi Ditjen SDPPI.

Berdasarkan struktur serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Ditjen SDPPI ini, maka selain fungsi kebijakan, pengaturan, dan pembinaan, Ditjen SDPPI juga memiliki fungsi pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik ini dilakukan melalui penerbitan izin spektrum frekuensi radio, termasuk pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio, pengujian kompetensi dan sertifikasi operator radio, sertifikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Struktur organisasi Ditjen SDPPI terdiri atas:

1. Sekretariat Ditjen SDPPI (Setditjen SDPPI), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen SDPPI.
2. Direktorat Penataan Sumber Daya, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya.
3. Direktorat Operasi Sumber Daya, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya.
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.

2.2. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN DITJEN SDPPI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen SDPPI dalam pengelolaan

sumber daya dan perangkat pos dan informatika, Ditjen SDPPI didukung oleh UPT yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- (1) UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT);
- (2) UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

2.2.1. UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen SDPPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI). BBPPT dalam melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Ditjen SDPPI (*Technical Specification Regulation*), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan acuan internasional seperti (ISO, ETSI, RR, ITU, dan IEC). BBPPT menggunakan acuan-acuan tersebut agar mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia telah sesuai dengan persyaratan teknis.

BBPPT, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dilengkapi dengan sarana pendukung berupa:

- (1) Laboratorium Pengujian Perangkat Radio;
- (2) Laboratorium Pengujian Perangkat Berbasis Kabel;
- (3) Laboratorium Pengujian EMC (*Electromagnetic Compatibility*);
- (4) Laboratorium Kalibrasi.

Jenis layanan pengujian yang dilayani oleh laboratorium-laboratorium di lingkungan BBPPT adalah:

- (1) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio;
- (2) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio;
- (3) Pengujian Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi;
- (4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi;

2.2.2. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja yang

bersifat mandiri di lingkungan Ditjen SDPPI yang bertanggung jawab langsung kepada Dirjen SDPPI. Berdasarkan kelasnya, Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

- (1) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
- (2) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II;
- (3) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- (4) Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio tersebar di 37 kota di Indonesia. Secara lengkap sebaran UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Seluruh Kota di Indonesia

No	UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio	No	UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
1	Balmon Kelas I Jakarta	20	Lokmon Padang
2	Balmon Kelas II Aceh	21	Lokmon Pangkal Pinang
3	Balmon Kelas II Medan	22	Lokmon Jambi
4	Balmon Kelas II Pekanbaru	23	Lokmon Bengkulu
5	Balmon Kelas II Batam	24	Lokmon Bandar Lampung
6	Balmon Kelas II Palembang	25	Lokmon Mataram
7	Balmon Kelas II Bandung	26	Lokmon Palangkaraya
8	Balmon Kelas II Tangerang	27	Lokmon Banjarmasin
9	Balmon Kelas II Semarang	28	Lokmon Balikpapan
10	Balmon Kelas II Yogyakarta	29	Lokmon Tahuna
11	Balmon Kelas II Surabaya	30	Lokmon Gorontalo
12	Balmon Kelas II Denpasar	31	Lokmon Palu
13	Balmon Kelas II Kupang	32	Lokmon Kendari

14	Balmon Kelas II Pontianak	33	Lokmon Mamuju
15	Balmon Kelas II Samarinda	34	Lokmon Ambon
16	Balmon Kelas II Manado	35	Lokmon Ternate
17	Balmon Kelas II Makassar	36	Lokmon Manokwari
18	Balmon Kelas II Jayapura	37	Posmon Sorong
19	Balmon Kelas II Merauke		

2.3. Pelayanan Publik Ditjen SDPPI

Pelayanan publik Ditjen SDPPI mencakup 4 (empat) bidang penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: penyelenggaraan pelayanan publik Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (bidang frekuensi), Sertifikasi Operator Radio dan Standardisasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Sertifikasi dan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi). Secara detail operasional beberapa pelayanan penyelenggaraan bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, yaitu:

16

- 1) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu layanan publik yang diberikan kepada badan hukum (perusahaan) dan instansi pemerintah atas penggunaan spektrum frekuensi radio, antara lain untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal, navigasi dan komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan serta penggunaan pita spektrum frekuensi oleh berbagai pihak dan untuk berbagai kebutuhan;
- 2) Sertifikasi Operator Radio, yaitu segala proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat untuk operator radio, pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;
- 3) Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu segala proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi. Sertifikasi sangat penting karena untuk menjamin perangkat dapat berfungsi dengan baik dan tidak berinterferensi ketika perangkat tersebut terintegrasi dalam jaringan telekomunikasi Indonesia. Selain itu, sertifikasi juga membantu pengguna untuk memilih perangkat yang sesuai dengan standar Indonesia;

- 4) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu layanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi yang mengacu pada spesifikasi teknis atau Technical Specification Regulation, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, dan IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Berdasarkan survei kepuasan pelanggan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen SDPPI pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI Kemkominfo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang tersaji pada Tabel 2.2. Selain mengukur indeks kepuasan masyarakat, survei kepuasan pelanggan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen SDPPI pada tahun 2013, 2014 dan 2015 mengukur juga indeks integritas pelayanan publik Ditjen SDPPI. Hasil Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) unit layanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Rangkuman Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen SDPPI Tahun 2012 s.d. 2015

No	Pelayanan Publik	2012		2013		2014		2015	
		IKM	Kinerja Unit Pelayanan	IKM	Kinerja Unit Pelayanan	IKM	Kinerja Unit Pelayanan	IKM	Kinerja Unit Pelayanan
1	Ditjen SDPPI *)	72,30	Baik	75,85	Baik	78,36	Baik	79,05	Baik
2	ISR	71,00	Baik	75,83	Baik	77,75	Baik	79,31	Baik
3	Sertifikasi Operator Radio	75,10	Baik	77,56	Baik	78,98	Baik	79,13	Baik
4	Standarisasi Perangkat	71,90	Baik	76,15	Baik	77,91	Baik	79,53	Baik
5	Pengujian Perangkat	70,70	Baik	74,13	Baik	79,13	Baik	78,07	Baik

*) Gabungan dari seluruh unit layanan publik Ditjen SDPPI

Tabel 2.3. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Unit Layanan Publik di Lingkungan Ditjen SDPPI Tahun 2013, 2014, dan 2015.

No	Pelayanan Publik	Data 2013	Data 2014	Data 2015
		Nilai IIPP	Nilai IIPP	Nilai IIPP
1	Ditjen SDPPI Kemkominfo	7,30	8,52	8,57
2	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	7,15	8,51	8,52
3	Sertifikasi Operator Radio	6,90	8,53	8,47
4	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,17	8,48	8,64
5	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	7,33	8,56	8,58

18

Pada tabel 2.3, dapat terlihat nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Data statistik diatas menunjukkan bahwa kinerja Ditjen SDPPI pada tahun 2015 pada aspek kepuasan masyarakat serta pelayanan publik dapat dikategorikan baik, dimana seluruh unit kerja yang berada pada Ditjen SDPPI menunjukkan performa baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2.4. Sertifikasi Mutu Pelayanan

Beberapa organisasi kelembagaan di dalam struktur organisasi Ditjen SDPPI memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat maupun tugas yang mengharuskan adanya proses atau prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Untuk menjamin prosedur yang baku dan memenuhi standar maka beberapa organisasi yang memberikan pelayanan tersebut juga telah melakukan proses sertifikasi mutu pelayanan organisasi dalam bentuk sertifikasi ISO. Sebagian besar sertifikasi mutu pelayanan yang telah dimiliki unit kerja di Ditjen SDPPI adalah sertifikasi ISO

9001 yang terkait dengan mutu pelayanan. Sertifikasi Mutu ISO untuk pelayanan yang dimiliki unit kerja di Ditjen SDPPI disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Sertifikasi Mutu ISO untuk Pelayanan yang Dimiliki Unit Kerja di Ditjen SDPPI

No	Satuan Kerja	Jenis Sertifikat	Sertifikasi	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat
1	Direktorat Operasi Sumber Daya	Manajemen Mutu Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio	ISO 9001 : 2008	TUV-NORD
2	Direktorat Pengendalian Sumber Daya	Manajemen Mutu	ISO 9001 : 2008	TUV-NORD
3	Direktorat Pengendalian Sumber Daya	Pengelolaan Keamanan Informasi pada data Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)	ISO 27001:2013	TUV-NORD
4	Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan Kalibrasi Alat Ukur	ISO/IEC 17025 : 2008	Ilac-MRA-KAN
5	UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Bandung	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001: 2008	Global Group (UKAS)
6	UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Surabaya	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001: 2008	Global Group (UKAS)
7	UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Denpasar	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
8	UPT Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Semarang	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
9	Balai Monitor Kelas I Jakarta	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
10	Balai Monitor Kelas II Yogyakarta	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
11	Balai Monitor Kelas II Banten	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
12	Balai Monitor Kelas II Makasar	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)
13	Loka Monitor Mataram	Pelayanan Monitoring Frekuensi Radio	ISO 9001:2008	Global Group (UKAS)

2.5. Contact Center

Contact Center adalah layanan yang disediakan oleh Ditjen SDPPI kepada masyarakat/pengguna layanan publik untuk menyampaikan pertanyaan, pengaduan atau keluhan atas layanan publik yang disediakan oleh Ditjen SDPPI. Pertanyaan, pengaduan atau keluhan dari masyarakat/pengguna layanan publik dapat disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan oleh Ditjen SDPPI berupa Layanan *Contact Center* sebagai berikut:



1. Telepon

Untuk layanan telepon dapat menghubungi nomor +6221-3000 3100.



2. Faksimile

Untuk layanan faksimile dapat dikirim ke nomor +6221-3000 3111.



3. Surat Elektronik

Untuk layanan surat elektronik dapat dikirim ke alamat callcenter_sdppi@postel.go.id.



4. Webchat

Untuk layanan *live chat* silahkan klik di alamat sdppi.kominfo.go.id atau www.postel.go.id.



5. Media Sosial Facebook

Untuk layanan media sosial Facebook silahkan *like* di *Fan Page* Pelayanan SDPPI.



6. Media Sosial Twitter

Untuk layanan media sosial Twitter silahkan *follow* di @LayananSDPPI.





3

SUMBER DAYA MANUSIA

Statistik sumber daya manusia (SDM) yang merupakan fokus pada bab ini menggambarkan jumlah dan komposisi pegawai di Ditjen SDPPI pada semua unit kerja didalamnya (Setditjen SDPPI, Direktorat di Ditjen SDPPI, dan Unit Pelaksana Teknis). Statistik ini juga menggambarkan distribusi pegawai menurut jenjang tingkat pendidikan. Pada bab ini juga disajikan data jumlah pegawai pada unit pelaksana teknis di lingkup Ditjen SDPPI.

3.1. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai Ditjen SDPPI menurut unit kerja, hingga akhir semester-2 tahun 2015 atau bulan Desember 2015 adalah 1374 orang. Detail jumlah pegawai Ditjen SDPPI berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 3.1. Berdasarkan Tabel 3.1, dapat dilihat bahwa UPT Monfrek dan BBPPT merupakan unit kerja yang memiliki jumlah pegawai terbanyak, yaitu 917 orang. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 352 orang pegawai di Ditjen SDPPI yang berjenis kelamin perempuan (25,58%) dan 1.024 orang berjenis kelamin pria (78,05%).

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Ditjen SDPPI Menurut Unit Kerja Semester-2 Tahun 2015

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin (Orang)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	89	60	149
2	Dit. Penataan Sumber Daya	41	27	68
3	Dit. Operasi Sumber Daya	57	29	86
4	Dit. Pengendalian SDPPI	60	19	79
5	Dit. Standardisasi PPI	54	21	75
6	UPT Monfrek dan BBPPT	724	193	917
7	Pegawai diperbantukan di luar Ditjen SDPPI	0	0	0
Jumlah		1.025	349	1.374

Pada tabel 3.2 disajikan data mengenai perkembangan jumlah pegawai pada lingkungan Ditjen SDPPI selama lima tahun terakhir, mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. Pergerakan jumlah pegawai pada unit kerja Ditjen SDPPI dari tahun 2011 hingga tahun 2015 tidak signifikan, kecuali pada UPT Monfrek dan BBPPT. Persentase penambahan atau pengurangan pegawai berkisar di antara 3-4%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah pegawai di Ditjen SDPPI pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,075%.

Tabel 3.2. Perbandingan Jumlah Pegawai Ditjen SDPPI Menurut Unit Kerja Tahun 2011 s.d. 2015

No	Unit Kerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	171	159	159	148	149
2	Dit. Penataan Sumber Daya	56	60	66	64	68
3	Dit. Operasi Sumber Daya	74	76	83	82	86
4	Dit. Pengendalian SDPPI	58	58	71	76	79
5	Dit. Standardisasi PPI	64	64	69	69	75
6	UPT Monfrek dan BBPPT	929	915	883	876	917
7	Pegawai diperbantukan di luar Ditjen SDPPI	65	48	2	3	0
Jumlah		1.417	1.380	1.333	1.318	1.374
Besar Perubahan (%)			-2,61	-3,41	-1,13	4,075

Tingkat pendidikan merupakan unsur yang penting dalam menunjang kinerja sebuah organisasi. Seperti organisasi lainnya, Ditjen SDPPI juga memiliki anggota organisasi yang memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, mulai dari non sarjana (SD, SMP, SMA, Diploma) hingga tingkat Doktoral (S3). Tabel 3.3 menyajikan data mengenai jumlah pegawai Ditjen SDPPI berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI mayoritas telah bergelar sarjana, dengan komposisi sebesar 47,5%.

Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal SDPPI Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Unit Kerja	Tahun	Pendidikan					Jumlah
			Doktoral (S3)	Magister (S2)	Dokter	Sarjana (S1)	Non Sarjana	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	2011	1	19	2	64	85	171
		2012	1	19	2	64	73	159
		2013	1	21	2	64	71	159
		2014	1	23	2	62	60	148
		2015	1	22	2	64	60	150
2	Dit. Penataan Sumber Daya	2011	0	14	0	34	8	56
		2012	0	15	0	36	9	60
		2013	1	18	0	36	11	66
		2014	3	17	0	35	9	64
		2015	3	15	0	40	10	69
3	Dit. Operasi Sumber Daya	2011	0	21	0	33	20	74
		2012	0	21	0	35	20	76
		2013	0	20	0	41	22	83
		2014	0	20	0	48	14	82
		2015	0	20	0	51	15	86
4	Dit. Pengen- dalian SDPPI	2011	0	11	0	32	15	58
		2012	0	11	0	41	12	64
		2013	1	17	0	45	8	71
		2014	1	17	0	44	14	76
		2015	1	17	0	46	15	78
5	Dit. Standard- isasi PPI	2011	0	12	0	40	12	64
		2012	0	11	0	31	16	58
		2013	0	9	0	49	11	69
		2014	0	12	0	44	13	69
		2015	0	12	0	49	14	74

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		Tahun	Doktoral (S3)	Magister (S2)	Dokter	Sarjana (S1)	Non Sarjana	
6	UPT Monfrek dan BBPPT	2011	0	52	0	313	564	929
		2012	0	59	0	338	518	915
		2013	0	99	0	398	386	883
		2014	0	96	0	399	381	876
		2015	0	103	0	404	400	917
7	Pegawai yang diperbantukan di luar SDPPI	2011	1	21	0	31	12	65
		2012	1	16	0	22	9	48
		2013	0	1	0	1	0	2
		2014	0	2	0	1	0	3
		2015	0	0	0	0	0	2
Jumlah		2011	2	150	2	547	716	1.417
		2012	2	152	2	567	657	1.380
		2013	3	185	2	634	509	1.333
		2014	5	187	2	633	491	1.318
		2015	5	189	2	654	524	1.374

3.2. PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DITJEN SDPPI

3.2.1. Jumlah dan Komposisi Pegawai

Mengacu kepada struktur kepegawaian Ditjen SDPPI, terdapat dua unit pelaksana teknis di Ditjen SDPPI yaitu UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Monfrek) dan UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT). UPT Monfrek terdiri dari 37 UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup Balai/Loka/Pos Monitor. Jumlah pegawai UPT Monfrek dan BBPPT berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel. 3.4.

Tabel 3.4. Jumlah Pegawai UPT Ditjen SDPPI Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 (Semester 1 & 2)

Tahun	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	S2		S1		Non Sarjana		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
2015 (1)	96	10,9	406	46,13	378	42,95	880
2015 (2)	103	11,23	404	44,	410	44,1	917

3.2.2. Pegawai UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio (UPT Monfrek)

UPT Monfrek terdiri dari 37 UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup Balai/Loka/Pos Monitor. Data mengenai jumlah pegawai yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja berdasarkan latar belakang pendidikan disajikan dalam tabel 3.5.

26

Tabel 3.5. Jumlah Pegawai Unit Kerja UPT Monfrek Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Semester 2 Tahun 2015

No	Unit Kerja	Pendidikan			Jumlah
		S2	S1	Non Sarjana	
1	Balmon Kelas I Jakarta	3	17	21	41
2	Balmon Kelas II Aceh	3	11	18	32
3	Balmon Kelas II Medan	1	13	22	36
4	Balmon Kelas II Pekanbaru	3	13	6	22
5	Balmon Kelas II Batam	4	11	7	22
6	Balmon Kelas II Palembang	6	10	9	25
7	Balmon Kelas II Tangerang	5	14	12	31
8	Balmon Kelas II Bandung	5	14	21	40
9	Balmon Kelas II Yogyakarta	4	15	19	38
10	Balmon Kelas II Semarang	5	25	15	45

No	Unit Kerja	Pendidikan			Jumlah
		S2	S1	Non Sarjana	
11	Balmon Kelas II Surabaya	7	20	17	44
12	Balmon Kelas II Denpasar	5	14	14	33
13	Balmon Kelas II Kupang	0	10	18	28
14	Balmon Kelas II Samarinda	3	8	8	19
15	Balmon Kelas II Pontianak	2	12	8	22
16	Balmon Kelas II Manado	4	13	5	22
17	Balmon Kelas II Makassar	7	17	13	37
18	Balmon Kelas II Jayapura	0	9	8	17
19	Balmon Kelas II Merauke	0	6	8	14
20	Lokmon Padang	1	9	13	23
21	Lokmon Pangkal Pinang	1	3	8	12
22	Lokmon Jambi	2	4	15	21
23	Lokmon Bengkulu	0	12	5	17
24	Lokmon Bandar Lampung	6	9	4	19
25	Lokmon Mataram	2	12	13	27
26	Lokmon Balikpapan	1	15	4	20
27	Lokmon Palangkaraya	1	6	12	19
28	Lokmon Banjarmasin	2	7	9	18
29	Lokmon Palu	3	14	6	23
30	Lokmon Ambon	2	5	12	19
31	Lokmon Gorontalo	0	7	5	12
32	Lokmon Ternate	1	6	4	11
33	Lokmon Kendari	1	6	13	20
34	Lokmon Tahuna	0	4	3	7
35	Lokmon Mamuju	1	3	6	10
36	Lokmon Manokwari	1	0	3	4
37	Posmon Sorong	0	3	6	9
Jumlah		93	377	390	860

3.2.3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Guna mendukung kegiatan monitor dan penertiban serta pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja yang ada di Ditjen SDPPI, maka perlu didukung dengan pegawai yang berstatus PPNS. Jumlah PPNS yang ada di Ditjen SDPPI pada semester 2 tahun 2015 adalah 304. Tabel 3.6 menyajikan data PPNS menurut unit kerja pada semester-2 tahun 2015. Jumlah PPNS pada periode tersebut sebanyak 37 orang yang didistribusikan di unit-unit kerja Ditjen SDPPI.

Tabel 3.6. Data PPNS Menurut Unit Kerja Ditjen SDPPI (di Luar UPT Monfrek)
Semester 2 Tahun 2015

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	3
2	Dit. Penataan Sumber Daya	1
3	Dit. Operasi Sumber Daya	9
4	Dit. Pengendalian SDPPI	19
5	Dit. Standardisasi PPI	9
6	BBPPT	7
Jumlah		48

Tabel 3.7 menyajikan data tentang jumlah PPNS UPT Monfrek pada semester 2 tahun 2015. Jumlah PPNS UPT Monfrek pada semester 2 Tahun 2015 berjumlah 256.

Tabel 3.7. Data PPNS UPT Monfrek Semester 2 2015

No	Unit Kerja	2015
1	Balmon Kelas I Jakarta	13
2	Balmon Kelas II Aceh	5
3	Balmon Kelas II Medan	12
4	Balmon Kelas II Pekanbaru	11
5	Balmon Kelas II Batam	6
6	Balmon Kelas II Palembang	9
7	Balmon Kelas II Tangerang	9
8	Balmon Kelas II Bandung	8
9	Balmon Kelas II Yogyakarta	12
10	Balmon Kelas II Semarang	18
11	Balmon Kelas II Surabaya	14
12	Balmon Kelas II Denpasar	9
13	Balmon Kelas II Kupang	10
14	Balmon Kelas II Samarinda	10
15	Balmon Kelas II Pontianak	6
16	Balmon Kelas II Manado	6
17	Balmon Kelas II Makassar	13
18	Balmon Kelas II Jayapura	5
19	Balmon Kelas II Merauke	1
20	Lokmon Padang	5
21	Lokmon Pangkal Pinang	5
22	Lokmon Jambi	4
23	Lokmon Bengkulu	4
24	Lokmon Bandar Lampung	8
25	Lokmon Mataram	10
26	Lokmon Balikpapan	5

No	Unit Kerja	2015
27	Lokmon Palangkaraya	3
28	Lokmon Banjarmasin	5
29	Lokmon Palu	6
30	Lokmon Ambon	7
31	Lokmon Gorontalo	6
32	Lokmon Ternate	4
33	Lokmon Kendari	4
34	Lokmon Tahuna	0
35	Lokmon Mamuju	1
36	Lokmon Manokwari	2
37	Posmon Sorong	4
	Jumlah	256

3.2.4. Pejabat Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio

Pejabat fungsional pengendali spektrum frekuensi radio yaitu pegawai yang memiliki jabatan untuk fungsional pengendali spektrum frekuensi radio dan ditempatkan di UPT Monfrek. Tabel 3.8 menyajikan data jumlah pejabat fungsional pengendali frekuensi radio semester 2 tahun 2015. Pada akhir semester 2 2015, jumlah pejabat fungsional pengendali frekuensi radio ialah berjumlah 266 orang.

Tabel 3.8. Pejabat Fungsional Pengendali Spektrum Frekuensi Radio Semester 2 2015

No	UPT Monfrek	2015
1	Balmon Kelas I Jakarta	13
2	Balmon Kelas II Aceh	5
3	Balmon Kelas II Medan	12

No	UPT Monfrek	2015
4	Balmon Kelas II Pekanbaru	11
5	Balmon Kelas II Batam	6
6	Balmon Kelas II Palembang	9
7	Balmon Kelas II Tangerang	9
8	Balmon Kelas II Bandung	8
9	Balmon Kelas II Yogyakarta	12
10	Balmon Kelas II Semarang	18
11	Balmon Kelas II Surabaya	14
12	Balmon Kelas II Denpasar	9
13	Balmon Kelas II Kupang	10
14	Balmon Kelas II Samarinda	10
15	Balmon Kelas II Pontianak	6
16	Balmon Kelas II Manado	6
17	Balmon Kelas II Makassar	13
18	Balmon Kelas II Jayapura	5
19	Balmon Kelas II Merauke	1
20	Lokmon Padang	6
21	Lokmon Pangkal Pinang	5
22	Lokmon Jambi	5
23	Lokmon Bengkulu	4
24	Lokmon Bandar Lampung	4
25	Lokmon Mataram	8
26	Lokmon Balikpapan	10
27	Lokmon Palangkaraya	5
28	Lokmon Banjarmasin	3
29	Lokmon Palu	5
30	Lokmon Ambon	6
31	Lokmon Gorontalo	7
32	Lokmon Ternate	6
33	Lokmon Kendari	4

No	UPT Monfrek	2015
34	Lokmon Tahuna	4
35	Lokmon Mamuju	0
36	Lokmon Manokwari	1
37	Posmon Sorong	2
Jumlah		266





4

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

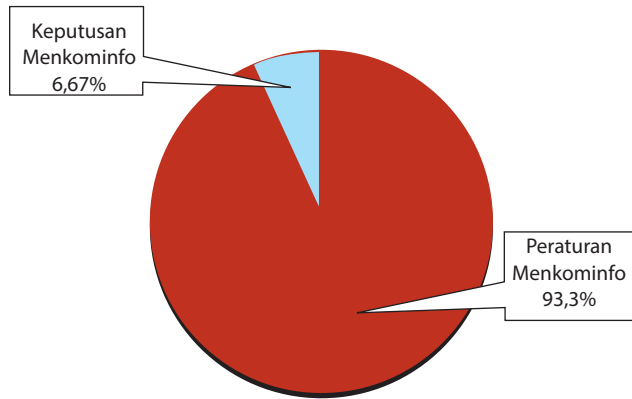
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator selalu dituntut untuk membuat kebijakan dalam rangka peningkatan, efisiensi, produktivitas, dan bahkan peningkatan taraf hidup serta kualitas sumber daya manusia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Ditjen SDPPI pada tahun 2015 telah menerbitkan 15 (lima belas) peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam bentuk Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Untuk Peraturan menteri, pada tahun 2015 terdapat 14 Peraturan Menteri, sedangkan Keputusan Menteri yang diterbitkan pada tahun 2015 hanya berjumlah 1 (satu) keputusan.

4.1. JUMLAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

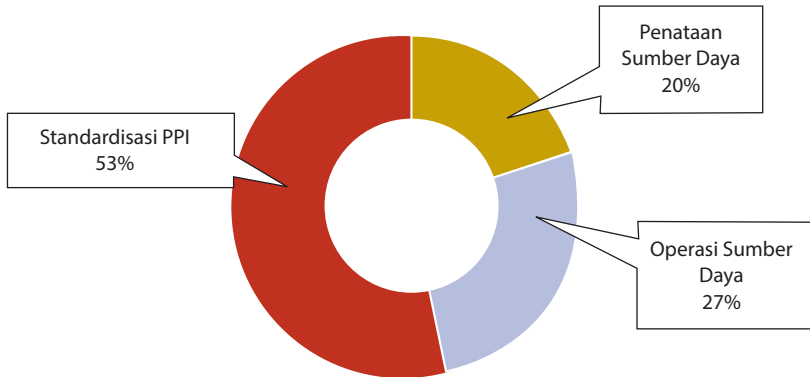
Peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan selama tahun 2015 disajikan pada Tabel 4.1. Komposisi peraturan perundang-undangan Bidang SDPPI untuk tahun 2015 disajikan dalam Gambar 4.1. Selama tahun 2015, proporsi peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri sebanyak 93,33% dan Keputusan Menteri sebanyak 6,67%. Pada Gambar 4.2 disajikan komposisi peraturan perundang-undangan bidang SDPPI menurut bidang kerja pada tahun 2015.

Tabel 4.1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Bidang SDPPI Tahun 2015

Jenis Peraturan	Penataan Sumber Daya	Operasi Sumber Daya	Standardisasi PPI	Jumlah	%
Peraturan Menkominfo	3	3	8	14	93,33
Keputusan Menkominfo	0	1	0	1	6,67
Jumlah	3	4	8	15	100



Gambar 4.1. Komposisi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang SDPPI Tahun 2015



Gambar 4.2. Komposisi Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDPPI Menurut Bidang Kerja Tahun 2015

4.2. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selama tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 14 (empat belas) Peraturan Menteri terkait dengan SDPPI, sebagaimana tercantum pada Tabel 4.2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) yang diterbitkan selama 2015 terdiri dari 3 (tiga) Permen Kominfo terkait bidang penataan sumber daya, 8 (delapan) Permen Kominfo terkait bidang standardisasi PPI, dan 4 (empat) Permen Kominfo terkait bidang operasi sumber daya.

Tabel 4.2. Peraturan Menteri Kominfo yang Diterbitkan pada Tahun 2015

Jenis Peraturan	Peraturan	Bidang
PERATURAN MENTERI	1 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.	Standardisasi PPI
	2 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio.	Operasi Sumber Daya
	3 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.	Operasi Sumber Daya
	4 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.	Operasi Sumber Daya
	5 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi.	Standardisasi PPI
	6 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Perangkat <i>Next Generation-Synchronous Digital Hierarchy</i> .	Standardisasi PPI
	7 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (<i>Contactless Smart Card Reader</i>).	Standardisasi PPI

8	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350 - 438 MHz.	Penataan Sumber Daya
9	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.	Penataan Sumber Daya
10	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Teknologi <i>Long Term Evolution</i> .	Standardisasi PPI
11	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beroperasi Pada Pita Frekuensi 2,4 GHz Dan/Atau 5,8 GHz.	Standardisasi PPI
12	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio Microwave Link Titik ke Titik (<i>Point To Point</i>)	Penataan Sumber Daya
13	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link Titik ke Titik Dengan Sistem Digital Hybrid	Standardisasi PPI
14	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat	Standardisasi PPI

4.3. KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selama tahun 2015 telah diterbitkan 1 (satu) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kepmen Kominfo) yaitu Keputusan Menteri Nomor 45 tahun 2015 tentang Penetapan Bank Indonesia Rate Untuk Perhitungan Biaya Hak Pengguna Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2015. Keputusan Menteri ini merupakan salah satu peraturan untuk bidang Operasi Sumber Daya.

4.4. RANGKUMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG SDPPI YANG TELAH DITERBITKAN

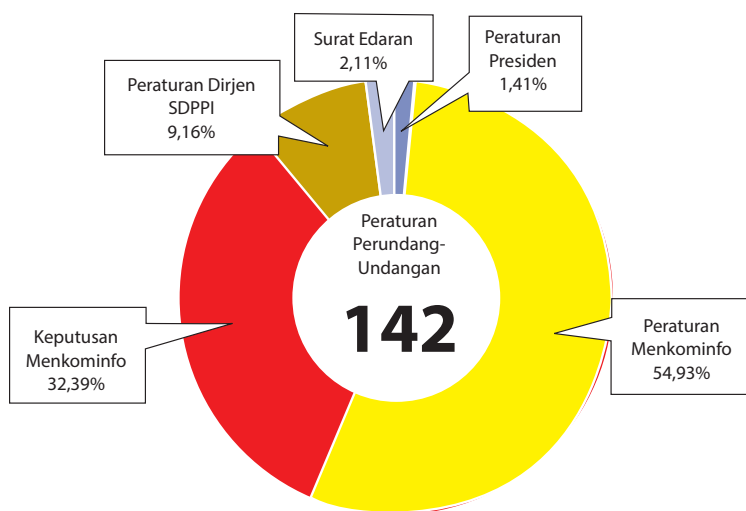
Secara keseluruhan, sejak dibentuknya Ditjen SDPPI pada tahun 2011 sampai

dengan tahun 2015, telah dikeluarkan 142 peraturan perundang-undangan dengan perincian seperti yang disajikan pada Tabel 4.4. Komposisi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sejak dibentuknya Ditjen SDPPI disajikan pada Gambar 4.3.

Tabel 4.4. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Menurut Bidang SDPPI Periode 2011 s.d. Tahun 2015

No	Jenis Peraturan	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah	%
1	Peraturan Presiden	-	1	-	1	-	2	1,41%
2	Peraturan Menkominfo	7	26	14	17	14	78	54,93%
3	Keputusan Menkominfo	12	14	17	2	1	46	32,39%
4	Peraturan Dirjen SDPPI*	13	-	-	-	-	13	9,16%
5	Surat Edaran	-	-	3	-	-	3	2,11%
	Jumlah	32	41	34	20	15	142	100,00%

*) Peraturan Dirjen SDPPI tidak dimasukkan sejak Tahun 2012



Gambar 4.3. Komposisi Peraturan Perundang-Undangan yang Diterbitkan Sejak Dibentuknya Ditjen SDPPI





5

BIDANG PENATAAN
SUMBER DAYA

Sumber daya alam jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi pengelolaannya. Begitu juga dengan sumber daya spektrum frekuensi radio, sebagai sumber daya yang terbatas namun bersifat strategis jika pengelolaannya dilakukan dengan baik akan berdampak besar terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara, termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang efektif, efisien dan tertib penggunaannya khususnya pada bidang *Information and Communication Technology* (ICT). Perkembangan suatu negara di bidang ICT termasuk Indonesia sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi yang baik. Tujuan pengelolaan sumber daya ini agar pemanfaatannya lebih tepat guna, tidak tumpang tindih dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang lebih baik sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor telekomunikasi.

Selain pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio, pemanfaatan sumber daya orbit satelit juga harus ditata sedemikian rupa agar terjadi keteraturan pengelolaan orbit satelit. Satelit memiliki beberapa keuntungan yang tidak dapat digantikan seperti memiliki cakupan wilayah layanan yang luas sehingga dapat dikolaborasikan dengan sistem komunikasi radio. Salah satu contoh pemanfaatannya yaitu ketika terjadi bencana dan sistem telekomunikasi di bumi lumpuh, maka dapat didukung oleh satelit.

Pada bab ini akan ditampilkan data statistik Penataan Sumber Daya yang meliputi nilai BHP pita frekuensi, pengelolaan orbit satelit, dan notifikasi radio ke *International Telecommunication Union* (ITU).

5.1.PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas (*limited*)

natural resources) sebagaimana tercantum didalam konstitusi dari ITU Bab VII, Pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *"In using frequency bands for radio services, Member States shall bear in mind that radio frequencies and any associated orbits, including the geo stationary-satellite orbit, are limited natural resources and that they must be used rationally, efficiently and economically, in conformity with the provisions of the Radio Regulations, so that countries or groups of countries may have equitable access to those orbits and frequencies, taking into account the special needs of the developing countries and the geographical situation of particular countries"*.

Spektrum frekuensi radio memiliki sifat dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah geografis. Oleh sebab itu penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu.

5.2. NILAI BHP PITA FREKUENSI SELULAR, 3G, DAN BWA

Setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio yang dibayar di muka untuk masa penggunaan satu tahun. Seluruh penerimaan BHP frekuensi radio tersebut disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tabel 5.1 menyajikan jumlah total besaran tagihan BHP pita pada semester-2 tahun 2015. Data yang menunjukkan akumulasi penerimaan BHP frekuensi tahun 2013 sampai dengan semester-2 2015 disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1. Perhitungan Besaran Tagihan BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) Tahun 2015

Items	Up Front Fee (Milyar Rp.)	Annual Fee (Milyar Rp.)	%
2G	---	7.463,5	81,36
3G	---	---	
First Carrier	---	---	
Second Carrier	---	1.365,9	14,89
Third Carrier	---	---	
BWA 2,3 GHz	---	343,7	3,75
Total		9.173	100,00

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa total selama Semester-2 Tahun 2015, penerimaan BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) adalah Rp. 9.173 Milyar. Data yang menunjukkan akumulasi penerimaan BHP frekuensi Semester-1 dan 2 Tahun 2013 hingga Tahun 2015 disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2. Akumulasi Penerimaan BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) Tahun 2013 s.d. Semester-2 Tahun 2015

Items	Up Front Fee (Milyar Rp.)					Annual Fee (Milyar Rp.)					
	2013		2014		2015	2013		2014		2015	
	Sem-1	Sem-2	Sem-1	Sem-2	Sem-1	Sem-1	Sem-2	Sem-1	Sem-2	Sem-1	Sem-2
2G	—	—	—	—	—	—	5.693,6	1.879,6	6.839,4	—	7.463,5
3G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
First Carrier	—	—	—	—	—	1.764,2	—	—	1.737,7	1.615,7	—
Second Carrier	—	—	—	—	—	—	881,9	—	1.252,3	—	1.364,9
Third Carrier	1.026,4	—	—	1.026,4	—	102,6	—	218,7	—	176,2	—
BWA 2.3 GHz	—	—	—	—	—	—	343,7	—	342,9	—	343,7
Total	1.026,4	—	—	1.026,4	—	1.886,8	6.919,2	2.098,3	10.172,3	1.791,9	9.173

Pada Tabel 5.2 Terlihat bahwa penerimaan BHP izin Pita Frekuensi Radio Tahun 2015 menurun dibandingkan sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Pada Semester-2 Tahun 2015 penerimaan BHP izin Pita Frekuensi Radio sebesar Rp. 9.173, menurun 9.82% dibanding Semester-2 Tahun 2014.

5.3. PENGELOLAAN ORBIT SATELIT

Pada Sub bab ini akan akan ditampilkan data terkait 2 (dua) hal pengelolaan orbit satelit yang meliputi (i) Pemeliharaan *filing* satelit Indonesia, (ii) Penerbitan hak labuh satelit.

5.3.1. Pemeliharaan *Filing* Satelit Indonesia

Guna menjaga *filing* satelit Indonesia agar tidak terganggu oleh adanya *filing* baru yang didaftarkan oleh negara lain, Ditjen SDPPI harus memberikan tanggapan atas publikasi *filing* satelit yang dikeluarkan ITU pada waktunya. Tanggapan ini diberikan dalam rangka proteksi terhadap jaringan satelit dan terestrial nasional dari potensi interferensi yang dapat ditimbulkan oleh jaringan satelit asing. Kegagalan maupun keterlambatan memberikan tanggapan kepada ITU pada waktunya, dapat mengakibatkan berkurangnya/terganggunya spesifikasi *filing* satelit Indonesia. Tenggat waktu yang tersedia untuk memberikan tanggapan adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal publikasi *filing* satelit asing tersebut dalam BRIFIC ITU. Publikasi BRIFIC ITU tersebut diterbitkan ITU setiap 2 minggu sekali. Publikasi BRIFIC ITU berisi data-data jaringan satelit baru yang didaftarkan oleh semua Negara ke ITU serta data-data proses pengelolaan *filing* satelit di ITU. Sepanjang tahun 2015, Ditjen SDPPI telah memberikan tanggapan terhadap 24 publikasi BRIFIC ITU yaitu publikasi BRIFIC 2782 sampai dengan BRIFIC 2805. Ada pun tanggapan untuk setiap publikasi ITU tersaji pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Tanggapan terhadap Publikasi BRIFIC 2782-2805

No.	No. BRIF-IC	Tanggal Pub-likasi	Jumlah Filing Satelit	Tanggapan Indonesia								Total
				API /A	CR/C	AP30	AP30A	AP30-30A	AP30B /A6A	PART I-S	PART II-S	
1	2782	11 Nov'14	197	8	2	0	0	0	0	0	0	10
2	2783	25 Nov'14	180	4	2	2	1	0	0	0	0	9
3	2784	9 Des'14	158	1	0	1	0	0	0	0	4	6
4	2785	6 Jan'15	126	1	6	0	0	0	0	0	0	7
5	2786	20 Jan'15	117	3	2	0	0	0	0	0	0	5
6	2787	3 Feb'15	131	15	2	0	0	0	0	1	0	18
7	2788	17 Feb	2343	18	7	0	0	0	0	0	0	25
8	2789	3 Mar	202	22	1	0	0	0	0	0	0	23
9	2790	17 Mar	271	38	0	1	0	0	0	0	0	39

10	2791	31 Mar	300	5	1	0	0	0	0	0	0	6
11	2792	14 Apr	275	4	11	0	0	0	0	0	0	15
12	2793	28 Apr	84	5	2	0	0	0	0	0	0	7
13	2794	12 Mei	118	6	9	3	1	0	1	0	0	20
14	2795	26 Mei	134	3	0	0	0	1	2	0	0	6
15	2796	9 Jun	165	3	1	0	0	0	1	0	0	5
16	2797	23 Jun	100	5	3	0	0	0	1	0	0	9
17	2798	7 Jul	345	39	4	0	0	0	0	0	0	43
18	2799	21 Jul	260	40	2	0	0	0	0	0	0	42
19	2800	4 Agt	334	44	6	0	0	0	0	0	0	50
20	2801	18 Agt	173	25	2	0	0	0	0	0	0	27
21	2802	1 Sep	128	4	3	1	0	0	0	0	0	8
22	2803	15 Sep	183	30	4	0	0	0	0	0	0	34
23	2804	29 Sep	152	7	4	0	0	0	0	0	0	11
24	2805	13 Okt	262	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Total			6738	331	75	8	2	1	5	1	4	427

Sepanjang tahun 2015, Ditjen SDPPI telah memberikan tanggapan terhadap 24 publikasi BRIFIC ITU yaitu publikasi BRIFIC 2782 sampai dengan BRIFIC 2805. Adapun jumlah analisa filing BRIFIC yang dianalisa sepanjang tahun 2015 bervariasi mulai dari 84 filing (BRIFIC 2793) sampai dengan 2343 filing (BRIFIC 2788). Dari total 6738 filing yang diterbitkan sepanjang tahun 2015 terdapat 427 tanggapan yang dilakukan berdasarkan hasil analisa. Tanggapan berdasarkan analisa paling sedikit terhadap BRIFIC 2805 yaitu sebanyak 2 tanggapan sedangkan paling banyak terhadap BRIFIC 2800 yaitu sebanyak 50 tanggapan.

Jenis tanggapan yang dilakukan dalam analisa BRIFIC dikelompokkan ke dalam 8 kategori sebagai berikut:

1. API/A adalah status awal pendaftaran filing satelit yang telah dipublikasikan oleh ITU;
2. CR/C adalah status filing satelit dalam tahap koordinasi dengan Administrasi negara lain, status koordinasi ini bisa menjadi CR/D atau CR/E;
3. PART I-S adalah status filing pada saat permohonan pencatatan filing satelit dalam *database* ITU (*Master International Frequency Register/MIFR*);

4. AP30/E adalah analisa terhadap filing *plan band* yang mengacu pada ketentuan penggunaan filing satelit yang dijatahkan kepada suatu Administrasi untuk keperluan dinas siaran satelit sesuai dengan *Appendix 30 Radio Regulations (BSS Plan Band)*;
5. AP30A/E adalah analisa terhadap filing *plan band* yang mengacu pada ketentuan penggunaan filing satelit yang dijatahkan kepada suatu Administrasi untuk keperluan tautan pencatu (*feeder link*) untuk dinas siaran satelit sesuai dengan *Appendix 30A Radio Regulations (feeder Link untuk BSS Plan Band)*;
6. AP30-30A/E adalah gabungan AP30/E dan AP30A/E;
7. PART II-S adalah status filing satelit ketika telah dicatat dalam *database* ITU (MIFR); dan
8. AP30B/A6A adalah analisa terhadap filing *plan band* yang mengacu pada ketentuan penggunaan filing satelit yang dijatahkan kepada suatu Administrasi untuk keperluan dinas tetap satelit sesuai dengan *Appendix 30B Radio Regulations (FSS Plan Band)*.

Pada Tahun 2015 tercatat ada 37 (tiga puluh tujuh) administrasi pemilik filing satelit yang berpotensi mengganggu jaringan satelit Indonesia. Apabila dipetakan seberapa sering negara-negara dimaksud berpotensi mengganggu jaringan satelit Indonesia dalam setiap BRIFIC yang terbit sepanjang tahun 2015 dapat dilihat di Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4. Negara dan Jumlah Publikasi *Filing* Satelitnya dalam BRIFIC 2782-2805 Tahun 2015

No.	Negara	Jumlah Publikasi	No.	Negara	Jumlah Publikasi	No.	Negara	Jumlah Publikasi
1.	Algeria	1	16.	Kazakhstan	2	31.	Spanyol	5
2.	Aljazair	1	17.	Korea Selatan	2	32.	Swedia	5
3.	Amerika Serikat	12	18.	Liechtenstein	2	33.	Thailand	2
4.	Arab Saudi	3	19.	Lithuania	1	34.	Tiongkok	28

5.	Australia	2	20.	Luksemburg	4	35.	Turki	5
6.	Azerbaijan	1	21.	Malaysia	1	36.	Uni Emirat Arab	47
7.	Belanda	10	22.	Mesir	1	37.	Vietnam	18
8.	Brazil	1	23.	Mongolia	1			
9.	Ceko	1	24.	Norwegia	12			
10.	Filipina	1	25.	Papua Nugini	8			
11.	India	9	26.	Perancis	97			
12.	Inggris	24	27.	Qatar	32			
13.	Israel	28	28.	Rusia	5			
14.	Jepang	38	29.	Siprus	13			
15.	Kanada	3	30.	Slovakia	1			

Dari Tabel 5.4 diketahui negara yang paling berpotensi mengganggu jaringan satelit Indonesia sejumlah 97 potensi gangguan jaringan satelit oleh negara Perancis, kemudian negara Uni Emirat Arab dengan jumlah 47 potensi gangguan jaringan satelit.

5.3.2. Penerbitan Hak Labuh Satelit

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit, pengguna satelit asing di wilayah Indonesia wajib memiliki Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit. Hak Labuh Satelit adalah hak untuk menggunakan satelit asing yang diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau lembaga penyiaran. Pada tahun 2015, Ditjen SDPPI telah menerbitkan Hak Labuh Satelit kepada 31 penyelenggara telekomunikasi/lembaga penyiaran seperti tampak dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Daftar Pengguna Satelit Asing Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Nama Satelit Asing	Administrasi
1	PT Tepian Multimedia	APSTAR-7	Tiongkok
2	PT SaluranBintangCemelangTelevisiJatim	1. ASIASAT-5	Tiongkok
		2. CHINASAT 10	Tiongkok
		3. MEASAT-3	Malaysia
3	PT Citra Prima Media	1. ASIASAT-5	Tiongkok
		2. APSTAR-7	Tiongkok
		3. MEASAT-3A	Malaysia
		4. MEASAT-3	Malaysia
4	PT SriwijayaMitra Media	1. APSTAR-7	Tiongkok
		2. APSTAR-5	Tonga
		3. MEASAT-3A	Malaysia
		4. INTELSAT-19	USA
5	PT Bintang Multimedia	1. APSTAR-7	Tiongkok
		2. CHINASAT 10	Tiongkok
		3. JCSAT-4B/JCSAT-13/ LIPPOSATR-1	Jepang
		4. APSTAR-VI	Tonga
		5. MEASAT-3	Malaysia
6	PT Mitra Java Multimedia	1. INTELSAT-17	USA
		2. MEASAT-3A	Malaysia
		3. NSS-6	Belanda
7	PT. Indonusa Telemedia	MEASAT-3A	Malaysia
8	PT. Rizky Aneka Bersaudara	1. ASIASAT-4	Tiongkok
		2. ASIASAT 5	Tiongkok
		3. MEASAT-3A	Malaysia
		4. CHINASAT-10	Tiongkok
9	PT. Maulana Mitra Media	1. ASIASAT 5	Tiongkok
		2. MEASAT-3A	Malaysia
		3. ST-2	Singapura

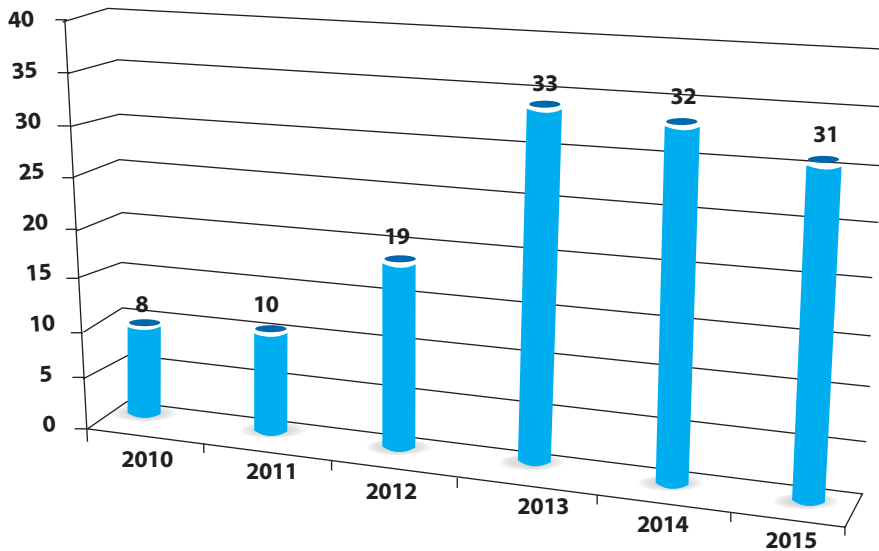
10	PT. Netciti Televisi Persada	ASIASAT 5	Tiongkok
11	PT. Inti Jaya Global	ASIASAT 5	Tiongkok
12	PT. Digdaya Duta Digital	1. APSTAR-7	Tiongkok
		2. MEASAT-3A	Malaysia
13	PT. Malang Multimedia Mandiri	1. ASIASAT 5	Tiongkok
		2. MEASAT-3A	Malaysia
14	PT. Surya Kabel TV	1. ASIASAT 5	Tiongkok
		2. MEASAT-3A	Malaysia
15	PT. Pesona Visual Mandiri	1. ASIASAT 4	Tiongkok
		2. ASIASAT 5	Tiongkok
		3. CHINASAT-10	Tiongkok
		4. INTELSAT 20	USA
16	PT. Andalas Mitramedia	1. ASIASAT 4	Tiongkok
		2. ST-2	Singapura
		3. INTELSAT 20	USA
17	PT. Panam Mitra Media	1. ASIASAT 5	Tiongkok
		2. MEASAT-3A	Malaysia
		3. ST-2	Singapura
		4. INTELSAT 20	USA
18	PT. Mitra Java Multimedia	1. INTELSAT 20	USA
		2. ASIASAT 5	Tiongkok
		3. APSTAR-6	Tonga
		4. ASIASAT 4	Tiongkok
19	PT. Mitra Mataram Multimedia	ASIASAT 5	Tiongkok
20	PT. Irama Mitra Media	ASIASAT 5	Tiongkok
21	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	1. ABS-2	Rusia
		2. ASIASAT-4	Tiongkok
		3. CHINASAT-11	Tiongkok
22	PT. Patra Telekomunikasi Indonesia	MEASAT-3B	Malaysia
23	PT. Karunia Sinergi	ABS-2	Rusia
24	PT. Pasifik Satelit Nusantara	INMARSAT-4 F1	Inggris

25	PT. Bengkulu Multimedia	1. ASIASAT-4	Tiongkok
		2. ASIASAT 5	Tiongkok
		3. CHINASAT-10	Tiongkok
		4. MEASAT-3B	Malaysia
26	PT. Jasnikom Gemanusa	CHINASAT-10	Tiongkok
27	PT. Multimedia Nusantara	KOREASAT-8	Rusia
28	PT. Megasatcom	ASIASAT 4	Tiongkok
29	PT. AJN Solusindo	ABS-2	Rusia
30	PT. Sarana Mukti Adijaya	INMARSAT-4 F1	Inggris
31	PT. Aplikanusa Lintasarta	INTELSAT 22 (IS-22)	USA

Tabel 5.6 dan Gambar 5.1 menunjukkan perkembangan permohonan hak labuh satelit sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, tampak bahwa setiap tahunnya permohonan hak labuh satelit berfluktuasi tergantung pada permohonan Hak Labuh yang telah memenuhi persyaratan.

Tabel 5.6. Perkembangan Permohonan Hak Labuh Satelit Per-Semester Sejak Tahun 2010 s.d. Tahun 2015

Tahun	Permohonan Hak Labuh Satelit		
	Semester-1	Semester-2	Jumlah
2010	4	4	8
2011	7	3	10
2012	10	9	19
2013	12	21	33
2014	12	20	32
2015	15	16	31



Gambar 5.1. Jumlah Pemohonan Hak Labuh Satelit Tahun 2010 s.d. 2015

5.4. NOTIFIKASI STASIUN RADIO

Tujuan notifikasi stasiun radio agar penggunaan alokasi frekuensi di Indonesia mendapatkan pengakuan internasional dan perlindungan apabila terjadi interferensi. Fokus tahun 2015, sesuai program Nawacita yaitu stasiun radio dinas maritim. Selain notifikasi stasiun radio dinas maritim, terdapat notifikasi stasiun radio dinas satelit dan notifikasi stasiun radio dinas terrestrial. Stasiun radio dinas satelit Indonesia yang sudah dinotifikasi ke ITU tahun 2015 disajikan pada Tabel 5.7, sedangkan notifikasi stasiun radio terrestrial dinas disajikan pada Tabel 5.8 dan notifikasi stasiun radio dinas maritim disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.7. Stasiun Radio Dinas Satelit Indonesia yang Sudah Dinotifikasi ke ITU
Tahun 2015

No	Nama Filing	Tanggal Pendaftaran	Status Pendaftaran
1	GARUDA-2	16-Apr-2015	suspensi
2	PALAPA PAC-C 146E	9-Feb-2015	RES-49 for Bringing back into use
3	PALAPA PAC-KU 146E	9-Feb-2015	RES-49 for Bringing back into use
4	PALAPA-C3-K	23-Jun-2015	RES-49 and confirmation for Bringing back into use
5	PALAPA-B3-EC	23-Jun-2015	RES-49 and confirmation for Bringing back into use
6	LAPAN TUBSAT	2-Jul-2015	RES-4 for extend validity period
7	INDOSTAR-110E	24-Feb-2015	Notifikasi
8	PALAPA-C4-A	25-May-2015	Notifikasi
9	INDOSTAR-110E-K	24-Feb-2015	Confirmation for bringing into use
10	INDOSTAR-110E-K	21-Jan-2015	Notifikasi
11	PALAPA PACIFIC-144E	20-May-2015	CR/C
12	PALAPA PAC-C 146E	10-Apr-2015	Confirmation for bringing back into use
13	PALAPA PAC-KU 146E	10-Apr-2015	Confirmation for bringing back into use

Tabel 5.8. Stasiun Radio Dinas Terestrial Indonesia yang Sudah Dinotifikasi ke ITU Tahun 2015

Dinas	Hingga 2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dinas Tetap dan Bergerak (stasiun)	11.691	11.692	11.736	15.442	20.312	20.312
Dinas Penyiaran (FM / TV) (stasiun)	235	235	235	286	331	356
Dinas Penyiaran (HFBC) (schedule)	50	50	51	54	51	53

Tabel 5.9. Stasiun Radio Dinas Maritim Indonesia yang Sudah Dinotifikasi ke ITU Tahun 2015

Stasiun Radio Dinas Maritim	Jumlah
Coast Station (List IV)	224
Ship station (List V)	200
SAR Aircraft	0
AIS Aids to Navigation (AtoN)	0
Accounting Authorities	25





6

BIDANG OPERASI SUMBER DAYA

Statistik bidang operasi sumber daya menunjukkan kondisi terkini penggunaan izin spektrum frekuensi radio oleh berbagai pihak untuk berbagai kebutuhan yang merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi, terutama untuk kegiatan telekomunikasi. Pengelolaan penggunaan spektrum frekuensi juga terkait dengan sebaran antar daerah dan tingkat kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang telah dimanfaatkan, khususnya beberapa jenis spektrum frekuensi yang dimanfaatkan oleh publik. Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah monitor dan pengendalian penggunaan frekuensi oleh *stakeholder* yang harus sesuai dengan jenis *band* frekuensi dan peruntukannya. Pemerintah sebagai regulator dalam hal pengelolaan dan penggunaan *band* frekuensi, juga terkait dengan seleksi terhadap operator pengguna frekuensi. Selain penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin stasiun radio dan izin penggunaan *band* frekuensi, juga terdapat tiga jenis sertifikasi yang terkait penggunaan frekuensi oleh perorangan, yaitu Izin Amatir Radio (IAR), Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Sertifikat Komunikasi Amatir Radio (SKAR).

Selain melalui mekanisme izin/sertifikat, pengendalian untuk menjamin penggunaan frekuensi secara benar dan bijak dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) operator radio oleh Lembaga Diklat REOR dan SKOR, serta Ujian Negara REOR dan SKOR oleh Panitia Ujian Negara REOR dan SKOR. Diklat dan Ujian Negara SKOR diwajibkan terhadap calon operator radio pengguna frekuensi pada komunikasi radio layanan dinas tetap dan bergerak darat (*Fixed and Land Mobile*). Diklat dan Ujian Negara REOR diwajibkan terhadap calon operator radio pengguna frekuensi pada komunikasi radio layanan dinas Maritim (*Fixed and Mobile Maritime Services*). Melalui instrumen Izin, Sertifikasi, Diklat dan Ujian Negara REOR dan SKOR bagi pengguna frekuensi radio khususnya untuk spektrum frekuensi radio

diharapkan tidak saling merugikan antar pengguna dan mendukung penataan frekuensi yang dilakukan.

Empat cakupan bahasan dalam bidang operasi sumber daya adalah:

- (i) Pengelolaan sumber daya frekuensi;
- (ii) Penggunaan frekuensi (Izin Stasiun Radio/ISR);
- (iii) Sertifikasi kompetensi operator radio;
- (iv) Layanan *contact center*.

6.1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA FREKUENSI

Data statistik bidang operasi sumber daya yang disajikan dalam buku ini meliputi jumlah penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan *band* frekuensi, jumlah penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan jenis penetapan frekuensi, dan jumlah penggunaan frekuensi berdasarkan peruntukannya. Keseluruhan data tersebut juga dipetakan penggunaannya menurut provinsi.

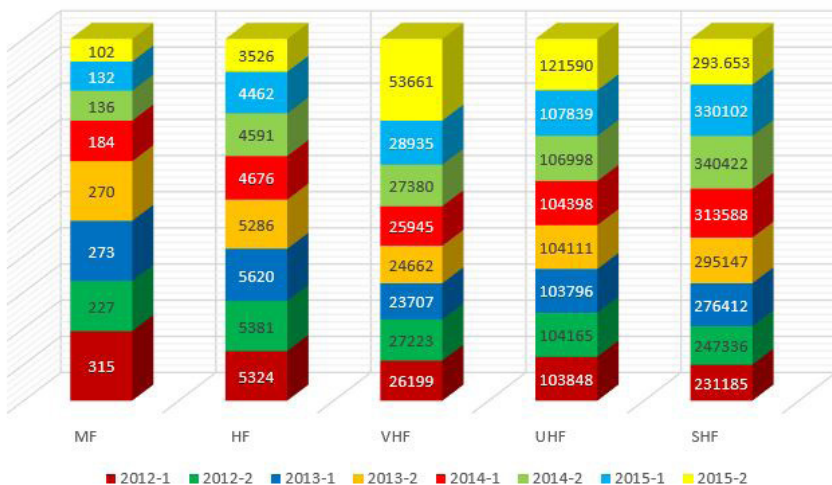
6.2. PENGGUNAAN FREKUENSI (IZIN STASIUN RADIO/ ISR)

Alokasi *band* frekuensi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam industri telekomunikasi, karena *band* frekuensi merupakan sumber daya utama yang harus tersedia. *Band* frekuensi di Indonesia dibagi menjadi MF, HF, VHF, UHF, dan SHF. Tabel 6.1 dan Gambar 6.1 menyajikan jumlah pengguna *band* frekuensi dan persentase distribusi pengguna frekuensi berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) di Indonesia.

Tabel 6.1. Jumlah Pengguna Frekuensi (ISR) berdasarkan *Band* Frekuensi pada Tahun 2012 s.d. Tahun 2015

No.	Band Frekuensi	2012 Sem-1	2012 Sem-2	2013 Sem-1	2013 Sem-2	2014 Sem-1	2014 Sem-2	2015 Sem-1	2015 Sem-2
1	MF	315	227	273	270	184	136	132	102
	(300 KHz - 3 MHz)								
2	HF	5.324	5.381	5.620	5.286	4.676	4.591	4.462	3.526
	(3 MHz - 30 MHz)								
3	VHF	26.199	27.223	23.707	24.662	25.945	27.380	28.935	53.661
	(30 MHz - 300 MHz)								
4	UHF	103.848	104.165	103.796	104.111	104.398	106.998	107.839	121.590
	(300 MHz - 3 GHz)								
5	SHF	231.185	247.336	276.412	295.147	313.588	340.422	330.102	293.653
	(3 GHz - 30 GHz)								
Jumlah		366.871	384.332	409.808	429.476	448.791	479.527	471.470	472.532

Data VLF (*Very Low Frequency*) dan LF (*Low Frequency*) tidak dapat dimunculkan karena penggunaan frekuensi rendah (kurang dari 300 KHz) menyangkut penggunaan untuk keperluan khusus seperti untuk keperluan militer dan tidak banyak *bandwidth* yang pada *band* ini dalam spektrum radio.



Gambar 6.1. Jumlah Pengguna Frekuensi Berdasarkan *Band* Frekuensi di Indonesia Tahun 2012 s.d. 2015

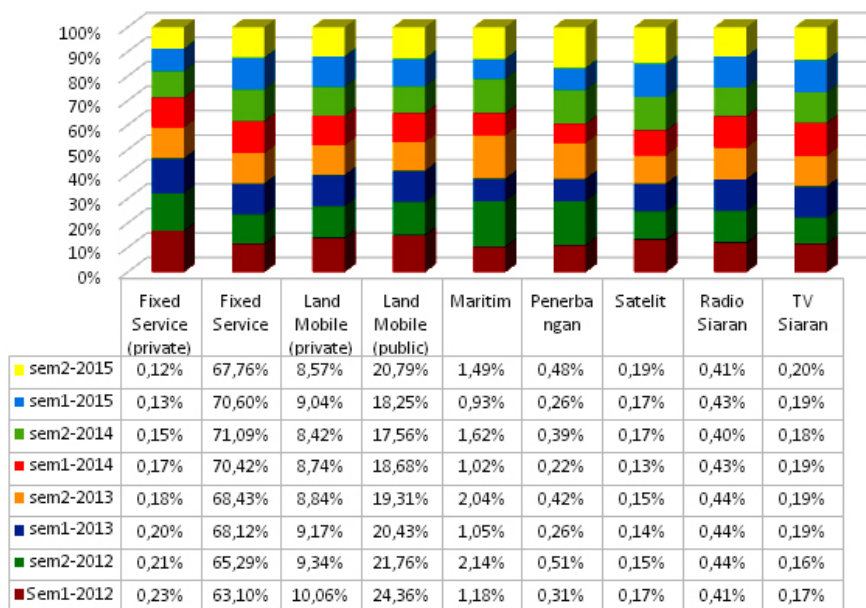
6.2.1. Pengguna Kanal Frekuensi Berdasarkan Dinas/Service

Kanal frekuensi dapat dibagi berdasarkan dinas / service dalam penggunaannya, seperti *fixed service (private)*, *fixed service (public)*, *land mobile (private)*, *land mobile (public)*, maritim, penerbangan, satelit, radio siaran, dan TV siaran. Perkembangan jumlah pengguna kanal menurut service disajikan pada Tabel 6.2. Persentase pengguna dari Sembilan kategori pengguna kanal frekuensi menurut service pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada Gambar 6.2.

Sembilan kategori pengguna kanal frekuensi menurut service dapat disederhanakan menjadi 7 (tujuh) kategori service dengan 19 (sembilan belas) sub-service. Pengguna kanal frekuensi dari ketujuh kategori service ini disajikan pada Tabel 6.3. Persentase pengguna kanal frekuensi menurut service berdasarkan 7 (tujuh) kategori service dengan 19 (Sembilan belas) sub-service disajikan pada Gambar 6.3.

Tabel 6.2. Jumlah Pengguna Kanal Frekuensi menurut Service Pada Tahun 2012 s.d. Tahun 2015

No.	Jenis Service	2012 Sem-1	2012 Sem-2	2013 Sem-1	2013 Sem-2	2014 Sem-1	2014 Sem-2	2015 Sem-1	2015 Sem-2
1	<i>Fixed Service (private)</i>	812	834	828	785	764	750	608	597
2	<i>Fixed Service</i>	220.651	258.056	287.721	305.885	325.033	356.982	341.302	333.522
3	<i>Land Mobile (private)</i>	35.172	36.906	38.738	39.500	40.349	42.303	43.702	42.195
4	<i>Land Mobile (public)</i>	85.173	86.021	86.283	86.333	86.212	88.194	88.230	102.321
5	Maritim	4.129	8.464	4.428	9.140	4.686	8.139	4.478	7.334
6	Penerbangan	1.096	2.022	1.104	1.889	1.010	1.982	1.246	2.340
7	Satelit	592	575	605	660	590	874	838	925
8	Radio Siaran	1.439	1.751	1.853	1.986	2.006	2.018	2.078	2.012
9	TV Siaran	593	623	783	829	896	925	937	965
	Jumlah	349.657	395.252	422.343	447.007	461.546	502.167	483.419	492.211

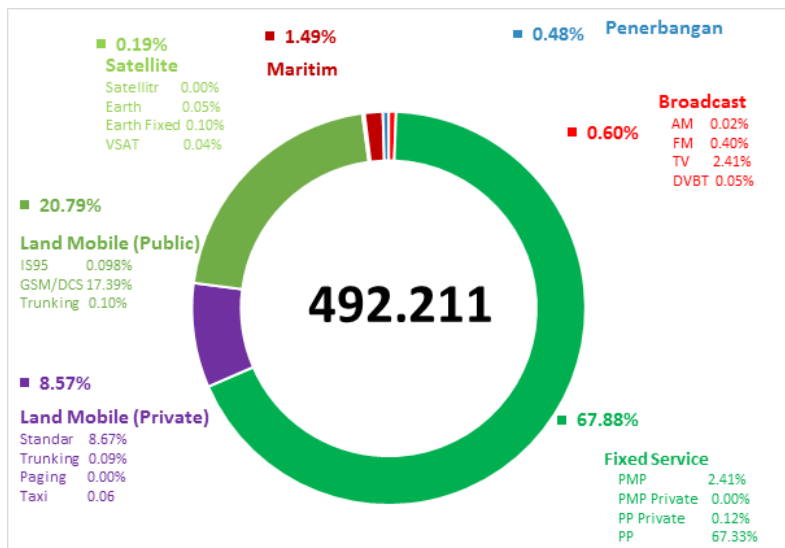


Gambar 6.2. Persentase Jumlah Pengguna Kanal Frekuensi Menurut *Service* Tahun 2012 s.d. 2015

Tabel 6.3. Jumlah Pengguna Kanal Frekuensi Berdasarkan *Service* dan Sub-service dari Tahun 2012 s.d. 2015

Service	Sub-Service	2012	2013	2014	2015
Broadcast	AM	298	265	182	86
	FM	1.453	1.721	1.824	1.926
	TV	614	684	719	720
	DVBT	9	145	177	245
Fixed Service	PMP	12.211	12.040	12.012	11.543
	PMP Private	5	1	1	-
	PP Private	829	784	763	597
	PP	245.845	293.609	313.021	321.979

Land Mobile (Private)	Paging	9	10	9	11
	Taxi	354	319	319	272
	Trunking	495	477	467	454
	Standar	36.048	38.656	39.554	41.458
Land Mobile (Public)	IS95	2.947	2.952	2.826	37
	GSM/DCS	82.879	83.029	83.054	101.784
	Trunking	195	304	332	500
Satellite	Satellite	3	3	3	1
	Earth	12	21	12	223
	Earth Fixed	195	251	291	499
	VSAT	365	384	284	202
Maritim		4.129	4.428	4.682	7.334
Penerbangan		1.096	1.104	1.010	2.340
Jumlah		389.991	441.187	461.542	492.211



Gambar 6.3. Persentase Jumlah Pengguna Kanal Frekuensi Berdasarkan Service dan Sub-Service Tahun 2015

6.2.2. Pengguna Band Frekuensi Menurut Provinsi

Pengguna band frekuensi pada tahun 2015 tersebar secara merata di 34 provinsi di Indonesia. Data jumlah pengguna kanal frekuensi ISR berdasarkan provinsi pada tahun 2015 disajikan pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4. Jumlah Pengguna Frekuensi (ISR) berdasarkan Band Frekuensi per- Provinsi Tahun 2015

No	Provinsi	MF	HF	SHF	UHF	VHF	Total	%
1	Aceh	2	58	7.813	2.449	1.155	11.477	2,43%
2	Bali	3	50	8.225	4.022	1.028	13.328	2,82%
3	Banten	2	23	13.701	9.333	357	23.416	4,96%
4	Bengkulu	0	32	2.306	491	223	3.052	0,65%
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	0	4	5.117	2.524	739	8.384	1,77%
6	Dki Jakarta	6	135	20.930	15.221	871	37.163	7,86%
7	Gorontalo	0	34	1.358	51	197	1.640	0,35%
8	Jambi	2	61	5.494	1.354	707	7.618	1,61%
9	Jawa Barat	19	73	44.162	27.846	1.486	73.586	15,57%
10	Jawa Tengah	14	40	24.705	11.519	1.120	37.398	7,91%
11	Jawa Timur	16	120	28.180	14.364	1.507	44.187	9,35%
12	Kalimantan Barat	5	152	7.198	1.055	778	9.188	1,94%
13	Kalimantan Selatan	2	40	6.666	826	1.983	9.517	2,01%
14	Kalimantan Tengah	4	152	4.601	415	1.080	6.252	1,32%
15	Kalimantan Timur	2	238	8.643	1.935	27.798	38.616	8,17%
16	Kalimantan Utara	1	4	698	76	142	921	0,19%
17	Kepulauan Bangka Belitung	0	26	3.738	622	280	4.666	0,99%
18	Kepulauan Riau	0	33	3.882	2.036	756	6.707	1,42%
19	Lampung	1	20	9.213	2.315	525	12.074	2,56%
20	Maluku	0	253	1.129	420	337	2.139	0,45%
21	Maluku Utara	0	39	672	17	269	997	0,21%
22	Nusa Tenggara Barat	0	61	5.489	2.004	744	8.298	1,76%
23	Nusa Tenggara Timur	1	223	3.095	818	793	4.930	1,04%
24	Papua	2	815	1.529	815	493	3.654	0,77%
25	Papua Barat	0	241	633	181	272	1.327	0,28%
26	Riau	2	94	12.915	4.371	1.177	18.559	3,93%
27	Sulawesi Barat	0	18	628	34	78	758	0,16%
28	Sulawesi Selatan	4	73	12.348	1.782	647	14.854	3,14%
29	Sulawesi Tengah	2	39	3.395	137	481	4.054	0,86%

30	Sulawesi Tenggara	0	32	2.408	100	576	3.116	0,66%
31	Sulawesi Utara	0	55	4.360	647	585	5.647	1.20%
32	Sumatera Barat	2	26	6.631	2.034	482	9.175	1.94%
33	Sumatera Selatan	3	70	12.217	3.269	2.243	17.802	3.77%
34	Sumatera Utara	7	192	19.574	6.507	1.752	28.032	5.93%
	Total	102	3.526	293.653	121.590	53.661	472.532	100

-Data VLF (*Very Low Frequency*) dan LF (*Low Frequency*) tidak dapat dimunculkan karena penggunaan frekuensi rendah (kurang dari 300 KHz) menyangkut penggunaan untuk keperluan khusus seperti untuk keperluan militer dan tidak banyak *bandwidth* yang pada *band* ini dalam spektrum radio.

6.2.3. Pola Penggunaan Band Frekuensi Menurut Wilayah Kepulauan

Pengguna band frekuensi ISR di 34 provinsi, bila dilihat berdasarkan pulau besar, dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu: (1) Sumatera, (2) Jawa, (3) Bali - Nusa Tenggara, (4) Kalimantan, (5) Sulawesi, (6) Maluku-Papua. Pengguna band frekuensi ISR berdasarkan pulau besar juga dapat dikelompokkan berdasarkan lebar band frekuensinya seperti yang disajikan pada Gambar 6.4. Tabel 6.6. menyajikan perbandingan jumlah pengguna band frekuensi ISR pulau besar berdasarkan *band* frekuensi tahun 2012 sampai dengan 2015.



Gambar 6.4. Jumlah dan Persentase Pengguna *Band* Frekuensi ISR Berdasarkan Pulau Besar Tahun 2015

Tabel 6.5. Jumlah Pengguna Band Frekuensi (ISR) Berdasarkan Service dan Sub-service per-Provinsi Tahun 2015

No	Provinsi	Broadcast				Fixed Service				Land Mobile (private)				Land Mobile (public)				Satellite			Total
		AM	FM	DABT	TV	PMP	PMP PH- vote	PMP PH- vote	PP	Port- ing	Trunk- ing	Stand- ard	IS- 95	Trunk- ing	GSM/ DCS	Trunk- ing	Satell- ite	Earth Mo- bile	Earth Fixed	VSAT	
1	BALI	2	74	40	17	113	0	2	8618	0	0	21	1333	17	2143	9	0	0	2	6	12397
2	BANGKA BEUTUNG	2	65	2	19	316	0	16	9269	0	13	5	1385	200	2473	19	0	0	13	8	13805
3	BANTEN	0	35	0	17	21	0	4	4034	0	0	2	320	1	724	0	0	0	5	0	5163
4	BENGKULU	2	40	15	17	836	0	63	14766	0	4	12	900	241	3714	60	0	0	11	2	20683
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0	33	0	16	11	0	5	2461	0	0	2	264	1	554	0	0	0	1	0	3348
6	DIJAKARTA	0	42	5	17	308	0	15	5418	0	28	3	830	130	1762	0	0	0	0	1	8559
7	GORONTALO	6	38	12	17	1452	0	110	22200	3	36	173	2569	689	7012	33	1	199	116	64	34730
8	JAMBI	0	16	0	13	12	0	2	1582	0	0	2	243	1	220	0	0	0	0	0	2091
9	JAWA BARAT	2	43	0	25	89	0	4	6077	0	3	2	844	49	1136	1	0	0	4	2	8281
10	JAWATENGGAH	16	207	45	55	2384	0	120	47918	0	18	11	2799	770	12372	40	0	0	22	15	66792
11	JAWA TIMUR	12	263	29	37	909	0	39	26531	0	37	5	1239	660	8574	11	0	0	1	2	38349
12	KALAMANTAN BARAT	16	206	40	61	2160	0	34	31232	0	45	58	2076	911	10569	27	0	0	18	37	47490
13	KALAMANTAN SELATAN	3	45	0	28	147	0	0	8033	1	0	2	1011	2	1587	0	0	0	15	23	10897
14	KALAMANTAN TENGAH	2	60	9	28	168	0	7	7385	0	5	5	2174	42	1488	0	0	5	12	0	11390
15	KALAMANTAN TIMUR	3	29	0	22	79	0	3	5193	0	0	2	1281	3	987	2	0	1	8	2	7615
16	KALAMANTAN UTARA	1	75	10	31	269	0	97	9357	0	16	33	4545	1	1940	86	0	9	27	17	16514
17	KEPULAUAN RIAU	1	1	0	3	0	0	6	802	0	0	0	185	0	268	2	0	0	4	0	1272
18	LAMPUNG	0	26	3	13	154	0	16	4256	0	6	0	903	1	1445	2	0	0	40	1	6866
19	MALUKU	1	61	0	17	240	0	2	9847	0	0	1	547	152	2599	3	0	0	0	0	13470
20	MALUKU UTARA	0	15	0	18	23	0	0	1293	0	0	0	643	0	210	0	0	4	35	0	2241

21	NANGROE ACEH DARUSSALAM	0	11	0	5	4	0	0	860	0	0	4	319	0	129	0	0	2	21	0	1355
22	NUSATENGARA BARAT	0	31	0	15	67	0	8	5998	0	8	2	1270	9	1605	0	0	0	6	1	9020
23	NUSATENGARA TIMUR	1	65	0	18	30	0	0	3531	0	0	2	1.149	3	715	0	0	0	6	0	5520
24	PAPUA	2	32	0	19	18	0	0	1650	0	0	2	1.413	5	431	140	0	0	53	4	3769
25	PAPUA BARAT	0	14	0	2	3	0	2	702	1	0	11	562	13	164	5	0	0	8	7	1.494
26	RIAU	1	49	1	22	191	0	24	14384	0	6	69	2.052	85	3.902	22	0	0	4	5	20817
27	SULAWESI BARAT	0	1	0	9	1	0	2	819	0	0	0	96	1	175	0	0	0	0	0	1.104
28	SULAWESI SELATAN	4	37	1	25	366	0	10	13778	0	19	4	1.009	133	2.260	2	0	2	20	1	17671
29	SULAWESI TENGAH	2	24	0	23	26	0	2	3.669	2	2	3	575	1	641	7	0	0	13	0	4950
30	SULAWESI-TENG- GARA	0	22	0	19	31	0	0	2.713	0	10	2	652	2	578	0	0	0	4	0	4033
31	SULAWESI UTARA	0	43	0	16	118	0	0	4.966	0	6	4	799	25	829	0	0	0	1	0	6807
32	SUMATERA BARAT	1	51	0	25	186	0	2	7.375	4	4	1	603	3	2.109	1	0	0	10	0	10375
33	SUMATERA SELATAN	1	53	1	28	271	0	2	13500	0	2	11	2.773	238	2.247	20	0	0	15	0	19182
34	SUMATERA UTARA	5	119	32	23	540	0	0	21.762	0	4	0	2.095	274	5.602	8	0	1	4	4	30473
Total		86	1.926	245	720	11.543	0	597	321.979	11	272	454	41.458	4.683	83.164	500	1	223	499	202	468.563

-Data service penerbangan dan maritim tidak dimasukkan

Tabel 6.6. Perbandingan Jumlah Pengguna Band Frekuensi (ISR) Berdasarkan Pulau Besar dan Band Frekuensi Tahun 2012 s.d. 2015

Tahun	Kategori Pulau Besar	Broadcast				Fixed Service				Land Mobile (private)				Land Mobile (public)				Satellite			Total
		AM	FM	TV	DVB-T	PMP	PMP Private	PP Private	PP	Paging	Taxi	Trunking	Standar	IS95	GSM/DCS	Trunking	Satellite	Earth Mobile	Earth Fixed	VSAT	
2015	Sumatera	13	544	77	203	1.816	0	61	92.314	4	25	109	11.734	35	21.866	127	0	1	90	18	129.037
	Jawa	52	796	146	204	8.049	0	381	148.065	3	168	262	10.413	2	68.989	52	0	0	33	20	237.635
	Bali-Nusa Tenggara	3	161	2	52	413	0	24	18.798	0	21	9	3.804	0	5.763	19	0	0	25	9	29.103
	Kalimantan	10	210	19	112	663	0	113	30.770	1	21	42	9.196	0	2.550	115	0	15	80	79	43.996
	Sulawesi	6	143	1	105	554	0	16	27.527	2	37	15	3.374	0	1.520	42	1	201	154	65	33.763
	Maluku dan Papua	2	72	0	44	48	0	2	4.505	1	0	17	2.937	0	1.096	145	0	6	117	11	9.003
2014	Sumatera	63	507	22	186	1880	0	78	85.364	4	11.396	124	38	22.336	632	56	40	35	0	1	122.762
	Jawa	67	772	144	186	8424	1	491	159.449	3	10.194	254	196	44.061	1.907	160	164	138	6	2	226.619
	Bali-Nusa Tenggara	10	149	1	45	425	0	50	17.054	0	3.482	9	19	4.769	130	22	12	15	0	0	26.192
	Kalimantan	16	191	10	119	671	0	96	25.903	1	8.440	48	29	6.254	44	58	9	53	0	0	41.942
	Sulawesi	23	140	0	133	563	0	38	22.445	0	2.925	15	37	4.688	106	3	15	18	0	0	31.149
	Maluku dan Papua	3	65	0	50	49	0	10	2.806	1	3.117	17	0	946	7	33	51	25	6	0	7.186
2013	Sumatera	79	477	173	5	1.903	0	84	80.095	5	38	124	11.342	629	22.363	45	1	0	37	55	117.455
	Jawa	118	735	182	139	8.408	1	503	149.376	3	203	264	10.082	2.036	44.058	151	2	15	146	147	216.569
	Bali-Nusa Tenggara	14	141	39	1	424	0	52	15.811	0	16	9	3.209	130	4.769	22	0	0	12	22	24.671
	Kalimantan	27	180	117	0	668	0	97	25.139	1	24	48	8.388	44	6.254	57	0	0	9	64	41.117
	Sulawesi	23	126	127	0	588	0	38	21.089	0	38	15	2.481	106	4.687	4	0	0	10	35	29.367
	Maluku dan Papua	4	62	46	0	49	0	10	2.099	1	0	17	3.154	7	898	25	0	6	37	61	6.476
2012	Sumatera	81	424	158	1	1.921	0	94	61.944	5	49	134	10.882	638	22.364	33	1	0	31	56	98.816
	Jawa	145	608	161	8	8.548	5	540	135.267	3	226	267	9.845	2.030	44.048	87	2	12	109	146	202.057
	Bali-Nusa Tenggara	15	105	38	0	428	0	50	12.226	0	16	11	2.886	130	4.776	19	0	0	12	22	20.734
	Kalimantan	30	162	111	0	668	0	97	20.763	1	20	50	7.582	44	6.256	53	0	0	3	64	35.904
	Sulawesi	23	109	107	0	598	0	40	14.108	0	43	15	2.324	104	4.579	2	0	0	9	34	22.095
	Maluku dan Papua	4	45	39	0	48	0	8	1.537	0	0	18	2.529	1	856	1	0	0	31	43	5.160

6.3. PENERBITAN IZIN AMATIR RADIO (IAR) DAN SERTIFIKASI KECAKAPAN AMATIR RADIO (SKAR)

Salah satu pengaturan dalam penggunaan frekuensi oleh *stakeholder* adalah melalui penerbitan izin / sertifikat bagi penggunaan frekuensi radio. Terdapat tiga jenis izin / sertifikat yang dikeluarkan, yaitu Izin Amatir Radio (IAR), Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Surat Kecakapan Amatir Radio (SKAR). Secara implisit, jumlah izin terkait dengan pengelolaan spektrum frekuensi radio ini mencerminkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang terjadi. Tabel 6.7 menyajikan data penerbitan izin radio setiap provinsi di Indonesia.

Tabel 6.7. Sebaran Penerbitan SKAR dan IAR Tahun 2015

No.	Wilayah	Jenis Izin/Sertifikat	
		SKAR	IAR
1	DKI Jakarta	699	705
2	Jawa Barat	529	1.113
3	Banten	410	185
4	Jawa Tengah	505	468
5	DI. Yogyakarta	374	121
6	Jawa Timur	841	1.051
7	Lampung	114	166
8	Jambi	0	22
9	Bengkulu	75	8
10	Sumatera Selatan	100	184
11	Bangka Belitung	154	21
12	Sumatera Barat	118	157
13	Riau	0	62
14	Kepulauan Riau	40	0
15	Sumatera Utara	231	330
16	Aceh	83	41
17	Kalimantan Selatan	819	1.214
18	Kalimantan Tengah	166	92

19	Kalimantan Barat	217	103
20	Kalimantan Timur	492	334
21	Sulawesi Selatan	451	475
22	Sulawesi Tenggara	281	134
23	Sulawesi Barat	163	43
24	Sulawesi Tengah	0	144
25	Sulawesi Utara	65	100
26	Gorontalo	181	74
27	Maluku	102	109
28	Maluku Utara	60	0
29	Bali	495	339
30	Nusa Tenggara Barat	247	140
31	Nusa Tenggara Timur	71	63
32	Papua	771	345
33	Papua Barat	234	0
Total		9.088	8.343

6.4. IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (IKRAP)

Kegiatan radio amatir adalah kegiatan latihan saling berkomunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para amatir radio. Organisasi yang merupakan wadah resmi bagi anggota Amatir Radio di Indonesia adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) adalah Komunikasi Radio yang menggunakan band frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia. KRAP termasuk jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri yang dimaksudkan untuk menampung potensi aspirasi masyarakat yang ingin menggunakan komunikasi radio antar penduduk. Organisasi yang merupakan wadah resmi bagi pemilik izin komunikasi radio antar penduduk adalah Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). Tabel 6.8 menunjukkan sebaran penerbitan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) tahun 2015.

Tabel 6.8. Sebaran Penerbitan IKRAP pada Tahun 2015

No.	Wilayah	IKRAP	No.	Wilayah	IKRAP
1	DKI Jakarta	287	18	Kalimantan Tengah	31
2	Jawa Barat	858	19	Kalimantan Barat	92
3	Banten	41	20	Kalimantan Timur	166
4	Jawa Tengah	704	21	Sulawesi Selatan	68
5	DI Yogyakarta	379	22	Sulawesi Tenggara	68
6	Jawa Timur	881	23	Sulawesi Barat	-
7	Lampung	4	24	Sulawesi Tengah	129
8	Jambi	78	25	Sulawesi Utara	203
9	Bengkulu	14	26	Gorontalo	28
10	Sumatera Selatan	81	27	Maluku	50
11	Bangka Belitung	4	28	Maluku Utara	59
12	Sumatera Barat	163	29	Bali	249
13	Riau	125	30	Nusa Tenggara Barat	80
14	Kepulauan Riau	39	31	Nusa Tenggara Timur	22
15	Sumatera Utara	123	32	Papua	182
16	Aceh	213	33	Papua Barat	30
17	Kalimantan Selatan	639	Total		6.090

6.5. Sertifikasi Radio Elektronik dan Operator Radio (REOR)

Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika atas nama Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Sertifikat Operator Radio. Sertifikat operator radio adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai operator radio sesuai ketentuan perundang-undangan. Setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi, khusus pada Stasiun Dinas bergerak Maritim (*Maritim Mobile Service*) dan Stasiun Dinas bergerak Satelit Maritim (*Maritim Mobile-Satellite Service*) harus dioperasikan oleh radio elektronik / operator radio yang telah memiliki sertifikasi kewenangan. Sertifikasi kewenangan sebagaimana dimaksud antara lain:

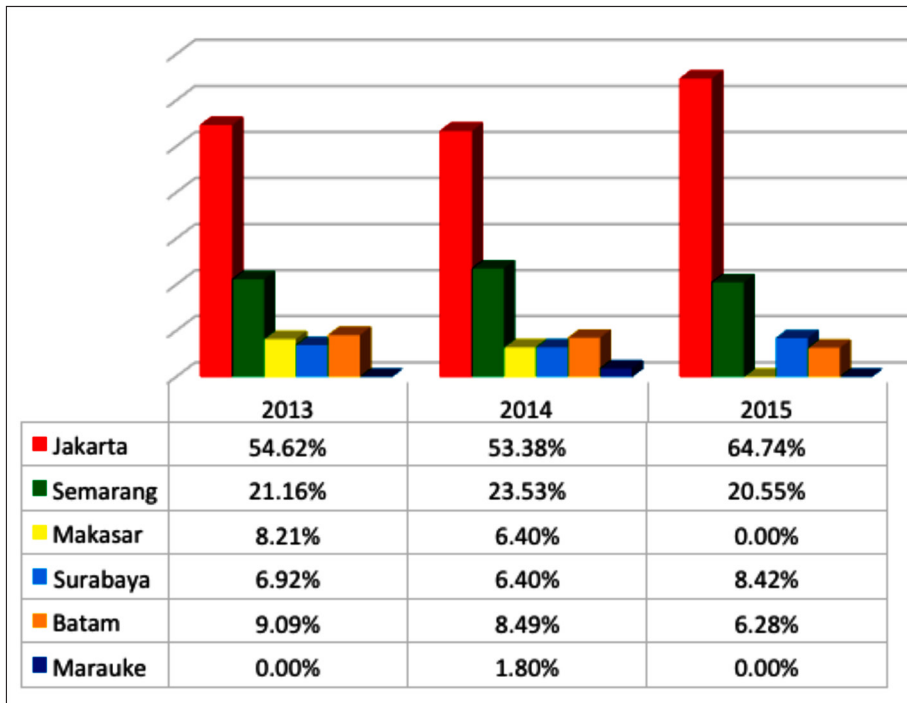
- a. Sertifikat Radio Elektronika;
 1. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (*Second Class Radio Electronic Certificate*).
 2. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (*First Class Radio Electronic Certificate*).
- b. Sertifikat Operator Radio;
 1. Sertifikat Operator Terbatas (*Restricted Operator's Certificate*).
 2. Sertifikat Operator Umum (*General Operator's Certificate*).
 3. Sertifikat Operator Stasiun Radio Pantai (*Coast Station Operator's Certificate*).

Sertifikasi kewenangan yang dijelaskan pada bagian kedua diperoleh melalui uji pelatihan Diklat REOR GMDSS dan dinyatakan lulus ujian Negara sertifikasi REOR GMDSS yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI. Data peserta dan kelulusan REOR berdasarkan kota pelaksana kegiatan untuk tahun 2013 sampai dengan 2015 disajikan pada Tabel 6.9. Gambar 6.5 menyajikan tingkat persentase kelulusan ujian REOR GMDSS berdasarkan kota penyelenggara secara akumulatif dimana Jakarta menyumbang persentase sebesar 64.74% dari total peserta yang lulus.

Tabel 6.9. Peserta dan Kelulusan REOR GMDSS Tahun 2013 s.d. 2015

Kota	2013			2014			2015		
	Peserta	Lulus	Persentase	Peserta	Lulus	Persentase	Peserta	Lulus	Persentase
Jakarta*	1.484	1.357	91.44%	1.302	1.234	94.78%	1.906	1.832	96.12%
Semarang	575	543	94.43%	574	564	98.26%	605	593	98.02%
Makasar	223	217	97.31%	156	153	98.08%	-	-	0.00%
Surabaya	188	182	96.81%	156	154	98.72%	248	241	97.18%
Batam	247	231	93.52%	207	186	89.86%	185	170	91.89%
Marauke	-	-	-	44	42	95.45%	-	-	0.00%
Total	2.717	2.530	77.41%	2.439	2.333	96.34%	2.944	2.836	96.33%

* Termasuk Bogor/Ciawi



Gambar 6.5. Tingkat Kelulusan REOR Menurut Kota Tahun 2013 s.d. 2015

6.6. Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang SKOR. Setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada stasiun dinas tetap darat dan stasiun dinas bergerak darat wajib dioperasikan oleh operator radio yang memiliki SKOR. Tabel 6.10 menunjukkan penyelenggaraan ujian SKOR pada rentang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 6.10. Peserta dan Kelulusan SKOR Tahun 2012 s.d. Tahun 2015

Kota	2012 (1)		2012 (2)		2013 (1)		2013 (2)		2014 (1)		2014 (2)		2015 (1)		2015 (2)	
	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus
Batam	0	0	30	23	74	72	74	72	71	71	0	0	0	0	22	18
Surabaya	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Balikpapan	0	0	0	0	0	0	97	91	24	24	0	0	35	35	35	35
Mataram	0	0	57	57	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0
Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jakarta	0	0	87	87	20	20	67	64	25	25	0	0	0	0	0	0
Palembang	60	57	79	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samarinda	38	35	103	100	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Bontang	52	52	52	52	29	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ternate	0	0	56	54	61	54	91	84	66	63	30	30	0	0	60	58
Bekasi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
Total	150	144	464	449	244	233	400	382	221	218	30	30	35	35	142	136

* Bekasi baru menyelenggarakan ujian SKOR pada Semester 2 2015

6.7. LAYANAN CONTACT CENTER

Layanan *Contact Center* adalah layanan yang disediakan oleh Ditjen SDPPI kepada pengguna layanan publik untuk menyampaikan pertanyaan, pengaduan, maupun keluhan atas permasalahan terkait dengan layanan publik yang disediakan oleh Ditjen SDPPI. Pertanyaan atau pengaduan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan oleh Ditjen SDPPI. Salah satu layanan yang diberikan Ditjen SDPPI terkait dengan operasional pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio adalah layanan *Contact Center*, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.11. Jumlah gangguan operasional yang terjadi di suatu daerah direpresentasikan dengan jumlah *Ticket Contact Center* yang ditunjukkan oleh Tabel 6.12.

Tabel 6.11. Data Statistik *Call Contact Center* Ditjen SDPPI Tahun 2015

Bulan	Jumlah Customer Call	Jumlah Call Answered	Jumlah Lost Call	Average Answered Time
Januari	1.369	1.360	9	5,5
Pebruari	1.270	1.266	4	5,1
Maret	1.434	1.429	5	4,4
April	1.524	1.521	3	4,0
Mei	1.343	1.339	5	4,2
Juni	1.409	1.400	9	4,2
Juli	1.136	1.133	3	4,4
Agustus	1.323	1.319	4	4,0
Sepetember	1.408	1.399	9	4,1
Oktober	1.238	1.235	3	4,1
November	1.616	1.609	7	4,2
Desember	1.260	1.256	4	4,3
Total Rata-Rata	1.361	1.356	5	4,4

Berdasarkan Tabel 6.11 *Customer call* tertinggi terjadi pada Bulan November dengan jumlah 1.616 dan terendah pada Bulan Juli dengan jumlah 1.136. *Lost Call* yang terjadi sepanjang tahun 2015 memiliki rata-rata berjumlah 5 (lima).

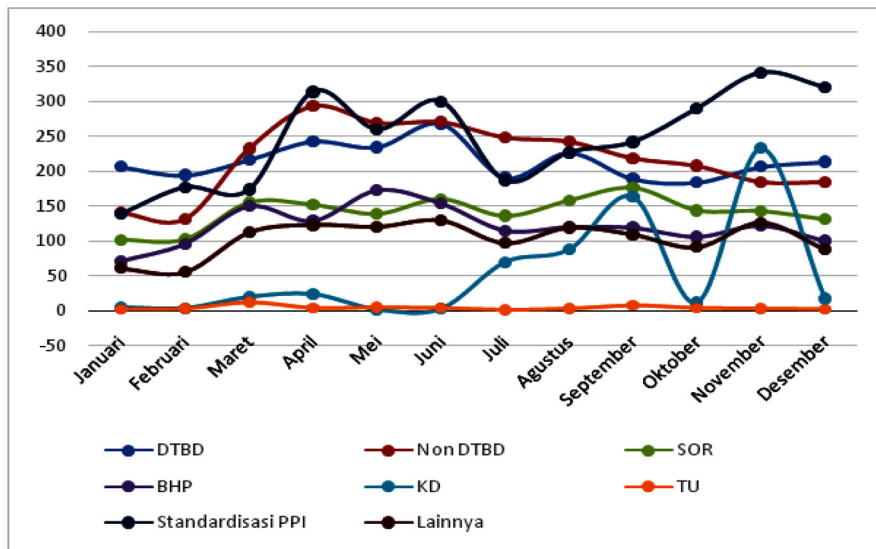
Tabel 6.12. Data Statistik *Ticket Contact Center* Ditjen SDPPI Tahun 2015

Bulan	Jumlah Total <i>Ticket</i>	Jumlah <i>Ticket Open</i>	Jumlah <i>Ticket Closed</i>	Jumlah <i>Ticket Solved</i>
Januari	727	162	99	466
Pebruari	765	123	124	518
Maret	1.073	24	138	911
April	1.282	19	84	1.179
Mei	1.203	19	66Z	1.118
Juni	1.288	6	58	1.224
Juli	1.046	6	55	985
Agustus	1.184	18	48	1.118
September	1.226	8	39	1.179
Oktober	1.039	9	37	993
November	1.359	15	37	1.307
Desember	1.057	7	57	993
Total Rata-Rata	1.104	35	70	999

Pemberian *ticket* dapat diklasifikasikan menjadi delapan kategori *ticket* berdasarkan unit kerja SDDPI, yaitu *ticket* Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD), *ticket* Non Dinas Tetap Bergerak Darat (Non DTBD), *ticket* Sertifikasi Operator Radio (SOR), *ticket* Biaya Hak Penggunaan (BHP), *ticket* Konsultasi dan Data (KD), *ticket* Tata Usaha (TU), Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika (PPI), dan *ticket* lainnya. Dari data *ticket* tersebut dapat ditampilkan berdasarkan unit kerja, pulau besar, dan kota provinsi yang disajikan pada Tabel 6.13, Tabel 6.14, Tabel 6.15, Gambar 6.7, dan Gambar 6.8.

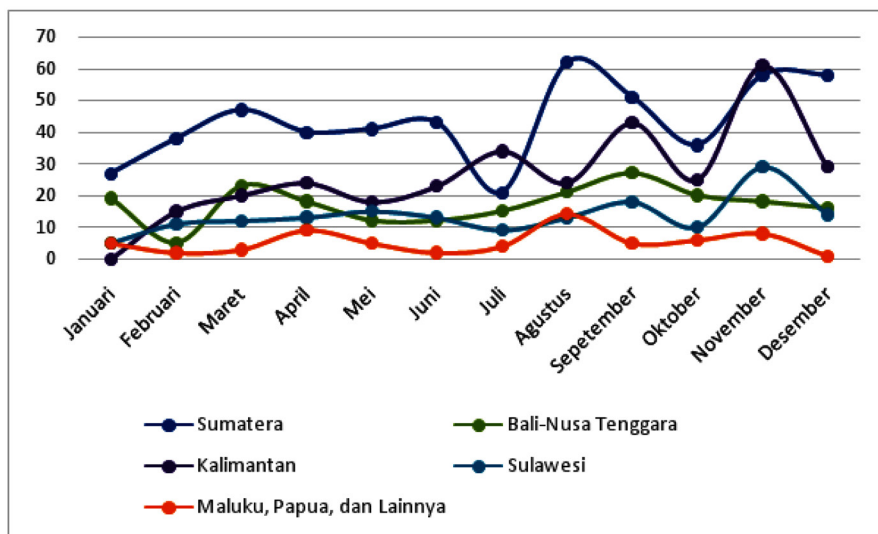
Tabel 6.13. Data Statistik *Ticket Center* Tahun 2015 Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja	Bulan										
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
DTBD	206	194	216	242	234	267	191	226	189	184	206
Non DTBD	141	132	233	294	270	271	249	243	219	208	185
SOR	102	103	155	152	139	160	136	158	176	144	143
BHP	71	96	150	129	173	154	115	120	119	106	122
KD	5	4	20	24	2	3	70	88	164	12	233
TU	2	3	13	4	5	4	1	3	8	4	3
Standard- isasi PPI	139	177	174	314	260	300	187	227	242	290	341
Lainnya	61	56	112	123	120	129	97	119	109	91	126
Jumlah	727	765	1.073	1.282	1.203	1.288	1.039	1.180	1.224	1.038	1.356
											1.056



Gambar 6.7. Data Statistik *Ticket Contact Center* Tahun 2015 Berdasarkan Unit Kerja

74



Gambar 6.8. Data Statistik *Ticket Contact Center* Berdasarkan Pulau Besar Tahun 2015

Tabel 6.14. Data Statistik *Ticket Contact Center* Berdasarkan Provinsi Tahun 2015

Kota	Januari	Febru- ari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus- tus	Septem- ber	Okto- ber	Novem- ber	Desem- ber
Aceh	4	5	3	6	5	8	0	0	1	4	1	0
Sumatera Utara	5	9	3	5	4	4	5	3	15	5	5	6
Sumatera Barat	0	1	2	0	1	0	0	0	4	0	0	3
Riau	0	9	0	0	0	0	0	11	8	9	21	17
Kepulauan Riau	8	3	20	12	21	23	9	26	4	11	19	15
Jambi	1	0	4	4	5	3	0	3	3	2	3	0
Sumatera Selatan	4	3	11	12	5	4	7	12	4	0	4	6
Bangka Belitung	0	0	3	0	0	0	0	3	4	2	1	0
Bengkulu	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Lampung	5	7	1	1	0	1	0	3	7	3	3	11
Sumatera	27	38	47	40	41	43	21	62	51	36	58	58
DKI Jakarta	591	616	858	1.063	1.017	1.077	866	867	841	822	998	805
Jawa Barat	33	31	29	33	27	32	20	64	85	59	72	52
Banten	5	7	15	17	27	19	8	25	24	16	33	23
Jawa Tengah	12	14	17	29	12	23	32	30	64	18	19	21
DI Yogyakarta	5	6	9	7	4	4	8	14	15	8	11	15
Jawa Timur	25	20	38	28	23	40	25	50	53	19	52	23
Jawa	671	694	966	1.177	1.110	1.195	959	1.050	1.082	942	1.185	939
Bali	9	3	12	17	8	6	12	18	18	16	15	14
Nusa Tenggara Barat	2	2	1	0	0	0	0	2	2	1	1	0

Nusa Tenggara Timur	8	0	10	1	4	6	3	1	7	3	2	2
Bali-Nusa Tenggara	19	5	23	18	12	12	15	21	27	20	18	16
Kalimantan Barat	0	1	0	3	2	1	0	1	4	2	5	2
Kalimantan Tengah	0	4	2	2	2	2	1	00	11	2	5	10
Kalimantan Selatan	0	2	5	2	1	6	4	8	5	1	3	3
Kalimantan Timur	0	8	13	17	13	14	29	15	23	20	48	14
Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kalimantan	0	15	20	24	18	23	34	24	43	25	61	29
Sulawesi Utara	1	1	0	7	6	3	6	4	4	1	12	2
Sulawesi Barat	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	1	0	1	1	1	2	0	0	1	0	1	3
Sulawesi Tenggara	3	4	0	1	1	4	0	0	1	4	0	0
Sulawesi Selatan	0	6	4	4	6	3	3	5	11	5	15	8
Gorontalo	0	0	5	0	0	1	0	4	1	0	1	1
Sulawesi	5	11	12	13	15	13	9	13	18	10	29	14
Maluku	3	0	0	0	0	0	2	2	3	3	4	0
Maluku Utara	0	0	1	4	0	0	0	4	1	0	0	0
Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Papua	2	2	2	5	5	2	2	5	1	3	4	0
Maluku, Papua, dan Lainnya	5	2	3	9	5	2	4	14	5	6	8	1
Total	727	765	1.073	1.282	1.203	1.288	2.084	2.366	2.452	2.078	2.718	2.113

Tabel 6.15. Tingkat Penyelesaian *Ticket Contact Center* Berdasarkan Unit Kerja pada Tahun 2015

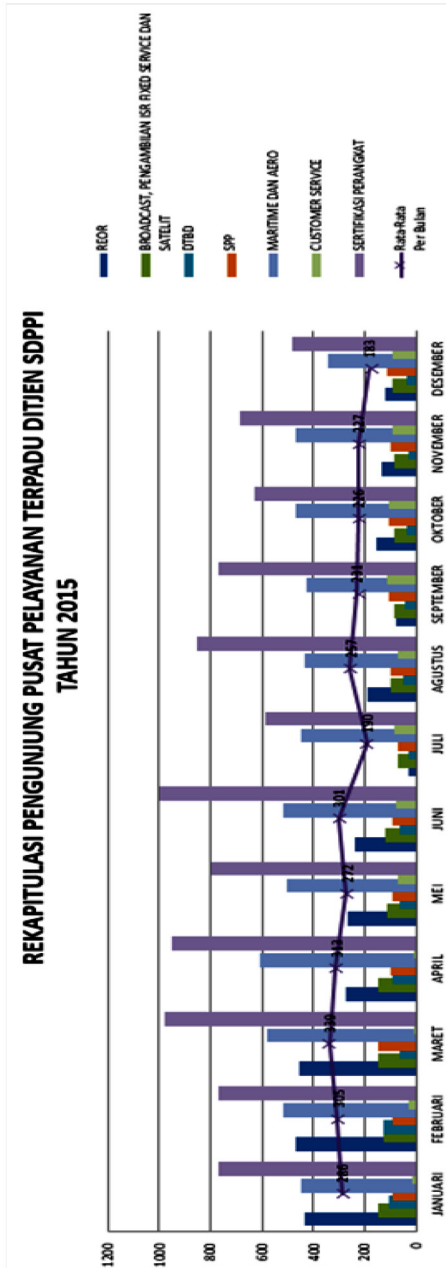
Bulan		DTBD	Non DTBD	SOR	BHP	Kon-sultasi Data	Stan-darisi	TU	Lainnya
Januari	Total Ticket	206	141	102	71	5	139	2	61
	Ticket Solved	110	70	81	44	4	103	1	53
	%	53,40%	49,65%	79,41%	61,97%	80,00%	74,10%	50,00%	86,89%
Februari	Total Ticket	194	132	103	96	4	177	3	56
	Ticket Solved	116	58	73	60	4	151	0	56
	%	59,79%	43,94%	70,87%	62,50%	100,00%	85,31%	0,00%	100,00%
Maret	Total Ticket	216	233	155	150	20	174	13	112
	Ticket Solved	172	183	137	126	17	160	5	111
	%	79,63%	78,54%	88,39%	84,00%	85,00%	91,95%	38,46%	99,11%
April	Total Ticket	242	294	152	129	24	314	4	123
	Ticket Solved	203	269	149	109	19	306	1	123
	%	83,88%	91,50%	98,03%	84,50%	79,17%	97,45%	25,00%	100,00%
Mei	Total Ticket	234	270	139	173	2	260	5	120
	Ticket Solved	214	261	139	131	2	250	3	118
	%	91,45%	96,67%	100,00%	75,72%	100,00%	96,15%	60,00%	98,33%
Juni	Total Ticket	267	271	160	154	3	300	4	129
	Ticket Solved	246	259	159	136	3	288	4	129
	%	92,13%	95,57%	99,38%	88,31%	100,00%	96,00%	100,00%	100,00%

6.8. PUSAT PELAYANAN TERPADU

Tabel 6.16 menyajikan data pengunjung pusat pelayanan Ditjen SDPPI pada Tahun 2015. Terdapat 10 loket pelayanan, dengan setiap loket melayani jenis pelayanan tertentu. Proporsi pengunjung pusat pelayanan Ditjen SDPPI berdasarkan gender pada tahun 2015 disajikan dalam Tabel 6.17 dan Gambar 6.9.

Tabel 6.16. Data Pengunjung Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI Tahun 2015

BULAN	LOKET LAYANAN							TOTAL
	LOKET 1	LOKET 2	LOKET 3-4	LOKET 5	LOKET 6	LOKET 7	LOKET 8 - 10	
	REOR	BROAD-CAST, PENGAMBILAN ISR FIXED SERVICE DAN SATELIT	DTBD	SPP	MARITIME DAN AERO	CUSTOMER SERVICE	SERTIFIKASI PERANGKAT	
Januari	431	147	105	89	446	17	770	2.005
Februari	472	129	126	90	518	32	771	2.138
Maret	453	145	64	146	578	8	980	2.374
April	272	150	94	101	611	9	952	2.189
Mei	264	111	64	89	507	70	796	1.901
Juni	238	122	62	90	519	80	997	2.108
Juli	29	74	28	71	451	87	589	1.329
Agustus	189	102	48	99	436	69	855	1.798
September	78	85	42	108	428	112	766	1.619
Oktober	153	85	38	108	468	104	627	1.583
November	132	87	28	98	466	94	686	1.591
Desember	119	92	33	114	344	93	483	1.278
Jumlah	2.830	1.329	732	1.203	5.772	775	9.272	21.913



Gambar 6.9. Rekapitulasi Pengunjung Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI Tahun 2015

◆◆◆

DATA STATISTIK DITJEN SDPPI SEMESTER 2 TAHUN 2015



7

**BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT**

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam rangka pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika adalah fungsi pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Faktor tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan monitor, penertiban, dan penegakkan hukum terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penggunaan alat dan telekomunikasi.

Pada bab ini disajikan data terkait bidang pengendalian sumber daya dan perangkat yang meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan pengendalian frekuensi radio.
- 2) Kegiatan pengendalian perangkat pos dan telekomunikasi.

Data yang dimunculkan dalam statistik bidang Pengendalian SDPPI meliputi:

- 1) Monitor dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio pada tahun 2015;
- 2) Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio pada tahun 2015;
- 3) Temuan gangguan spektrum frekuensi radio selama pada tahun 2015;
- 4) Monitor dan penertiban penggunaan perangkat pos dan telekomunikasi pada tahun 2015;
- 5) Kondisi Sistem Monitor Frekuensi Radio (SMFR) dan kondisi jaringan Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) pada tahun 2015.

UPT Monitor Frekuensi Radio yang tersebar di 37 wilayah seluruh Indonesia merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal SDPPI dalam hal

pengendalian dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio dibawah pembinaan teknis Direktorat Pengendalian SDPPI.

7.1 MONITORING DAN PENERTIBAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Salah satu tugas dan fungsi dari unit kerja di Ditjen SDPPI adalah melakukan monitoring dan penertiban atas penggunaan spektrum frekuensi radio maupun penggunaan perangkat telekomunikasi dalam aspek legalitas penggunaan, kepemilikan izin dan kesesuaian perangkat yang digunakan dengan peraturan yang berlaku. Monitoring dan penertiban dilakukan melalui keberadaan 37 UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di seluruh Indonesia.

7.1.1 Monitoring Penggunaan Frekuensi

Pada kegiatan monitor yang dilakukan pada tahun 2015 masih ditemukan adanya gangguan dalam penggunaan frekuensi. Hasil kegiatan monitor diklasifikasikan berdasarkan statusnya, yaitu terindikasi adanya penggunaan frekuensi, status penggunaan, dan lanjutan monitor yang dilakukan. Hasil monitor yang dilakukan selama tahun 2015 disajikan pada Tabel 7.1, Tabel 7.2, Tabel 7.3, dan Tabel 7.4. Hasil Rekapitulasi Monitor Penggunaan Data Selular di Kabupaten/ Kota Tahun 2015 dan Hasil Rekapitulasi Monitor Penggunaan Profil Radio Siaran Secara Nasional di Kabupaten/Kota Tahun 2015 disajikan pada Tabel 7.5 dan Tabel 7.6.

Tabel 7.1. Rekapitulasi Hasil Monitor oleh Masing-Masing UPT Tahun 2015

No	UPT	Ter- moni- tor	Teridentifikasi		Identifikasi				Monitor Lanjut			
			Jumlah	Persen	Legal	Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai				
1	Aceh	3.093	3.093	100,00%	2.990	96,67%	103	3,33%	0	0,00%	0	0,00%
2	Medan	2.522	2.284	90,56%	1.754	69,55%	221	8,76%	0	0,00%	309	12,25%
3	Pekanbaru	3.006	1.112	36,99%	1.072	35,66%	37	1,23%	0	0,00%	3	0,10%
4	Batam	2.430	2.407	99,05%	2.223	91,48%	125	5,14%	0	0,00%	59	2,43%
5	Jambi	2.943	2.796	95,01%	2.240	76,11%	162	5,50%	2	0,07%	392	13,32%
6	Padang	1.903	1.801	94,64%	1.260	66,21%	217	11,40%	2	0,11%	322	16,92%
7	Palembang	1.481	1.463	98,78%	494	33,36%	234	15,80%	0	0,00%	735	49,63%
8	Bengkulu	1.758	1.457	82,88%	1.197	68,09%	66	3,75%	0	0,00%	194	11,04%
9	Pangkalpinang	9.386	5.213	55,54%	4.987	53,13%	169	1,80%	0	0,00%	57	0,61%
10	Lampung	5.149	4.611	89,55%	3.994	77,57%	179	3,48%	9	0,17%	429	8,33%
11	Banten	645	193	29,92%	193	29,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12	Jakarta	3.159	2.172	68,76%	1.658	52,48%	428	13,55%	12	0,38%	74	2,34%
13	Bandung	2.010	2.007	99,85%	1.463	72,79%	544	27,06%	0	0,00%	0	0,00%
14	Semarang	3.553	2.823	79,45%	2.741	77,15%	82	2,31%	0	0,00%	0	0,00%
15	Yogyakarta	5.572	4.233	75,97%	4.161	74,68%	72	1,29%	0	0,00%	0	0,00%
16	Surabaya	2.609	1.341	51,40%	655	25,11%	686	26,29%	0	0,00%	0	0,00%
17	Denpasar	3.018	2.975	98,58%	2.242	74,29%	702	23,26%	0	0,00%	31	1,03%
											1.268	48,60%
											43	1,42%

18	Mataram	2.593	2.560	98,73%	2.362	91,09%	198	7,64%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	33	1,27%
19	Kupang	1.262	958	75,91%	769	60,94%	128	10,14%	10	0,79%	51	4,04%	304	24,09%		
20	Banjarmasin	1.096	1.013	92,43%	865	78,92%	126	11,50%	0	0,00%	22	2,01%	83	7,57%		
21	Pontianak	1.820	1.703	93,57%	1.303	71,59%	83	4,56%	0	0,00%	317	17,42%	117	6,43%		
22	Palangkaraya	1.852	1.845	99,62%	1.595	86,12%	114	6,16%	0	0,00%	136	7,34%	7	0,38%		
23	Balikpapan	2.300	1.769	76,91%	1.365	59,35%	145	6,30%	0	0,00%	259	11,26%	531	23,09%		
24	Samarinda	1.542	1.086	70,43%	848	54,99%	233	15,11%	0	0,00%	5	0,32%	456	29,57%		
25	Makassar	7.671	7.298	95,14%	6.540	85,26%	499	6,51%	0	0,00%	259	3,38%	373	4,86%		
26	Kendari	6.056	5.257	86,81%	4.698	77,58%	222	3,67%	0	0,00%	337	5,56%	799	13,19%		
27	Mamuju	708	633	89,41%	552	77,97%	76	10,73%	4	0,56%	1	0,14%	75	10,59%		
28	Palu	3.100	3.024	97,55%	2.217	71,52%	594	19,16%	0	0,00%	213	6,87%	76	2,45%		
29	Manado	1.602	1.463	91,32%	1.411	88,08%	42	2,62%	8	0,50%	2	0,12%	139	8,68%		
30	Gorontalo	1.731	1.725	99,65%	1.201	69,38%	354	20,45%	0	0,00%	170	9,82%	6	0,35%		
31	Ternate	875	797	91,09%	657	75,09%	81	9,26%	0	0,00%	59	6,74%	78	8,91%		
32	Ambon	1.512	1.494	98,81%	1.494	98,81%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	18	1,19%		
33	Jayapura	856	846	98,83%	754	88,08%	53	6,19%	1	0,12%	38	4,44%	10	1,17%		
34	Merauke	380	375	98,68%	343	90,26%	32	8,42%	0	0,00%	0	0,00%	5	1,32%		
35	Manokwari	435	369	84,83%	364	83,68%	5	1,15%	0	0,00%	0	0,00%	66	15,17%		
36	Sorong	352	199	56,53%	167	47,44%	10	2,84%	0	0,00%	22	6,25%	153	43,47%		
37	Tahuna	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
	Jumlah	91.980	76.395	83,06%	64.289	70,48%	7.022	7,63%	48	0,05%	4.496	4,89%	15.585	16,94%		

Tabel 7.2. Hasil Monitor Frekuensi Berdasarkan Dinas/Service Tahun 2015)

Dinas	Sub-Service	Ter- moni- tor	Teridentifikasi		Monitor				Monitor Lanjut	
			Jum- lah	Persen	Legal	Illegal	Kadalua- sa	Tidak Sesuai		
Bergerak	Marabahaya	378	358	94,71%	357	94,44%	0	0,00%	1	0,26%
Bergerak Maritim	Navigasi Maritim	9	9	100,00%	8	88,89%	1	11,11%	0	0,00%
	Sts Radio Maritim	505	410	81,19%	350	69,31%	55	10,89%	0	0,00%
Bergerak Pe- nerbangan	Nav Penerbangan	457	435	95,19%	336	73,52%	98	21,44%	0	0,00%
	Sts Radio Pnbngan	1.412	1.334	94,48%	1.202	85,13%	128	9,07%	1	0,22%
Siaran	Radio MF/AM	150	143	95,33%	134	89,33%	8	5,33%	0	0,00%
	Radio HF/AM	1.345	768	57,10%	695	51,67%	71	5,28%	0	0,00%
	Radio VHF/FM	10.289	8.346	81,12%	7.273	70,69%	948	9,21%	5	0,05%
	TV Satelit	102	102	100,00%	98	96,08%	2	1,96%	0	0,00%
	TV VHF	369	298	80,76%	221	59,89%	75	20,33%	0	0,00%
Bergerak Darat	TV UHF	5.483	4.889	89,17%	4.633	84,50%	241	4,40%	5	0,09%
	Komrad MF	22	22	100,00%	21	95,45%	1	4,55%	0	0,00%
	Komrad HF	1.054	480	45,54%	401	38,05%	67	6,36%	4	0,38%
	Komrad VHF	5.860	4.081	69,64%	2.616	44,64%	1.376	23,48%	6	0,10%
	Komrad UHF	2.935	1.928	65,69%	1.442	49,13%	456	15,54%	2	0,07%
Bergerak Darat	CDMA	1.351	1.270	94,00%	1.240	91,78%	30	2,22%	0	0,00%
	GSM	14.925	13.619	91,25%	13.457	90,16%	106	0,71%	0	0,00%
	DCS	18.424	13.500	73,27%	13.432	72,90%	61	0,33%	0	0,00%
	3G	4.234	4.005	94,59%	3.998	94,43%	7	0,17%	0	0,00%
	LTE	78	78	100,00%	78	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Trunking	147	136	92,52%	64	43,54%	72	48,98%	0	0,00%
									11	7,48%

Amatir	Amatir MF	7	7	100,00%	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Amatir HF	283	283	100,00%	167	59,01%	116	40,99%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	amatir VHF	1.227	1.016	82,80%	928	75,63%	83	6,76%	3	0,24%	2	0,16%	211	17,20%
	amatir UHF	72	62	86,11%	59	81,94%	3	4,17%	0	0,00%	0	0,00%	10	13,89%
Tetap	BWA	2.121	1.541	72,65%	1.376	64,88%	165	7,78%	0	0,00%	0	0,00%	580	27,35%
	Microwave Link	18.619	17.154	92,13%	10.157	54,55%	2.812	15,10%	20	0,11%	4.165	22,37%	1.465	7,87%
	STL	98	98	100,00%	57	58,16%	39	39,80%	0	0,00%	2	2,04%	0	0,00%
Frekuensi & Tanda Waktu Standar		24	23	95,83%	22	91,67%	1	4,17%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%
Radio Astronomi	Astronomi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Ground to Air	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Radio Navigasi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Jumlah	91.980	76.395	83,06%	64.829	70,48%	7.022	7,63%	48	0,05%	4.496	4,89%	15.585	16,94%

Tabel 7.3. Hasil Monitor Frekuensi Berdasarkan Band Frekuensi pada Tahun 2015

Band Frekuensi	Termon-itor	Teridentifikasi		Monito					Monito Lanjut		
		Jumlah	Persen	Legal	Illegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai				
VLF (3-30 KHz)		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
LF (30-300 KHz)	6	5	83,33%	5	83,33%	0	0,00%	0	0,00%	1	16,67%
MF (300-3000 KHz)	469	459	97,87%	438	93,39%	19	4,05%	0	0,00%	2	0,43%
										10	2,13%
HF (3-30 MHz)	3.313	1.911	57,68%	1.742	52,58%	149	4,50%	4	0,12%	16	0,48%
										1.402	42,32%
VHF (30-300 MHz)	20.320	17.393	85,60%	13.885	68,33%	3.230	15,90%	15	0,07%	263	1,29%
										2.927	14,40%
UHF (300-3000 MHz)	50.063	40.333	80,56%	39.028	77,96%	1.020	2,04%	11	0,02%	274	0,55%
										9.730	19,44%
SHF (3 – 30 GHz)	17.809	16.294	91,49%	9.731	54,64%	2.604	14,62%	18	0,10%	3.941	22,13%
										1.515	8,51%
EHF (30-300 GHz)	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
										0	0,00%
Jumlah	91.980	76.395	83,06%	64.829	70,48%	7.022	7,63%	48	0,05%	4.496	4,89%
										15.585	16,94%

Tabel 7.4. Hasil Monitor Frekuensi Berdasarkan Dinas Komunikasi 1 Tahun 2015

Dinas	Ter- moni- tor	Identifikasi		Monitor					Monitor Lanjut				
		Jum- lah	Persen	Legal	Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai						
Bergerak	581	525	90,36%	438	75,39%	84	14,46%	0	0,00%	3	0,52%	56	9,64%
Bergerak Penerbangan	1.869	1.769	94,65%	1.538	82,29%	226	12,09%	1	0,05%	4	0,21%	100	5,35%
Bergerak Maritim	520	425	81,73%	364	70,00%	56	10,77%	0	0,00%	5	0,96%	95	18,27%
Bergerak Darat	44.007	39.346	89,41%	38.061	86,49%	1.109	2,52%	8	0,02%	168	0,38%	4.661	10,59%
Tetap	25.653	20.310	79,17%	12.330	48,06%	3.787	14,76%	18	0,07%	4.175	16,27%	5.343	20,83%
Siaran	17.629	12.638	71,69%	10.817	61,36%	1.664	9,44%	18	0,10%	139	0,79%	4.991	28,31%
Amatir	1.588	1.250	78,72%	1.161	73,11%	86	5,42%	1	0,06%	2	0,13%	338	21,28%
Satelit	109	109	100,00%	98	89,91%	9	8,26%	2	1,83%	0	0,00%	0	0,00%
Frekuensi dan Tanda Waktu Standar	24	23	95,83%	22	91,67%	1	4,17%	0	0,00%	0	0,00%	1	4,17%
Radio Astronomi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah	91.980	76.395	83,06%	64.829	70,48%	7.022	7,63%	48	0,05%	4.496	4,89%	15.585	16,94%

No	Provinsi	Kab/kota	900 MHz			1800 MHz			2100 MHz			
			Isat	XL	Tsel	Isat	Tsel	XL	Isat	XL	Tsel	H3I
1	ACEH	Posentase operator (termonitor) 23 kab/kota	33.33%	33.33%	33.33%	50.00%	21.43%	21.43%	71.43%	14.29%	14.29%	0%
2	SUMATERA UTARA	Posentase operator (termonitor) 33 kab/kota	33.33%	33.33%	33.33%	25.00%	25.00%	43%	14%	20%	20%	0%
3	SUMATERA BARAT	Posentase operator (termonitor) 19 kab/kota	100%	100%	100%	27.91%	27.91%	100%	100%	100%	100%	0%
4	RIAU	Posentase operator (termonitor) 12 kab/KOTA	38.46%	69%	92%	100%	100%	100%	83%	70%	100%	60%
5	JAMBI	Posentase operator (termonitor) 11 kab/kota	33.33%	33.33%	33.33%	60%	80%	100%	31.25%	20.00%	40.00%	20.00%
6	SUMATERA SELATAN	Posentase operator (termonitor) 17 kab/kota	33.33%	33.33%	33.33%	26.92%	26.92%	19.23%	26.92%	8.33%	33.33%	25.00%
7	BENGKULU	Posentase operator (termonitor) 10 kab/kota	31.25%	37.50%	31.25%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	75%
8	LAMPUNG	Posentase operator (termonitor) 15 kab/kota	83%	100%	83%	60%	100%	100%	0%	0%	100%	33%
9	BANGKA BELITUNG	Posentase operator (termonitor) 7 kab/kota	33.33%	33.33%	33.33%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
10	KEPULAUAN RIAU	Posentase operator (termonitor) 7 kab/kota	33.33%	33.33%	33.33%	26.67%	26.67%	20.00%	26.67%	26.67%	26.67%	20.00%
14	YOGYAKARTA	Posentase operator (termonitor) 5 kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
15	JAWA TIMUR	Posentase operator (termonitor) 38 kab/kota	100%	100%	100%	86%	100%	100%	71%	100%	100%	71%
17	BALI	Posentase operator (termonitor) 9 kab/kota	44.44%	22.22%	33.33%	30.77%	30.77%	23.08%	15.38%	30.77%	23.08%	15.38%
18	NUSA TENGGARA BARAT	Posentase operator (termonitor) 10 kab/kota	100%	50%	75%	100%	100%	75%	50%	100%	75%	50%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Posentase operator (termonitor) 22 kab/kota	33.33%	33.33%	33.33%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
20	KALIMANTAN BARAT	Posentase operator (termonitor) 14 kab/kota	25.00%	8.33%	66.67%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	0.00%
21	KALIMANTAN TENGAH	Posentase operator (termonitor) 14 kab/kota	38%	13%	100%	0%	100%	0%	0%	33%	0%	0%
			33.33%	33.33%	33.33%	0%	0%	0%	0%	25.00%	25.00%	25.00%
			100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
			35.00%	28.57%	33.33%	33.33%	33.33%	23.81%	9.52%	6.67%	33.33%	13.33%
			100%	86%	100%	100%	100%	100%	71%	149%	171%	29%

22	KALIMANTAN SELATAN	Prosentase operator (termonitor)	37,50%	37,50%	25,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	16,67%	50,00%	33,33%	0,00%
	13 kab/kota		100%	100%	67%	0%	100%	0%	100%	33%	100%	67%	0%
23	KALIMANTAN TIMUR	Prosentase operator (termonitor)	33,33%	33,33%	33,33%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	10 kab/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	KALIMANTAN UTARA												
25	SULAWESI UTARA	Prosentase operator (termonitor)	28,57%	28,57%	42,86%	23,53%	35,29%	17,65%	23,53%	12,50%	25,00%	37,50%	25,00%
	15 kab/kota		67%	67%	100%	67%	100%	50%	67%	33%	67%	100%	67%
26	SULAWESI TENGAH	Prosentase operator (termonitor)	33,33%	33,33%	33,33%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	28,57%	14,29%	28,57%	28,57%
	13 kab/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
27	SULAWESI SELATAN	Prosentase operator (termonitor)	33,33%	33,33%	33,33%	20,55%	28,77%	27,40%	23,29%	15,79%	22,81%	36,84%	24,56%
	24 kab/kota		100%	100%	100%	71%	100%	95%	81%	43%	62%	100%	67%
28	SULAWESI TENGGAH	Prosentase operator (termonitor)	27,78%	27,78%	44,44%	14,29%	57,14%	28,57%	0,00%	0,00%	27,27%	72,73%	0,00%
	14 kab/kota		63%	63%	100%	25%	100%	50%	0%	0%	38%	100%	0%
29	GORONTALO	Prosentase operator (termonitor)	37,50%	25,00%	37,50%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%
	6 kab/kota		100%	67%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	67%	100%	0%
30	SULAWESI BARAT	Prosentase operator (termonitor)	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	66,67%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
	6 kab/kota		50%	50%	100%	0%	100%	0%	50%	0%	0%	100%	100%
31	MALUKU	Prosentase operator (termonitor)	44,44%	5,56%	50,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	11 kab/kota		89%	11%	100%	33%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
32	MALUKU UTARA	Prosentase operator (termonitor)	25,00%	0,00%	75,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	10 kab/kota		33%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
33	PAPUA	Prosentase operator (termonitor)	37,50%	12,50%	50,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	29 kab/kota		75%	25%	100%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
34	PAPUA BARAT	Prosentase operator (termonitor)	33,33%	0,00%	66,67%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	13 kab/kota		50%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
	Rata-rata prosentase layanan operator (termonitor)		32,49%	25,92%	41,62%	20,54%	44,03%	16,81%	18,62%	18,74%	19,04%	46,95%	15,27%
	Rata-rata prosentase wilayah termonitor		74,24%	69,16%	87,88%	62,27%	85,63%	52,64%	55,75%	53,33%	52,94%	87,56%	42,81%

Keterangan: Rumusan penghitungan prosentase layanan operator selular yang termonitor adalah sebagai berikut:

- o Dalam melakukan penghitungan, diambil sampel provinsi dan sampel kabupaten/kota tiap-tiap provinsi. Metode *sampling* yang digunakan adalah *random sampling*.
- o Kemudian dihitung prosentase wilayah yang termonitor (jumlah kab/kota termonitor dibagi jumlah kab/kota yang disampling)
- o Selanjutnya, dihitung prosentase wilayah termonitor dari masing-masing operator per band untuk mengetahui porsi masing-masing operator pada tiap band frekuensi.

Rumusan :

Jumlah Termonitor : wilayah yang termonitor x 100%

Tabel 7.6 . Hasil Rekapitulasi Monitor Penggunaan Profil Radio Siaran Secara Nasional di Kabupaten/Kota Tahun 2015

No	KODE	PROPINSI	JML KAB/ KOTA	DISTRIBUSI KANAL KAB/ KOTA		KANAL			KANAL TERMO- NITOR	TAN- PA ISR
				ADA	TDK ADA	MP	ISR(%)	KOSONG		
1	11	Aceh	23	13	10	84	15	18%	69	11
2	12	Sumatera Utara	33	12	21	86	23	27%	63	0
3	13	Sumatera Barat	19	10	9	67	27	40%	40	2
4	14	Riau	12	10	2	76	15	20%	61	1
5	15	Jambi	11	8	3	56	20	36%	36	1
6	16	Sumatera Selatan	17	8	9	55	27	49%	28	0
7	17	Bengkulu	10	4	6	36	12	33%	24	0
8	18	Lampung	15	8	7	49	17	35%	32	0
9	19	Bangka Belitung	7	3	4	32	13	41%	19	0
10	21	Kepulauan Riau	7	3	4	26	13	50%	13	7
11	31	Dki Jakarta	6	5	1	24	24	100%	0	0
12	32	Jawa Barat	27	10	17	77	49	64%	28	27
13	33	Jawa Tengah	35	7	28	65	39	60%	26	0
14	34	Yogyakarta	5	1	4	17	15	88%	2	3
15	35	Jawa Timur	38	11	27	99	61	62%	38	17
16	36	Banten	8	3	5	17	8	47%	9	0
17	51	Bali	9	2	7	23	18	78%	5	0
18	52	Nusa Tenggara Barat	10	4	6	35	13	37%	22	9
19	53	Nusa Tenggara Timur	22	13	9	83	15	18%	68	1
20	61	Kalimantan Barat	14	9	5	65	14	22%	51	4
21	62	Kalimantan Tengah	14	6	8	46	12	26%	34	3
22	63	Kalimantan Selatan	13	7	6	59	20	34%	39	6
23	64	Kalimantan Timur	10	8	2	62	23	37%	39	2
24		Kalimantan Utara	5	4	1	22	5	23%	17	0
25	71	Sulawesi Utara	15	5	10	44	21	48%	23	0
26	72	Sulawesi Tengah	13	8	5	57	20	35%	37	1
27	73	Sulawesi Selatan	24	15	9	98	19	19%	79	1
28	74	Sulawesi Tenggara	14	5	9	42	6	14%	36	1
29	75	Gorontalo	6	2	4	25	14	56%	11	0

30	76	Sulawesi Barat	6	3	3	22	5	23%	17	4	0
31	81	Maluku	11	5	6	38	18	47%	20	12	0
32	82	Maluku Utara	10	2	8	19	5	26%	14	4	0
33	91	Papua	29	9	20	63	16	25%	47	13	3
34	92	Papua Barat	13	3	10	28	3	11%	25	2	0
		Total	511	226	285	1,697	625	37%	1,072	566	100

7.1.2. Penertiban Frekuensi

Rekapitulasi pelanggaran teridentifikasi dan tindakan penertibannya disajikan pada tabel 7.7 di bawah ini, kemudian Gambar 7.1A menyajikan data komposisi jenis pelanggaran penggunaan frekuensi pada tahun 2015. Gambar 7.1B menyajikan jenis tindakan yang diberikan oleh UPT Monfrek atas pelanggaran yang terjadi selama tahun 2015, dan Gambar 7.2 menyajikan data sebaran jenis pelanggaran dan penertiban penggunaan frekuensi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

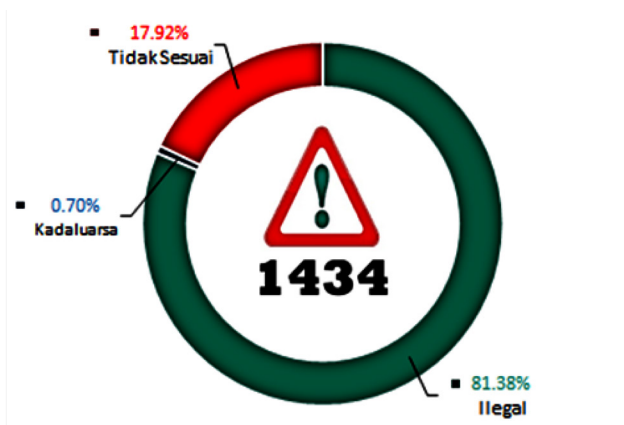
Tabel 7.7. Rekapitulasi Penertiban Spektrum oleh Masing-Masing UPT Tahun 2015

No	UPT	Pelanggaran				Tindakan			
		Illegal	Kada luarsa	Tidak Sesuai	Jumlah	Peringatan	Segel	Sita	Jumlah
1	Aceh	3	0	0	3	3	0	0	3
2	Medan	1	0	25	26	18	8	0	26
3	Pekanbaru	24	0	1	25	0	25	0	25
4	Batam	95	0	15	110	108	0	2	110
5	Jambi	18	3	22	43	35	7	1	43
6	Padang	62	0	0	62	29	31	2	62
7	Palembang	18	1	0	19	19	0	0	19
8	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pangkalpinang	30	0	3	33	26	7	0	33
10	Lampung	7	0	3	10	10	0	0	10
11	Banten	4	0	0	4	1	3	0	4
12	Jakarta	76	3	27	106	105	0	1	106
13	Bandung	35	0	12	47	34	12	1	47
14	Semarang	21	0	0	21	0	0	21	21
15	Yogyakarta	185	1	2	188	188	0	0	188

BAB TUJUH

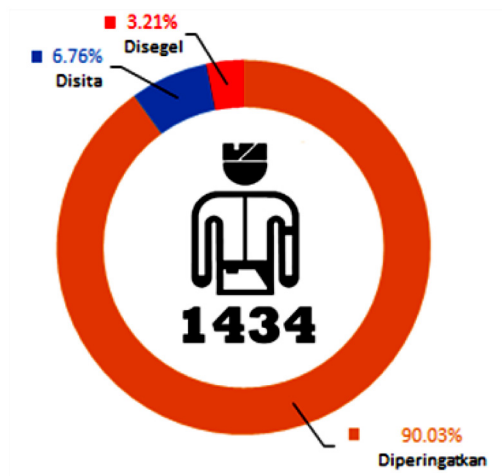
BIDANG PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT

16	Surabaya	26	0	0	26	26	0	0	26
17	Denpasar	152	0	27	179	177	0	2	179
18	Mataram	16	0	0	16	16	0	0	16
19	Kupang	4	0	3	7	7	0	0	7
20	Banjarmasin	69	0	0	69	69	0	0	69
21	Pontianak	35	0	4	39	32	2	5	39
22	Palangkaraya	16	1	0	17	15	0	2	17
23	Balikpapan	12	0	2	14	14	0	0	14
24	Samarinda	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Makassar	53	0	55	108	108	0	0	108
26	Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mamuju	76	1	0	77	75	2	0	77
28	Palu	102	0	47	149	149	0	0	149
29	Manado	9	0	5	14	5	0	9	14
30	Gorontalo	8	0	0	8	8	0	0	8
31	Ternate	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Ambon	10	0	4	14	14	0	0	14
33	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Merauke	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Manokwari	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Sorong	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Tahuna	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.167	10	257	1.434	1.291	97	46	1.434

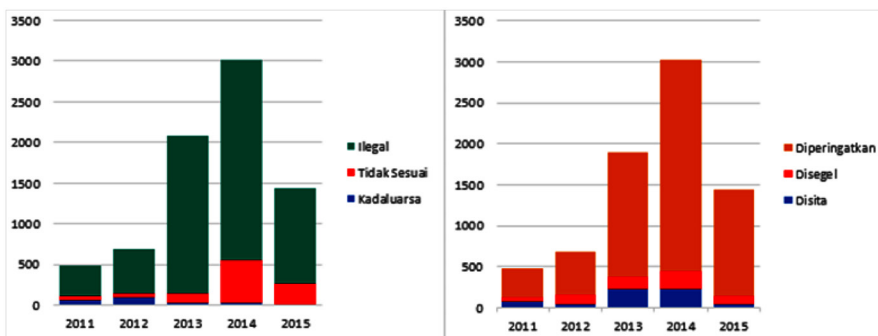


Gambar 7.1A Komposisi Jenis Pelanggaran Tahun 2015

Berdasarkan Gambar 7.1A, jenis pelanggaran penggunaan frekuensi yang teridentifikasi ada sebanyak 1.434 pelanggaran yang terdiri atas 81,38% adalah frekuensi yang ilegal, 17,92% frekuensi yang tidak sesuai, dan 0,70% sisanya adalah ijin frekuensi yang kadaluarsa. Sementara itu, berdasarkan Gambar 7.1B, dari 1434 pelanggaran frekuensi, 90,03% sudah diberikan tindakan penertiban berupa peringatan, 6,76% berupa penyitaan, dan 3,21% disegel.



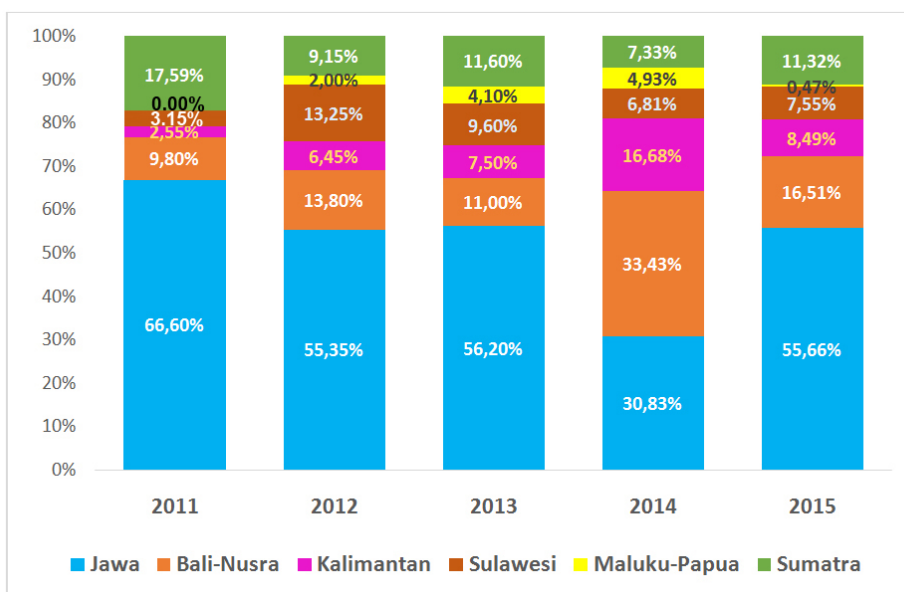
Gambar 7.1B Komposisi Jenis Tindakan Penertiban Tahun 2015



Gambar 7.2. Sebaran Jenis Pelanggaran dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Tahun 2011 s.d. 2015

7.1.3. Laporan Gangguan Frekuensi

Tabel 7.8 menyajikan data jumlah gangguan frekuensi berdasarkan jenis layanan per-UPT selama tahun 2015. Gambar 7.3 menyajikan data distribusi laporan adanya gangguan frekuensi menurut pulau besar pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Gambar 7.4 menyajikan jumlah gangguan frekuensi menurut jenis layanan frekuensi pada tahun 2015. Gambar 7.5 menyajikan distribusi gangguan frekuensi menurut jenis layanan di pulau besar pada tahun 2015.

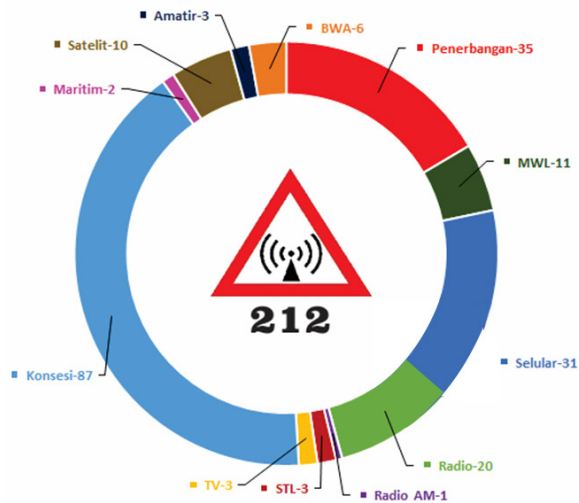


Gambar 7.3. Distribusi Temuan Gangguan Frekuensi Menurut Pulau Besar pada Tahun 2011 s.d. 2015

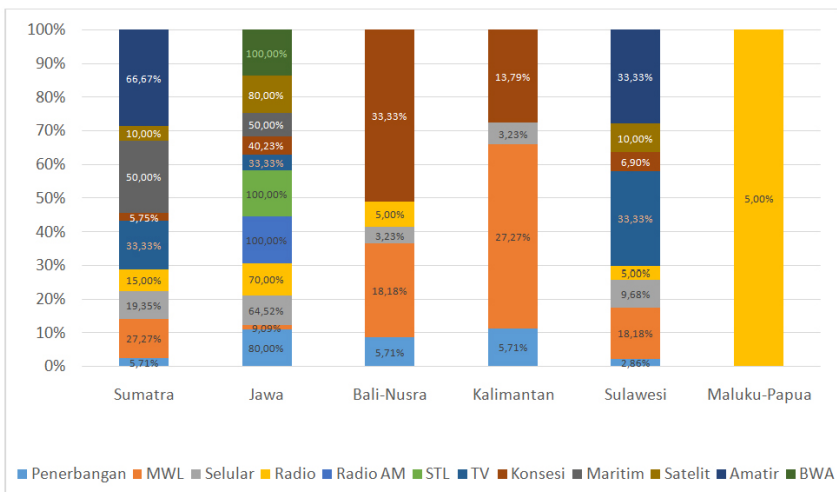
Tabel 7.8. Jumlah Gangguan Frekuensi Berdasarkan Jenis Layanan per-UPT Tahun 2015

No	UPT	Sub-Service Yang Terganggu										Penanganan					
		Pener-bangan	MWL	Selu-lar	Ra-dio	Radio AM	STL	TV	Konse-si	Mari-tim	Satelit	Am-atir	BWA	Ad-uan	Sele-sai	Not Clear	%
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	100,00
2	Medan	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	1	75,00
3	Pekanbaru	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100,00
4	Batam	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	7	7	0	100,00
5	Jambi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100,00
6	Padang	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	4	3	1	75,00
7	Palembang	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100,00
8	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	Pangkalpinang	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100,00
10	Lampung	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100,00
11	Banten	8	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	100,00
12	Jakarta	3	0	3	1	0	0	0	6	0	6	0	0	19	18	1	95,00
13	Bandung	9	0	6	5	1	2	1	4	0	0	0	4	32	32	0	100,00
14	Semarang	1	0	4	2	0	0	0	3	0	1	0	0	11	10	1	91,00
15	Yogyakarta	1	0	6	0	0	0	0	10	0	0	0	0	17	16	1	94,00
16	Surabaya	6	0	1	3	0	1	0	12	1	1	0	2	27	27	0	100,00
17	Denpasar	0	1	1	1	0	0	0	28	0	0	0	0	31	27	4	87,00
18	Mataram	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	100,00
19	Kupang	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100,00





Gambar 7.4. Jumlah Gangguan Frekuensi Menurut Jenis Layanan Frekuensi pada Tahun 2015



Gambar 7.5. Distribusi Gangguan Frekuensi Menurut Jenis Layanan di Pulau Besar Tahun 2015

7.2. MONITOR DAN PENERTIBAN PERANGKAT

Selain melakukan monitor terhadap penggunaan frekuensi, monitor juga dilakukan terhadap kesesuaian perangkat yang digunakan dengan standar atau ketentuan yang berlaku untuk tiga aspek, yaitu label alat/perangkat, keberadaan pemegang sertifikat alat/perangkat dan verifikasi layanan purna jual (*service center*) pemegang sertifikat alat/perangkat. Monitor juga dilakukan terhadap tingkat kepatuhan dalam penggunaan alat/perangkat khususnya perangkat untuk radio siaran dan televisi siaran. Dalam hal ini, kepatuhan tersebut dilihat dari sisi kepemilikan sertifikat perangkat oleh penyelenggara radio siaran dan televisi siaran.

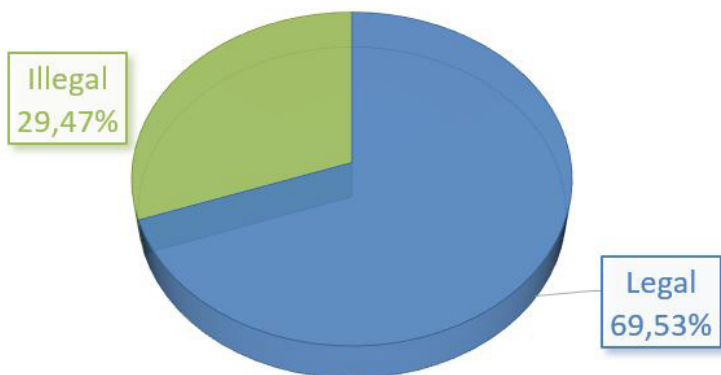
7.2.1. Monitor Sertifikasi Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pada subbab ini disajikan data monitor sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi pada tahun 2015. Tabel 7.9 menyajikan data hasil verifikasi/pengecekan standardisasi perangkat pos dan telekomunikasi pada tahun 2015. Gambar 7.6 menyajikan tingkat kepatuhan sertifikat dan label alat dan perangkat oleh vendor/user pada tahun 2015. Gambar 7.7 menyajikan tingkat kepatuhan sertifikat dan label alat dan perangkat menurut jenis perangkat pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Pada Tabel 7.10 disajikan hasil kegiatan penertiban alat dan perangkat pos dan telekomunikasi tahun 2015. Hasil monitor perdagangan *online* alat dan perangkat pos dan telekomunikasi dan situs perdagangan *online* pada tahun 2015 tersaji pada Tabel 7.11 dan Tabel 7.12.

Tabel 7.9. Verifikasi/Pengecekan Standardisasi Perangkat Pos dan Telekomunikasi Tahun 2015

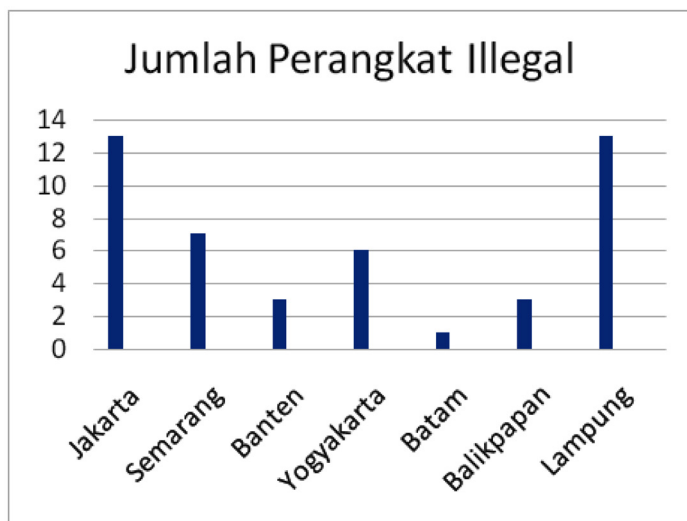
NO	Lokasi Monitor	Jumlah Sasaran	Hasil Monitor (Sesuai Kelompok Alat/Perangkat Telekomunikasi)						Jumlah Total Perangkat				Prosentase Kepatuhan (%)
			Bersertifikat			Tidak Bersertifikat							
		Distributor	User	CPE	Akses	Jaringan	CPE	Akses	Jaringan	Termonitor	Legal	Illegal	
1	Jakarta	6	-	0	0	0	13	0	0	13	0	13	0,00
2	Semarang	20	-	2	0	2	2	2	3	11	4	7	36,36
3	Banten	5	-	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0,00
4	Yogyakarta	16	-	0	0	0	0	2	4	6	0	6	0,00
5	Batam	12	1	98	0	0	1	0	0	99	98	1	98,98
6	Balikpapan	1	3	0	0	0	6	0	0	6	3	3	50,00
7	Lampung	13	-	0	0	0	13	0	0	13	0	13	0,00
Jumlah		51	4	92	0	2	35	7	7	151	105	46	69,53

**PERSENTASE TINGKAT KEPATUHAN SERTIFIKASI
ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**



Gambar 7.6. Tingkat Kepatuhan Sertifikat dan Label Alat dan Perangkat Tahun 2015

102



Gambar 7.7. Tingkat Kepatuhan Sertifikat dan Label Alat dan Perangkat Menurut Kota/Daerah pada Tahun 2015

Tabel 7.10. Hasil Kegiatan Penertiban Alat dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi Tahun 2015

NO	KOTA/ KAB	TARGET OPERASI	BARANG BUKTI	JENIS BARANG BUKTI										TINDAKLANJUT		KET	
				HP	REP	JAMMER	HT/ RIG	RAKIT	FM	MARINE	GPS	SIMBOX	TEL	LAIN-2	PERINGATAN		P.21
1	BANTEN	9	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	8	1/FM	
2	JAKARTA	10	12	-	-	-	-	-	3	-	-	9	-	-	10	0	
3	JOGJA- KARTA	6	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1/ REP	
4	SEMA- RANG	9	25	15	3	2	2	1	1	-	1	-	-	-	8	1/ REP	
5	BATAM	6	34	7	-	-	10	-	-	-	17	-	-	-	6	0	
6	BALIKPA- PAN	6	17	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	6	0	
JUMLAH		46	99	22	4	2	22	2	14	17	3	9	-	4	43	3	

Tabel 7.11. Hasil Monitor Perdagangan Online Alat dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi Tahun 2015

No	Nama Perangkat	Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Total	
		Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal	Le- gal	Ile- gal
1	Jammer	0	24	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0	37
2	Radio Komunikasi	60	35	22	47	123	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	4	78	209	381
3	Repeater	21	34	0	0	0	4	0	1	0	0	0	3	0	0	9	3	0	0	0	0	30	45
4	Simbox	14	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	20
5	Telepon Satelit	6	6	2	5	0	1	0	16	7	0	3	0	7	9	0	0	22	5	36	25	83	67
6	Telepon Selular	1	17	2	27	15	31	0	16	0	24	0	14	0	19	0	35	106	72	54	34	178	289
7	DII	1	3	5	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18
Total		103	138	31	93	138	151	0	34	7	24	3	19	7	29	9	47	128	185	94	137	520	857

Tabel 7.12. Hasil Monitor Situs Perdagangan *Online* Tahun 2015

No	Monitor Toko <i>Online</i>	April	Mei	Juni	Total
1	Toko <i>Online</i> Termonitor	27	20	13	60
2	Toko Terindikasi Menjual ilegal	12	9	1	22
3	Situs Penjual Ilegal Teridentifikasi	7	1	0	8
4	Tindakan Peringatan	7	2	0	9
5	Toko <i>Online</i> yang patuh	7	0	0	7
6	Toko <i>Online</i> yang tidak patuh	0	2	0	2
Total		60	34	14	108

7.3. KONDISI SISTEM MONITOR FREKUENSI RADIO DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SDPPI

105

Pada subbab ini juga disajikan data terkait kondisi Sistem Monitor Frekuensi Radio (SMFR) dan kondisi jaringan Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS).

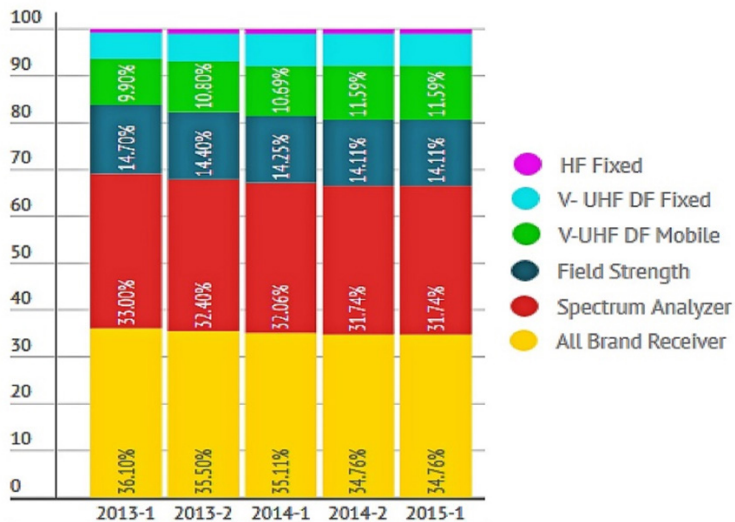
7.3.1. Kondisi Sistem Monitor Frekuensi Radio (SMFR)

Kondisi sistem monitor frekuensi radio yang dimiliki oleh UPT Monfrek dapat terlihat dari jumlah petugas/pegawai yang ada di UPT Monfrek tersebut dan perangkat monitor yang dimiliki serta jenis layanan stasiun monitor yang diberikan. Kondisi sistem monitor frekuensi radio secara keseluruhan tersaji pada Tabel 7.13, Gambar 7.8, Tabel 7.14, dan Tabel 7.15

Tabel 7.13. Rekapitulasi Hasil Kondisi Perangkat Spektrum Frekuensi pada Tahun 2015

No	UPT	All Band Receiver	Spectrum Analyzer	Field Strength Meter	V-UHF Mobile MON-DF	Portable DF	L-SHF Fixed MON	L-SHF Fixed MON-DF	HF Fixed MON-DF
1	ACEH	5	4	4	3	2	0	0	0
2	MEDAN	4	3	1	2	1	0	3	1
3	PADANG	6	4	2	1	1	0	0	0
4	PEKANBARU	2	5	2	2	1	2	3	0
5	BATAM	4	3	4	2	1	1	3	0
6	JAMBI	1	2	1	1	1	0	0	0
7	BENGKULU	8	6	2	1	1	0	0	0
8	PALEMBANG	4	5	2	2	1	3	3	0
9	PANGKAL PINANG	2	4	1	1	1	0	0	0
10	LAMPUNG	3	5	1	1	1	0	0	0
11	JAKARTA	15	8	3	2	4	0	4	0
12	BANDUNG	3	3	1	2	1	1	3	0
13	SEMARANG	3	4	0	1	1	3	3	0
14	YOGYAKARTA	8	6	4	2	1	3	3	0
15	SURABAYA	12	7	2	2	1	3	3	0
16	BANTEN	6	3	2	2	1	1	3	1
17	DENPASAR	2	3	2	2	1	0	3	0

18	MATARAM	6	5	0	1	1	0	0	0	0
19	KUPANG	1	3	2	2	1	0	0	0	1
20	PONTIANAK	5	6	2	2	1	0	0	0	0
21	BANJARMASIN	1	5	1	1	2	0	0	0	0
22	PALANGKA RAYA	6	6	2	2	2	0	0	0	0
23	SAMARINDA	1	3	0	2	1	0	0	0	1
24	BALIKPAPAN	2	2	1	1	1	0	0	0	0
25	MAKASAR	1	2	1	1	1	0	0	0	0
26	PALU	2	2	2	2	1	0	0	0	0
27	KENDARI	3	3	2	1	1	0	0	0	0
28	GORONTALO	4	3	2	1	1	0	0	0	0
29	MANADO	7	6	3	1	3	0	0	0	0
30	MAMUJU	2	1	0	0	2	0	0	0	0
31	TERNATE	1	1	1	1	1	0	0	0	0
32	AMBON	3	2	0	1	2	0	0	0	0
33	JAYAPURA	4	3	1	1	1	0	0	0	0
34	MERAUKE	3	3	2	1	1	0	0	0	1
35	SORONG	2	1	0	0	2	0	0	0	0
36	TAHUNA	2	1	0	0	1	0	0	0	0
37	MANOKWARI	2	1	0	0	1	0	0	0	0
		146	134	56	50	48	17	34	5	



Gambar 7.8. Komposisi Perangkat Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2015

108

Tabel 7.14. Kondisi Perangkat Spektrum Frekuensi Stasiun V-UHF Tahun 2015

UPT Stasiun V-UHF	Pengadaan Tahun	Prosentase
		% Hari Perangkat dalam Kondisi Baik
Surabaya	2009	86%
Denpasar	2010	91%
Batam	2010	100%
Semarang	2011	14%
Banten	2011	50%
Pekanbaru	2011	88%
Jakarta	2012	80%
Bandung	2012	100%
Medan	2013	50%
Makassar	2013	100%
Rata-rata		76%

Tabel 7.15. Kondisi Sumber Daya dan Beban Kerja Masing-Masing UPT Monitor Frekuensi di Indonesia Tahun 2015

No	UPT	Jumlah Pegawai		Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kondisi Geografis	Perangkat Monitor yang Dimiliki	Jenis layanan Stasiun Monitor
		Total	PPNS					
1	UPT NAD	22	4	57.956,00	4.626.605	Daratan	MOB: 2	MOB: H/V/UHF
2	UPT MEDAN	35	6	72.981,23	13.327.196	Daratan	FIX : 4	FIX : L/H/V/UHF
3	UPT PADANG	25	5	42.012,89	4.908.172	Daratan	MOB: 3	MOB: H/V/UHF
4	UPT PEKANBARU	20	7	87.023,66	6.030.685	Daratan	MOB: 4	MOB: H/V/UHF
5	UPT JAMBI	23	5	50.058,16	3.207.107	Daratan	FIX : 6	FIX : H/V/UHF
6	UPT BABEL	16	5	16.424,06	1.247.143	Daratan	MOB: 2	MOB: V/UHF
7	UPT BATAM	24	8	8.201,72	1.828.428	Kepulauan	PORT : 1	MOB: V/UHF
8	UPT PALEMBANG	27	9	91.492,43	7.810.779	Daratan	MOB: 2	MOB: V/UHF
9	UPT BENGKULU	17	6	19.919,33	1.818.933	Daratan	FIX : 5	FIX : V/UHF
10	UPT LAMPUNG	20	9	34.623,80	7.787.483	Daratan	MOB: 4	MOB: H/V/UHF
11	UPT DKI JAKARTA	38	12	664,01	9.640.481	Daratan	MOB: 4	MOB: H/V/UHF
12	UPT BANTEN	29	7	9.662,92	11.325.707	Daratan	FIX : 6	FIX : V/UHF/L/HF
13	UPT BANDUNG	38	9	35.377,76	44.819.456	Daratan	MOB: 2	MOB: V/UHF
14	UPT YOGYAKARTA	38	11	3.133,15	3.507.458	Daratan	FIX : 5	FIX : V/UHF
15	UPT SEMARANG	43	13	32.800,69	32.994.312	Daratan	MOB: 3	MOB: H/V/UHF
16	UPT SURABAYA	40	12	47.799,75	38.003.268	Daratan	FIX : 7	FIX : V/UHF
17	UPT DENPASAR	29	9	5.780,06	3.993.363	Daratan	MOB: 4	MOB: H/V/UHF
18	UPT MATARAM	27	7	18.572,32	4.665.510	Daratan	FIX : 4	FIX : V/UHF
19	UPT KUPANG	29	9	48.718,10	4.838.716	Daratan dengan Kepulauan	MOB: 2	MOB: V/UHF
20	UPT SAMARINDA	21	9	204.534,34	3.755.635	Daratan	FIX : 1	FIX : L/HF
21	UPT BALIKPAPAN	20	5			Daratan	MOB: 2	MOB: V/UHF
22	UPT PONTIANAK	22	4	147.307,00	4.599.624	Daratan	MOB: 2	MOB: H/V/UHF
23	UPT PALANGKARAYA	18	3	153.564,50	2.346.350	Daratan	MOB: 2	MOB: V/UHF
24	UPT BANJARMASIN	18	5	38.744,23	3.732.550	Daratan	MOB: 2	MOB: V/UHF
25	UPT MANADO	22	8	13.851,64	2.331.395	Daratan	MOB: 3	MOB: H/V/UHF
26	UPT TAHUNA	7	1			Kepulauan	MOB: 3	MOB: H/V/UHF
27	UPT PALU	19	7	61.841,29	2.772.189	Daratan Pegunungan	-	-
28	UPT MAKASSAR	35	9	63.504,66	8.275.996	Daratan	MOB: 5	MOB: H/V/UHF
29	UPT AMBON	15	4	46.914,03	1.535.961	Kepulauan	FIX : 3	FIX : L/H/V/UHF

30	UPT GORONTALO	11	2	11.257,07	1.073.504	Daratan Pegunungan	PORT : 1	MOB : V/UHF
31	UPT TERNATE	13	5	31.982,50	1.048.077	Kepulauan	PORT : 1	MOB : V/UHF
							MOB: 1	
32	UPT KENDARI	15	5	38.067,70	2.375.454	Daratan	PORT : 1	MOB : V/UHF
							MOB: 1	
33	UPT JAYAPURA	18	7	319.036,10	3.018.788	Daratan Pegunungan	MOB: 4	MOB : H/V/UHF
34	UPT MERAUKE	12	5				FIX : 1	FIX : L/HF
							MOB: 2	MOB : HF
35	UPT SORONG	8	1	97.024,27	810.182	Daratan Pegunungan	-	-
36	UPT MANOKWARI	5	2				-	-
37	UPT MAMUJU	8	1	16.796,19	1.221.587	Daratan	-	-

7.3.2. Kondisi Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS)

Pada Tabel 7.16 tersaji data terkait persentase fungsi dan operasional modul aplikasi SIMS yang diakses oleh user yang meliputi Spectra Tools, H2H, e-Licensing Tahun 2015. Sedangkan pada Tabel 7.17 tersaji data terkait ketersediaan jaringan SIMS dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2015.

Tabel 7.16 Prosentase fungsi dan operasional modul aplikasi SIMS Tahun 2015

NO.	MODUL APLIKASI	PROSENTASE	KETERANGAN
1	SPECTRA TOOLS	95%	± 144 jam down (db down)
2	H2H	95%	
3	E LICENSING	95%	

Tabel 7.17. Ketersediaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) Tahun 2015

NO.	LAYANAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	JARINGAN	99%	< 87,6 Jam (termasuk hari libur)
2	DATABASE	95%	± 144 jam down
3	APLIKASI	95%	± 144 jam down
4	PERANGKAT	95%	± 144 jam down





8

BIDANG STANDARDISASI PERANGKAT

Bab ini berisi tentang penyajian data dari kegiatan bidang standardisasi perangkat telekomunikasi yang menjadi salah satu bidang tugas dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika di Direktorat Jenderal SDPPI. Data yang disajikan adalah data hasil penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi

Penggunaan perangkat telekomunikasi harus sesuai dengan standard teknis yang ditetapkan oleh pemerintah maupun Internasional. Perlunya penggunaan standard teknis tersebut yaitu:

1. Melindungi jaringan telekomunikasi nasional
2. Menjamin keterhubungan dalam lingkungan multioperator
3. Mencegah interferensi pada penggunaan frekuensi radio
4. Melindungi masyarakat
5. Mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri

112

8.1. PENERBITAN SERTIFIKAT

Penerbitan sertifikat alat dan perangkat Telekomunikasi merupakan salah satu ukuran kinerja dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika. Penerbitan sertifikat alat dan perangkat Telekomunikasi dilakukan pada alat dan perangkat yang telah melalui proses pengujian. Proses sertifikasi alat dan perangkat merupakan implementasi terhadap standar persyaratan teknis yang telah dibuat oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika bersama *stakeholder* terkait.

8.1.1. Perkembangan Penerbitan Sertifikat Alat dan Perangkat

Pada sub bab ini disajikan perkembangan penerbitan sertifikat alat dan

perangkat pada rentang tahun 2011 sampai dengan semester-2 tahun 2015. Tabel 8.1 menyajikan data jumlah penerbitan sertifikat pada tahun 2011 sampai dengan semester 2 tahun 2015.

Tabel 8.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Jenis Permohonan Sertifikat pada Tahun 2011 s.d. 2015

Tahun		Jenis Permohonan Sertifikat				Jumlah
		Baru	Perpanjangan	Revisi	Perpanjang dan revisi	
2011	1	2.071	222	88	55	2.436
	2	2.625	220	10	57	2.912
2012	1	2.141	307	169	0	2.617
	2	2.527	397	80	0	3.004
2013	1	2.505	438	117	17	3.077
	2	2.998	569	113	60	3.740
2014	1	2.596	505	95	91	3.287
	2	2.600	372	53	53	3.078
2015	1	2.906	461	97	26	3.490
	2	3.211	267	99	44	3.621

8.1.2. Penerbitan Sertifikat Menurut Kelompok Jenis Perangkat

Berdasarkan jenis perangkat yang disertifikasi, terdapat 5 (lima) jenis perangkat, yaitu perangkat Pelanggan (CPE) Kabel, perangkat Pelanggan (CPE) Nirkabel, perangkat Transmisi, perangkat Penyiaran, dan perangkat Sentral. Jumlah penerbitan sertifikat menurut jenis perangkat pada semester 2 tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat pada Semester 2 Tahun 2015

Jenis Permohonan Sertifikat		Jenis Perangkat					Total
		Perangkat Pelanggan (CPE) Kabel	Perangkat Pelanggan (CPE) Nirkabel	Transmisi	Penyiaran	Sentral	
Baru	Jumlah	98	2.242	834	18	19	3.211
	%	3,05	69,82	25,97	0,56	0,59	100,00
Perpanjangan	Jumlah	46	122	90	5	4	267
	%	17,22	45,69	33,70	1,87	1,49	100,00

Revisi	Jumlah	3	21	74	1	0	99
	%	3,03	21,21	74,74	1,01	0,00	100,00
Perpanjangan dan Revisi	Jumlah	2	25	16	0	1	44
	%	4,54	56,81	36,36	0,00	2,72	100,00
Total	Jumlah	149	2.410	1014	24	24	3.621
	%	4,15	66,56	28,01	0,67	0,67	100,00

Tabel 8.3. Penerbitan Sertifikat Bulanan Menurut Jenis Permohonan Sertifikat dari Tahun 2013 s.d. Semester 2 Tahun 2015

Bulan	Baru			Perpanjangan			Revisi			Perpanjangan dan Revisi		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Januari	359	367	571	39	67	81	10	25	17	0	13	5
Februari	440	438	500	72	62	52	19	8	21	0	18	9
Maret	421	445	411	55	97	117	12	38	26	0	20	4
April	416	487	455	123	75	92	14	11	9	0	15	1
Mei	487	404	445	61	130	52	60	2	8	0	13	3
Juni	382	455	524	88	74	67	19	11	16	0	12	4
Jumlah Sem 1	2.505	2.596	2.906	438	505	461	134	95	97	-	91	26
Juli	508	378	395	102	69	63	8	5	5	14	3	4
Agustus	290	458	466	47	74	44	4	15	35	7	22	5
September	493	354	458	113	29	47	9	12	4	11	8	0
Oktober	502	495	539	107	81	25	31	4	7	12	6	6
November	482	457	483	64	67	42	5	11	22	8	6	7
Desember	723	458	870	136	52	46	39	6	26	25	8	22
Jumlah Sem 2	2.998	2.600	3.211	569	372	267	96	53	99	77	53	44
Total	5.503	5.196	6.117	1.007	877	728	230	148	196	77	144	70

8.1.3. Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Perangkat

Pada subbagian ini disajikan data penerbitan sertifikat menurut negara asal alat dan perangkat. Penyajian data tersebut dapat menggambarkan distribusi jumlah alat dan perangkat yang disertifikasi menurut negara asal alat dan perangkat, serta fluktuasi bulanan penerbitan sertifikat perangkat untuk masing-masing jenis permohonan sertifikat.

Data jumlah sertifikat per semester menurut negara asal dari tahun 2011 sampai dengan semester 2 2015 tersaji pada Tabel 8.4. Sedangkan pada Tabel 8.5 tersaji

data jumlah dan persentase sertifikat menurut jenis permohonan sertifikat dan negara asal perangkat pada semester-12 tahun 2015. Data jumlah dan persentase penerbitan sertifikat menurut jenis perangkat dan negara asal pada semester 2 tahun 2015 terdapat pada Tabel 8.6.

Tabel 8.4. Jumlah Sertifikat Menurut Negara Asal Tahun 2011 sampai dengan Semester 2 Tahun 2015

No	Negara	2011		2012		2013		2014		2015	
		Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
1	Tiongkok	1.533	1.801	1.320	1.972	2.008	2.563	2.168	1.916	2.143	2.317
2	Indonesia	27	37	17	32	15	24	75	90	247	200
3	Jepang	119	103	70	139	167	160	201	186	198	177
4	Malaysia	26	84	42	69	76	81	78	104	178	107
5	Amerika Serikat	191	203	106	195	149	164	238	154	139	159
6	Vietnam	0	0	26	76	43	53	65	84	91	89
7	Taiwan	0	222	92	131	95	130	111	89	79	89
8	Korea Selatan	53	67	55	53	49	41	45	51	65	55
9	Inggris	0	0	19	51	0	18	16	34	43	34
10	Jerman	28	29	17	58	49	42	26	35	38	59
11	Italia	47	30	29	45	13	44	24	24	35	13
12	Meksiko	58	118	127	218	114	72	29	41	33	59
13	Swedia	35	24	45	43	27	57	12	20	29	21
14	Kanada	0	0	49	59	41	41	13	9	7	15
15	Hongkong	30	10	0	57	18	10	27	11	5	9
16	Hungaria	0	0	33	43	0	9	4	5	4	5
17	Lainnya	203	270	126	227	213	231	155	225	156	213
Total		2.350	2.998	2.173	3.468	3.077	3.740	3.287	3.078	3.490	3.621

Tabel 8.5. Jumlah dan Persentase Sertifikat Menurut Jenis Permohonan Sertifikat dan Negara Asal Perangkat pada Semester 2 Tahun 2015

No	Negara Asal/ Buatan	Jenis Permohonan Sertifikat										Total	%
		Baru		Perpanjangan		Revisi		Revisi dan Perpanjangan					
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%				
1	Tiongkok	2.055	60,67	156	64,43	92	80,41	14	19,23		2.317	61,40	
2	Indonesia	195	8,16	2	0,65	0	2,06	1	19,23		200	7,08	
3	Jepang	142	5,61	23	6,94	1	0,00	11	11,54		177	5,67	
4	Malaysia	96	5,37	8	4,34	0	1,03	3	3,85		107	5,10	
5	Amerika Serikat	139	3,85	14	5,21	2	1,03	4	7,69		159	3,98	
6	Vietnam	85	3,06	4	0,43	0	0,00	0	0,00		89	2,61	
7	Taiwan	83	2,37	5	2,17	0	0,00	1	0,00		89	2,26	
8	Korea Selatan	55	1,96	0	0,65	0	5,15	0	0,00		55	1,86	
9	Inggris	28	1,17	5	1,95	0	0,00	1	0,00		34	1,23	

10	German	52	0,83	5	2,17	1	0,00	1	15,38	38	1,09
11	Itali	7	0,45	6	4,12	0	0,00	6	11,54	13	1,00
12	Meksiko	55	1,10	2	0,22	0	0,00	2	0,00	59	0,95
13	Swedia	20	0,55	1	1,30	0	7,22	0	0,00	21	0,83
14	Kanada	12	0,17	3	0,43	0	0,00	0	0,00	15	0,20
15	Hongkong	4	0,07	5	0,65	0	0,00	0	0,00	9	0,14
16	Hungaria	4	0,14	1	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,11
17	Lainnya	130	4,47	20	4,34	3	3,09	3	11,54	213	4,47
Total		2.906	100,00	461	100,00	97	100,00	26	100,00	3.490	100,00

Tabel 8.6. Jumlah dan Persentase Penerbitan Sertifikat Menurut Jenis Perangkat dan Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2015

No	Negara Asal/ Buatan	Jenis Perangkat												Total	%
		CPE Kabel		CPE Nirkabel		Transmisi		Penyiaran		Sentral					
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%				
1	Tiongkok	92	66,19	1.490	64,70	548	55,24	0	0,00	13	52,00	2.143	61,40		
2	Meksiko	0	0,00	21	0,91	12	1,21	0	0,00	0	0,00	33	0,95		
3	Amerika Serikat	4	2,88	34	1,48	95	9,58	4	12,90	2	8,00	139	3,98		
4	Taiwan	2	1,44	47	2,04	29	2,92	0	0,00	1	4,00	79	2,26		
5	Jepang	0	0,00	127	5,51	68	6,85	3	9,68	0	0,00	198	5,67		
6	Malaysia	15	10,79	137	5,95	26	2,62	0	0,00	0	0,00	178	5,10		
7	Korea Selatan	1	0,72	42	1,82	22	2,22	0	0,00	0	0,00	65	1,86		
8	Swedia	0	0,00	5	0,22	20	2,02	0	0,00	4	16,00	29	0,83		
9	Kanada	0	0,00	2	0,09	5	0,50	0	0,00	0	0,00	7	0,20		
10	Vietnam	8	5,76	83	3,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	91	2,61		
11	Jerman	2	1,44	16	0,69	14	1,41	4	12,90	2	8,00	38	1,09		
12	Itali	0	0,00	1	0,04	29	2,92	5	16,13	0	0,00	35	1,00		
13	Hungaria	0	0,00	4	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,11		
14	Inggris	1	0,72	12	0,52	28	2,82	2	6,45	0	0,00	43	1,23		
15	Hongkong	2	1,44	1	0,04	2	0,20	0	0,00	0	0,00	5	0,14		
16	Indonesia	1	0,72	218	9,47	23	2,32	5	16,13	0	0,00	247	7,08		
17	Lainnya	11	7,91	63	2,74	71	7,16	8	25,81	3	12,00	156	4,47		
Total		139	100,00	2.303	100,00	992	100,00	31	100,00	25	100,00	3.490	100,00		





9

**BIDANG PENGUJIAN ALAT
DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

Pada bab ini akan disajikan data yang bersumber dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT). Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BBPPT sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI adalah melakukan pengujian terhadap semua alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia.

Data statistik yang disajikan merupakan data pencapaian 3 (tiga) kegiatan utama yang dilakukan oleh BBPPT. Ketiga kegiatan tersebut adalah (1) penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) atas biaya pengujian yang dilakukan oleh BBPPT sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP); (2) kegiatan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang ditampilkan dalam bentuk Laporan Hasil Uji (LHU) atas alat dan perangkat telekomunikasi yang masuk dan dilakukan pengujian di BBPPT; (3) pengujian kalibrasi alat ukur, baik yang diajukan oleh internal unit kerja di Ditjen SDPPI maupun dari pihak luar yang mengajukan kepada BBPPT.

9.1. PROSEDUR PENGUJIAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang diterapkan oleh BBPPT secara garis besar dilandasi oleh 3 (tiga) tahapan proses pengujian yaitu:

- 1) Proses pengujian diawali dengan dikeluarkannya Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika yang diajukan oleh pemohon (pemilik alat/perangkat) dengan melengkapi persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan oleh BBPPT;
- 2) Dokumen permohonan pengujian selanjutnya diperiksa kelengkapan persyaratan pengujiannya. Setelah dinyatakan lengkap, BBPPT akan menerbitkan SP2 sebagai dasar bagi pemohon pengujian untuk membayar biaya pengujian sesuai dengan tarif yang diberlakukan. Pembayaran dilakukan

- langsung ke Kas Negara melalui Bank dan dicatat sebagai PNPB Ditjen SDPPI;
- 3) Proses penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) sebagai dokumen hasil pengujian terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang dilakukan oleh BBPPT. Selanjutnya LHU ini disampaikan ke Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

9.2. JUMLAH PENERBITAN SP2 PENGUJIAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Setelah BBPPT menerima SP3 dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika yang diajukan oleh pemohon (pemilik alat/perangkat), maka selanjutnya BBPPT akan menerbitkan SP2 yang harus dibayarkan oleh pemohon atas biaya jasa pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Data SP2 yang telah diterbitkan selama semester-2 tahun 2014 dan 2015 disajikan dalam Tabel 9.1. *Trend* perkembangan jumlah penerbitan SP2 selama lima tahun terakhir terdapat pada Tabel 9.2 dan Gambar 9.1.

121

Tabel 9.1. Perbandingan Jumlah dan Nilai SP2 pada Semester- 2 Tahun 2014 dan 2015

No	Bulan	Jumlah SP2		%	Nilai Pembayaran (Rp.)		%	Rata-Rata nilai per SP2 (Rp.)	
		2014	2015		2014	2015		2014	2015
1	Juli	233	143	-38,62	1.997.500.000	1.172.000.000	-41,32	8.572.961	8.195.804
2	Agustus	346	314	-9,24	2.080.000.000	2.603.000.000	25,14	7.365.607	8.289.808
3	September	305	271	-10,81	3.211.000.000	2.257.500.000	-26,69	7.532.787	8.330.258
4	Oktober	378	103	-72,75	2.550.500.000	659.000.000	-74,16	6.624.339	6.398.058
5	November	300	181	-39,67	2.594.000.000	1.481.500.000	-42,88	7.270.000	8.185.082
6	Desember	334	53	-84,13	1.892.000.000	375.000.000	-80,17	7.534.431	7.075.471
Total		1.896	1.065	-255,22	14.325.000.000	15.902.000.000	-240,08	7.483.354	7.745.746

Tabel 9.2. Perkembangan Jumlah Penerbitan SP2 per Bulan pada Semester-2
 Tahun 2012 s.d. 2015

Tahun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	Δ %
2012	301	275	279	299	268	279	1.671	19,15%
Δ %		-8,64%	1,45%	7,17%	-10,37%	4,10%		
2013	392	184	316	280	320	333	1.701	-1,09%
Δ %		-53,06%	71,74%	-11,39%	14,29%	4,06%		
2014	233	346	305	378	300	334	1.825	6,85%
Δ %		48,50%	-11,85%	23,93%	-20,63%	11,33%		
2015	143	314	271	103	181	53	1.896	2,69%
Δ %		119,58%	-13,69%	-61,99%	75,72%	-70,71%		
Total	1.069	1.119	1.171	1.060	1.069	999	1065	

9.2.1. Penerbitan SP2 Alat dan Perangkat Telekomunikasi menurut Negara Asal

Jumlah dan nilai pembayaran SP2 alat dan perangkat telekomunikasi menurut negara asal alat dan perangkat pada semester-2 tahun 2015 tersaji dalam Tabel 9.3.

Tabel 9.3. Jumlah dan Nilai Penerimaan SP2 Menurut Negara Asal pada Semester-2
 Tahun 2015 (Total 1650)

No	Negara	Jumlah SP2	% SP2	Nilai Pembayaran SP	% Nilai Pembayaran SP2
1	Tiongkok	1.028	62,30	8.388.500.000	96,69
2	Indonesia	143	8,67	1.709.000.000	14,19
3	Jepang	100	6,06	450.500.000	3,74
4	Amerika Serikat	83	5,03	568.500.000	4,72
5	Malaysia	60	3,63	250.000.000	2,07

6	Taiwan	35	2,12	150.000.000	1,97
7	Korea Selatan	21	1,27	156.500.000	1,30
8	Jerman	21	1,27	124.000.000	1,03
9	Vietnam	33	2,0	107.000.000	0,88
10	Thailand	25	1,51	86.000.000	0,71
11	Mexico	9	0,54	46.000.000	0,38
12	Inggris	10	0,60	55.000.000	0,38
13	Hongkong	3	0,15	13.000.000	0,06
14	Singapura	13	0,20	91.500.000	0,15
15	Perancis	16	0,55	128.000.000	0,86
16	Italia	11	0,81	102.000.000	0,78
17	Kanada	6	0,05	33.000.000	0,04
18	Finlandia	4	0,10	34.500.000	0,11
19	Belanda	10	0,45	60.000.000	0,32
	Total	1.985	100,00	12.036.000.000	100,00

9.2.2. Penerbitan SP2 Menurut Kategori Perangkat

Tabel 9.4 menyajikan komposisi penerbitan SP2 pada semester-2 tahun 2015 berdasarkan kategori dan negara asal alat dan perangkat telekomunikasi.

Tabel 9.4. Jumlah Penerbitan SP2 Menurut Kategori Perangkat dan Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2015

	Kategori Perangkat	Negara Asal																									
No		Tiongkok	Indonesia	Amerika Serikat	Jepang	Malaysia	Taiwan	Jerman	Thailand	Vietnam	Korea Selatan	Mexico	Inggris	Perancis	Kanada	Finlandia	Swedia	Hongkong	Hongaria	Italia	Lituania	Filipina	Rumania	Australia	Lainnya	Total	%
1	Antenna	30	0	12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	0	1	2	68	3,43
2	Base Station Controller (BSC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05
3	Base Transceiver Station (BTS)	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	16	0,81
4	Bluetooth	46	4	9	12	19	8	3	11	1	2	3	1	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	5	298	15,01
5	Faksimili	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1,31
6	IP Phone	6	0	0	0	2	0	1	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1,06
7	Media Gateway	26	0	8	2	0	3	2	0	2	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	48	2,42
8	Mobile Services Switching Center (MSC)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,15
9	Modem	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0,40
10	Multi-plexer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,10
11	PABX Analog (PSTN Base)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,10
12	PABX Digital (IP Base)	2	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,35
13	Pager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,30
14	Pemancar Radio Slang/ Repeater	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	0,60

125

26	Radar / Radio Lokasi	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.25
27	Radio Base Station (RBS)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.30
28	Radio Maritim	1	0	0	7	0	1	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0.81
29	Radio Microwave	5	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	27	1.36
30	Radio Trunking	1	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0.40	
31	Repeater	4	3	1	1	1	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0.91	
32	Router	16	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1.16	
33	Router + WLAN	18	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	1.11	
34	Terminal Radio Komunikasi Handheld	25	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1.61	
35	Terminal Radio Komunikasi Portable	1	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	17	0.86	
36	Terminal Satelit (Satellite Terminal)	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	0.55	
37	Very Small Aperture Terminal (VSAT)	0	0	9	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	0.96	
38	Wireless Local Area Network (LAN) Indoor	348	41	11	23	19	17	7	3	11	1	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	496	24.99	
39	Wireless Local Area Network (LAN) Outdoor	4	0	1	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.65	
	Total	1.194	199	88	107	60	49	37	29	33	34	15	12	11	5	2	24	3	2	16	2	5	2	4	52	1.985	100.00	
	%	60.15	10.03	4.43	5.39	3.02	2.47	1.86	1.46	1.66	1.71	0.76	0.60	0.55	0.25	0.10	1.21	0.15	0.10	0.81	0.10	0.25	0.10	0.20	2.62	100.00		

9.3. REKAPITULASI HASIL UJI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Setelah SP2 dibayar oleh pemohon melalui Bank sesuai dengan tarif yang berlaku, maka selanjutnya dilakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Hasil pengujian terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang dilakukan oleh BBPPT didokumentasikan dalam bentuk RHU. Dokumen RHU sebagai data hasil pengujian disampaikan ke Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Alat dan Perangkat. Data RHU terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang dilakukan sejak semester-2 tahun 2012 sampai dengan semester-2 tahun 2015 di BBPPT disajikan dalam Tabel 9.5.

Tabel 9.5. RHU pada Semester-2 Tahun 2012 s.d 2015

No	Periode	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	% Naik/ Turun
1	2012	301	275	279	299	268	279	1.071	
2	2013	392	184	316	280	320	333	1.825	7,29%
3	2014	261	245	290	296	272	311	1.694	-7,18%
4	2015	237	271	268	155	352	340	1.623	-4,19%

9.3.1. Hasil Pengujian Perangkat Menurut Negara Asal

Data RHU alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan negara asal alat dan perangkat yang dilakukan pada semester-2 tahun 2014 dan semester-2 tahun 2015 disajikan dalam Tabel 9.6.

9.3.2. Hasil Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Data tentang jumlah alat dan perangkat yang diuji pada semester-2 tahun 2015 di BBPPT berdasarkan kategori alat dan perangkat disajikan pada Tabel 9.7.

Tabel 9.6. RHU pada Semester-2 Tahun 2014 dan 2015 Berdasarkan Negara Produsen Alat dan Perangkat

No	Negara	Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Sem 2 2014	Sem 2 2015	Δ %	Proporsi (%)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015				2014	2015
1	Tiongkok	152	142	158	178	229	155	195	107	162	205	205	227	1.101	1.014	-23,46	67,42	63,79
2	Malaysia	3	0	5	0	17	0	7	0	14	1	12	8	68	9	-34,04	3,84	3,35
3	Taiwan	4	0	2	0	10	0	11	0	8	5	5	12	40	17	-67,57	3,78	2,64
4	Jepang	10	18	11	11	12	22	10	7	17	24	17	12	77	94	23,75	3,72	5,70
5	Indonesia	4	21	11	28	9	19	22	5	8	31	15	42	79	146	54,76	3,48	8,98
6	Amerika Serikat	10	10	4	8	9	19	3	7	5	13	6	11	37	68	-6,52	2,99	3,28
7	Vietnam	17	3	5	2	14	6	0	3	6	10	2	2	52	23	-65,52	2,93	2,07
8	Thailand	16	2	3	4	3	5	10	4	15	3	5	0	52	18	-133,33	2,56	1,28
9	Korea Selatan	6	1	4	1	4	2	3	6	3	3	6	2	36	15	-140,00	2,20	1,07
10	Jerman	2	6	2	7	2	9	2	3	4	6	10	1	22	32	65,63	0,67	2,28
11	Meksiko	2	0	4	1	4	2	5	0	5	1	4	3	20	7	-57,14	0,67	0,50
12	Swedia	0	1	6	0	6	1	4	3	3	3	3	0	17	8	0,00	0,49	0,57
13	Inggris	0	3	0	2	0	2	2	3	2	1	2	0	10	11	36,36	0,43	0,78
14	Italia	2	3	0	0	0	6	1	1	2	2	0	0	5	12	50,00	0,37	0,86
15	Perancis	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	3	5	80,00	0,06	0,36

Tabel 9.7. RHU Alat dan Perangkat Telekomunikasi pada Semester-2 Tahun 2015

No	Kategori Perangkat	Sem 2 2015
1	Antenna	34
2	Base Transceiver Station (BTS)	5
3	Bluetooth	61
4	Faksimili	1
5	IP Phone	2
6	Media Gateway	0
7	Modem	27
8	Multiplexer	1
9	PABX Analog (PSTN Base)	2
10	PABX Digital (IP Base)	6
11	Pemancar Radio Siaran/Repeater	5
12	Pemancar Televisi/Repeater	13
13	Penerima Satelit (Satellite Receiver)	41
14	Pengujian Radiated Electromagnetic Interference (EMI)	1
15	Pesawat Cordless Telepon/Telepon Tanpa Kabel Publik (TTKP)	10
16	Pesawat Daya Rendah	95
17	Pesawat Telepon Seluler 1 Band	2
18	Pesawat Telepon Seluler 2 Band	136
19	Pesawat Telepon Seluler 3 Band	103
20	Pesawat Telepon Seluler 4 Band	155
21	Pesawat/Key Telepon System (KTS) s.d 20 Port	1
22	Radar / Radio Lokasi	2
23	Radio Base Station (RBS)	4
24	Radio Maritim	5
25	Radio Microwave	6
26	Radio Trunking	8
27	Repeater	10
28	Router	13
29	Router + WLAN	12
30	Terminal Radio Komunikasi Handheld	25
31	Terminal Radio Komunikasi Portable	15
32	Terminal Satelit (Satellite Terminal)	5
33	Very Small Apperture Terminal (VSAT)	3
34	Wireless Local Area Network (LAN) Indoor	355
35	Wireless Local Area Network (LAN) Outdoor	10
Total		1.174

Tabel 9.8. Jumlah Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Diuji Menurut Kategori dan Negara Asal pada Semester-2 Tahun 2015

No	Nama Alat dan Perangkat	Negara Asal																Total					
		Tiongkok	Indonesia	Japan	Malaysia	Vietnam	Thailand	Taiwan	Amerika Serikat	Korea Selatan	Jerman	Mexico	Inggris	France	Hongkong	Swedia	Italy		Lituania	India	Hongaria	Filipina	Lainnya
1	Antenna	99	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	1	46
2	Base Transceiver Station (BTS)	21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
3	Bluetooth	517	105	9	26	6	15	9	13	6	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	232
4	Faksimili	26	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
5	IP Phone	6	0	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
6	Media Gateway	20	2	0	0	2	0	2	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
7	Modem	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
8	Multiplexer	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	PABX Analog (PSTN Base)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	PABX Digital (IP Base)	1	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
11	Pemancar Radio Siaran/Repeater	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5
12	Pemancar Televisi/Repeater	4	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	13
13	Penerima Satelit	16	5	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	41

[illegible]

27	Repeater	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10		
28	Router	9	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13		
29	Router + WLAN	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
30	Terminal Radio Komunikasi Handheld	33	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25		
31	Terminal Radio Komunikasi Portable	3	0	7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15		
32	Terminal Satelit (Satellite Terminal)	6	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5		
33	Very Small Aperture Terminal (VSAT)	10	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
34	Wireless Local Area Network (LAN) Indoor	692	77	19	17	8	2	13	6	1	7	1	0	0	0	0	2	4	355			
35	Wireless Local Area Network (LAN) Outdoor	7	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
Total		895	126	80	47	29	18	37	46	15	32	7	11	5	1	8	12	1	2	4	26	1.403

9.4. KALIBRASI ALAT UJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Jasa pelayanan lain yang diberikan oleh BBPPT adalah pelayanan untuk melakukan kalibrasi alat ukur/uji perangkat telekomunikasi. Tabel 9.9 menyajikan jumlah dan biaya pengujian kalibrasi yang dilakukan oleh BBPPT pada semester-2 tahun 2012 sampai dengan 2015.

Tabel 9.9. Jumlah dan Biaya Kalibrasi Alat Uji pada Semester-2 Tahun 2015

No	Nama Pemohon	Nama Alat	Biaya Kalibrasi Alat
			Sem-2 2015
1	PT. Tridaya Setiamanunggal	Spectrum Analyzer	2.500.000
2	PT. Tridaya Setiamanunggal	Spectrum Analyzer	2.500.000
3	Loka Monitor SFR Ambon	Spectrum Analyzer	2.500.000
4	Loka Monitor SFR Balikpapan	Spectrum Analyzer	2.500.000
5	Loka Monitor SFR Ambon	Spectrum Analyzer	2.500.000
6	Loka Monitor SFR Ambon	Spectrum Analyzer	2.500.000
7	PT. Primacom Interbuana	Spectrum Analyzer	2.500.000
8	PT. Tridaya Setiamanunggal	Spectrum Analyzer	2.500.000
9	PT. Primacom Interbuana	Spectrum Analyzer	2.500.000
10	Balmon Kelas II Bandung	Spectrum Analyzer	2.500.000
11	Balmon SFR Kelas II Batam	Spectrum Analyzer	2.500.000
12	Balmon SFR Kelas II Manado	Spectrum Analyzer	2.500.000
13	Balmon SFR Kelas II Manado	Spectrum Analyzer	2.500.000
14	Balmon SFR Kelas II Banten	Spectrum Analyzer	2.500.000
15	Balmon SFR Kelas II Banten	Spectrum Analyzer	2.500.000
16	Loka Monitor SFR Palangka Raya	Spectrum Analyzer	2.500.000
17	Loka Monitor SFR Palangka Raya	Spectrum Analyzer	2.500.000
Total			42.500.000

Pada Semester II Tahun 2015, seluruh kegiatan Kalibrasi Alat Uji dilakukan kepada satu alat, yaitu: *spectrum analyzer*. Kegiatan kalibrasi alat uji pada semester II Tahun 2015 berjumlah 17 kegiatan, dan nilai dari masing-masing kegiatan kalibrasi bernilai Rp 2.500.000,-, sehingga total seluruh biaya atas kegiatan kalibrasi alat uji yang dilakukan pada Semester II Tahun 2015 berjumlah Rp 42.500.000,-.





10

**EKONOMI BIDANG SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

Pada bab ini disajikan statistik ekonomi bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Bab ini dimulai dengan menyajikan statistik mengenai kontribusi sektor komunikasi yang meliputi bidang pos, telekomunikasi, dan informatika terhadap PDB. Subbab berikutnya membahas perkembangan PNBPN selama 5 (lima) tahun terakhir yang diperoleh dari berbagai kegiatan kementerian dan lembaga dalam pengelolaan berbagai sumber daya di Indonesia. Bagian selanjutnya membahas kontribusi Ditjen SDPPI dari penyediaan jasa sumber daya frekuensi dan industri perangkat pos dan telekomunikasi. Bagian terakhir dari bab ini adalah statistik perkembangan ekspor impor alat dan perangkat telekomunikasi berbasis pemanfaatan sumber daya frekuensi dan industri perangkat pos beserta industri lainnya.

10. 1. PERAN SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI DALAM PENDAPATAN NASIONAL

Berdasarkan lapangan usaha, nilai output dari jasa pos dan telekomunikasi tercatat dalam sektor komunikasi dan informasi. Berdasarkan data pada Tabel 10.1, peran subsektor komunikasi selama lima tahun terakhir (tahun 2010 sampai dengan tahun 2015) sangat dinamis. Pada tahun 2010, kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB sebesar 3,73%, pada tahun 2014 kontribusi ini meningkat menjadi 4,48%. Namun pada tahun 2015, kontribusi PDB dari sektor ini mengalami sedikit penurunan menjadi 3,53%. Diharapkan kontribusi subsektor komunikasi terhadap PDB akan mengalami peningkatan di tahun 2016 seiring kenaikan permintaan terhadap jasa komunikasi di masa yang akan datang. Pemakaian harga konstan tahun 2010 menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun 2010 sebagai tahun dasar.

Tabel 10.1. Kontribusi Setiap Lapangan Usaha terhadap PDB atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015				Total 2015
						Q1	Q2	Q3	Q4	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,93	13,64	13,45	13,28	13,17	13,75	14,35	14,52	11,49	13,52
Pertambangan dan Penggalian	10,46	10,28	9,99	9,62	9,21	8,28	7,98	7,26	7,02	7,62
Industri Pengolahan	22,04	22,06	21,97	21,75	21,67	21,18	20,91	20,38	20,95	20,84
Pengadaan Listrik dan Gas	1,06	1,05	1,09	1,09	1,09	1,09	1,16	1,10	1,20	1,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
Konstruksi	9,13	9,38	9,42	9,47	9,65	10,01	9,86	10,17	11,29	10,34
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	13,46	13,90	13,82	13,71	13,68	13,37	13,34	13,16	13,32	13,29
Transportasi dan Pergudangan	3,57	3,65	3,68	3,78	3,89	4,83	4,87	5,11	5,25	5,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,92	2,94	2,95	2,99	3,01	3,03	2,95	2,88	3	2,96
Informasi dan Komunikasi	3,73	3,87	4,09	4,28	4,48	3,59	3,49	3,45	3,58	3,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	3,52	3,64	3,76	3,75	4,07	3,84	3,99	4,21	4,03
Real Estate	2,89	2,93	2,97	2,99	2,99	2,94	2,85	2,78	2,87	2,86
Jasa Perusahaan	1,44	1,49	1,51	1,54	1,61	1,67	1,63	1,62	1,68	1,65
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	3,79	3,65	3,54	3,46	3,66	3,80	3,95	4,20	3,91
Jasa Pendidikan	2,94	2,95	3,01	3,09	3,12	3,10	3,30	3,38	3,67	3,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	0,97	1,00	1,01	1,04	1,07	1,03	1,04	1,06	1,15	1,07
Jasa Lainnya	1,47	1,50	1,50	1,51	1,56	1,67	1,63	1,62	1,69	1,65
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	97,37	98,01	97,84	97,50	97,50	97,32	97,05	96,48	96,63	96,86

Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	2,63	1,99	2,16	2,50	2,50	2,68	2,95	3,52	3,37	3,14
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

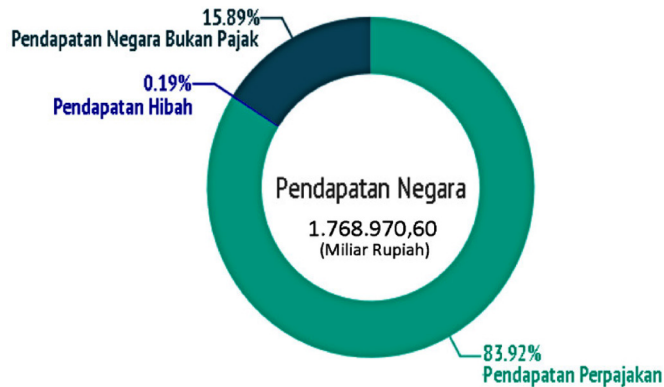
10.2. PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENERIMAAN NEGARA

Pendapatan dalam negeri terdiri dari pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. PNBPN mencakup semua penerimaan pemerintah yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBPN lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Kontribusi Kementerian Komunikasi dan Informatika tercatat dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak di bagian PNBPN lainnya. Berdasarkan data pada Tabel 10.6, pada tahun 2015 target PNBPN merupakan penyumbang terbesar kedua (Rp 281 Triliun) dengan kontribusi sekitar 15,89% (Gambar 10.1).

Tabel 10.2. Target Penerimaan Negara berdasarkan RAPBN-P pada Tahun 2015 (Miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah	Kontribusi
A. Pendapatan Dalam Negeri	1.765.662,20	99,81
1. Pendapatan Perpajakan	1.484.589,30	83,92
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	281.072,90	15,89
B. Pendapatan Hibah	3.308,40	0,19
Total Pendapatan Negara	1.768.970,60	100,00

Sumber: Kementerian Keuangan, 2015



Gambar 10.1. Komposisi Target Penerimaan Negara berdasarkan RAPBN-P pada Tahun 2015

Struktur PNBPN secara lebih rinci disajikan pada Tabel 10.7. Berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat bahwa PNBPN dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok besar, yaitu: (1) penerimaan sumber daya alam, yaitu pendapatan sumber daya alam (SDA) migas dan non migas; (2) pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu pendapatan berupa imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN (*return on equity*) yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih (*pay-out ratio*); (3) PNBPN Lainnya, meliputi berbagai jenis pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan (4) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), yang diperoleh atas produk layanan instansi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. PNBPN Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari PNBPN Lainnya. Salah satu kontributor bagi PNBPN Kemkominfo adalah PNBPN Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDDPI). Berdasarkan data pada Tabel 10.7 terlihat bahwa pada tahun 2015 kontribusi PNBPN Lainnya menempati urutan kedua setelah PNBPN SDA Migas, yaitu sekitar 32%.

Tabel 10.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan RAPBN-P pada Tahun 2015 (Miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah	Persentase
A. Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam	133.078,80	47,35
1. Pendapatan Minyak dan Gas Bumi	95.637,30	34,03
a. Pendapatan Minyak Bumi	72.999,30	25,97
b. Pendapatan Gas Bumi	22.638,10	8,05
2. Pendapatan Non-Minyak dan Gas Bumi	37.441,50	13,32
a. Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	31.678,50	11,27
b. Pendapatan Kehutanan	4.636,80	1,65
c. Pendapatan Perikanan	542,50	0,19
d. Pendapatan Panas Bumi	583,70	0,21
B. Pendapatan Bagian Laba BUMN	34.956,50	12,44
C. PNBP Lainnya	89.947,40	32,00
D. Pendapatan BLU	23.090,20	8,22
Total Pendapatan Negara Bukan Pajak	281.072,90	100,00

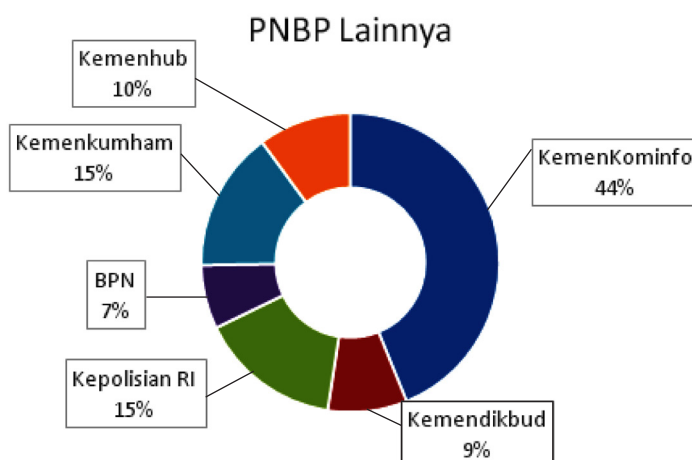
Sumber: Kementerian Keuangan, 2015

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan kontribusi yang paling besar pada PNBP lainnya dibandingkan dengan kementerian lainnya. Data pada Tabel 10.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebesar 12,38 triliun rupiah. Dibandingkan dengan enam Kementerian/Lembaga Besar, Kemkominfo diharapkan menyumbang sekitar 44% dari PNBP lainnya (Gambar 10.2).

Tabel 10.4. Target PNBP Enam Besar Kementerian/Lembaga Besar pada Tahun 2015 dalam PNBP Lainnya (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	12.381,20
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.421,50

3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.358,50
4	Badan Pertanahan Nasional	1.936,30
5	Kementerian Hukum dan HAM	4.279,10
6	Kementerian Perhubungan	2.857,80
Total 6 Besar Kementerian/Lembaga		28.234,40
Total Kementerian/Lembaga Lainnya		61.713,00
TOTAL KESELURUHAN PNBP LAINNYA		89.947,40



Gambar 10.2. Komposisi Target PNBPs Enam Besar Kementerian/Lembaga Tahun 2015

Di tingkat Kemkominfo, Ditjen SDPPI merupakan salah satu penyumbang utama PNBPs, yaitu melalui sumbangannya terhadap Jasa Pos dan Informatika. Realisasi target PNBPs Ditjen SDPPI pada tahun 2015 (disajikan dalam Tabel 10.9) mencapai 119,08% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 10.5. Target dan Realisasi PNBP SDPPI pada Tahun 2015

Jenis PNBP	Target (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	Tingkat Pencapaian Target (%)
A. IAR dan KRAP	1.450.000	1.843.453	127,13%
B. BHP Frekuensi	11.389.923.356	13.557.934.045	119,03%
C. REOR dan SKOR	30.600	107.890	352,58%
D. Standardisasi	72.816.750	91.320.077	125,41%
E. PNBP SDPPI lainnya	1.293.500	2.362.696	182,66%
E.1. Sewa rumah dinas	200.000	656.673	328,34%
E.2. Sewa GMDSS	43.500	45.000	103,45%
E.2. Lain-lain	1.050.000	1.661.023	158,19%
Total	11.465.514.206	13.653.568.160	119,08%

10.3. PERAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DALAM PENERIMAAN NEGARA

142

Terdapat lima kelompok PNBP yang diterima Ditjen SDPPI, yaitu: (1)PNBP dari BHP Frekuensi; (2) PNBP dari penerbitan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi; (3)PNBP dari REOR dan SKOR; (4)PNBP dari IAR dan IKRAR; (5)PNBP sumber lain-lain. Berdasarkan golongan tersebut, penerimaan dari BHP frekuensi memberikan kontribusi yang paling besar bagi PNBP Ditjen SDPPI.

Tabel 10.6. Realisasi PNBP Bidang SDPPI setiap pada Tahun 2011 s.d. Tahun2015 (dalam Ribu Rp.)

No	Tahun	Standardisasi	BHP Frekuensi	REOR dan SKOR	IAR DAN IKRAR	Lain-lain	Total PNBP
1	2011	65.276.436	8.790.907.340	71.360	1.082.896	2.889.665	8.860.227.697
2	2012	69.626.769	9.085.108.514	104.710	1.314.140	3.791.750	9.159.945.883
3	2013	79.604.754	10.857.000.459	55.275	1.452.164	1.937.299	10.940.049.951
4	2014	76.593.878	12.717.627.331	75.700	1.437.905	2.348.156	12.798.082.973
5	2015	91.320.077	13.557.934.045	107.890	1.843.453	2.362.696	13.653.568.160

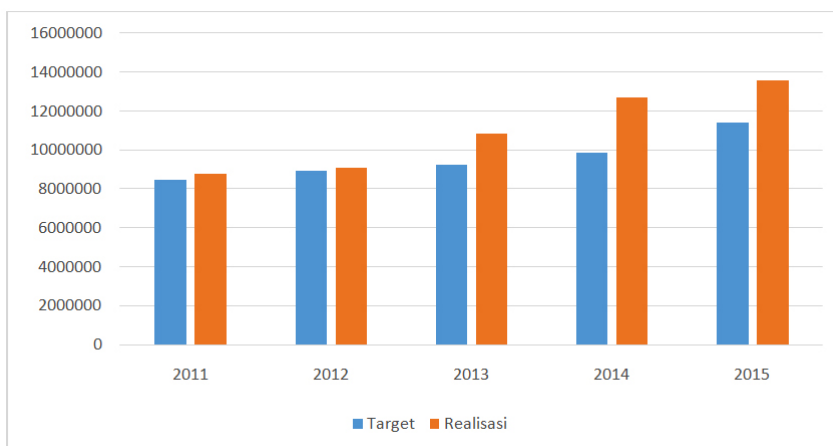
10.3.1. PNBP Bidang BHP Frekuensi

PNBP BHP Frekuensi Radio terbagi menjadi dua, yaitu PNBP berdasarkan BHP ISR dan PNBP berdasarkan BHP Pita. PNBP BHP Frekuensi Radio yang paling besar adalah PNBP dari BHP Pita. Tingkat pencapaian target pada tahun 2015 memang tidak sebesar tahun 2014, yakni hanya mencapai 119,03%, namun hal ini dikarenakan pada tahun 2015 terdapat kenaikan target capaian dari 9.880.534.000 pada tahun 2014 menjadi 11.389.923.356 ditahun 2015 (Tabel 10.11 dan Gambar 10.3).

Tabel 10.7. Perkembangan PNBP dari BHP Frekuensi pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
		(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	Target (%)
1	2011	8.461.222.688	8.790.907.340	103,90
2	2012	8.933.544.384	9.085.108.514	101,70
3	2013	9.244.578.562	10.857.000.459	117,44
4	2014	9.880.534.000	12.717.627.331	128,71
5	2015	11.389.923.356	13.557.934.045	119,03%

143



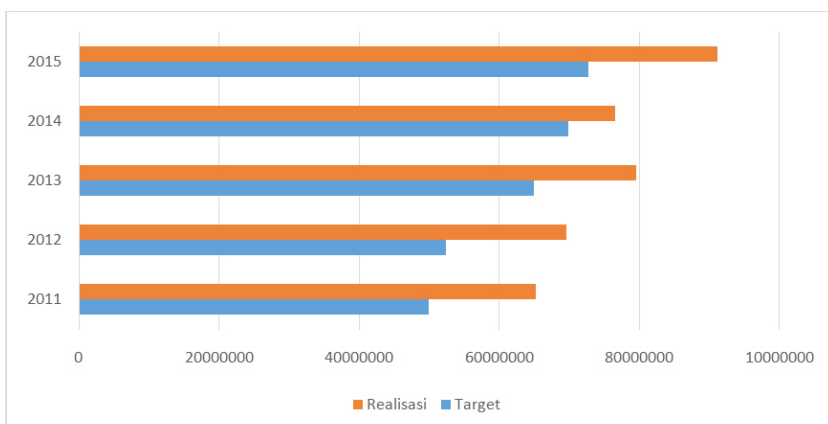
Gambar 10.3. Tren Perkembangan Target dan Realisasi pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

10.3.2. PNBP Bidang Standardisasi

Penerimaan PNBP bidang standardisasi terdiri dari jasa pengujian perangkat dan penerbitan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Realisasi pencapaian target pada tahun 2015 sendiri lebih besar dibandingkan pencapaian target pada tahun 2014. Pada tahun 2015, tingkat pencapaian target dari PNBP bidang standardisasi mencapai 125,41%, atau terdapat peningkatan sebesar 15,99% dibandingkan tahun 2014. Tabel 10.8 dan Gambar 10.4 memperlihatkan perkembangan PNBP dari bidang standardisasi semenjak tahun 2011 hingga tahun 2015.

Tabel 10.8. Perkembangan PNBP dari Bidang Standardisasi pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

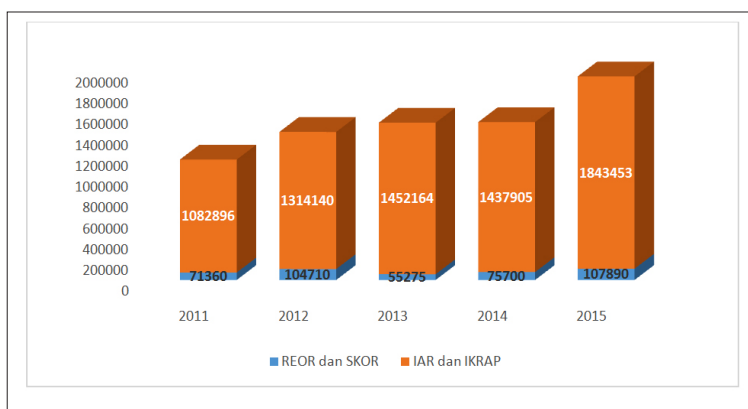
No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
		(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	Target (%)
1	2011	50.000.500	65.276.436	130,55
2	2012	52.500.000	69.626.769	132,62
3	2013	65.000.000	79.604.754	122,47
4	2014	70.000.000	76.593.878	109,42
5	2015	72.816.750	91.320.077	125,41



Gambar 10.4. Tren Perkembangan Target dan Realisasi PNBP Dit. Standardisasi pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

10.3.3. PNBP dari Sertifikasi Operator Radio

Sumber penerimaan PNBP untuk bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika lainnya adalah yang berasal dari sertifikasi operator radio. Terdapat dua sumber PNBP dari sertifikasi operator radio yaitu: (1) Penerimaan dari Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) dan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR); dan (2) Penerimaan dari Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Kecakapan Radio Antar Penduduk (IKRAP). Dari kedua sumber PNBP sertifikasi operator radio tersebut, penerimaan dari IAR dan IKRAP lebih mendominasi dibanding penerimaan REOR dan SKOR. Berikut adalah gambar 10.5 yang memperlihatkan perkembangan PNBP dari REOR dan SKOR serta dari IAR dan IKRAP semenjak tahun 2011 hingga tahun 2015:



Gambar 10.5. Perkembangan PNBP Sertifikasi Operator Radio pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015 (Ribu Rp.)

10.3.3.1. PNBP dari REOR dan SKOR

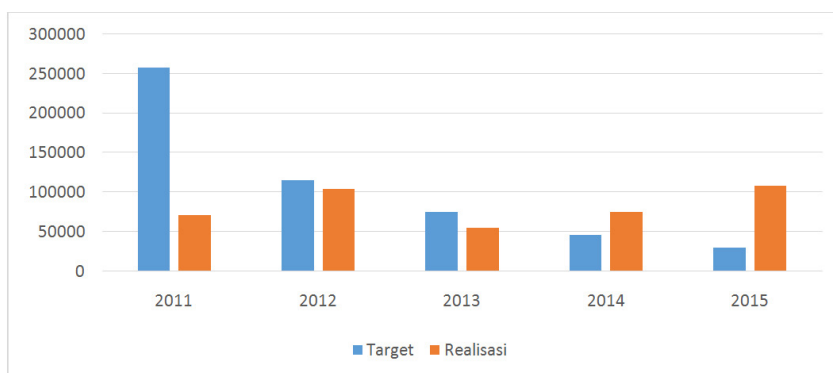
Penerimaan REOR dan SKOR berasal dari sertifikasi kelulusan. Tingkat pencapaian target PNBP dari REOR dan SKOR mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2013 pernah mengalami penurunan. Namun pada tahun 2014, nilai PNBP dari sektor ini kembali meningkat, dan bahkan pada tahun 2015, penerimaan PNBP dari bidang REOR dan SKOR mencapai

angka tertinggi semenjak tahun 2011, yakni dengan tingkat pencapaian sebesar 352,58%. Berikut adalah perkembangan PNBP dari bidang REOR dan SKOR yang ditampilkan pada tabel 10.9 dan gambar 10.6 :

Tabel 10.9. Perkembangan PNBP dari Bidang REOR dan SKOR pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
		(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	Target (%)
1	2011	258.125	71.360	27,65
2	2012	115.000	104.710	91,05
3	2013	75.000	55.275	73,70
4	2014	45.840	75.700	165,14
5	2015	30.600	107.890	352,58%

146



Gambar 10.6. Perkembangan Target dan Realisasi REOR dan SKOR pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

10.3.3.2 PNBP dari IAR dan IKRAP

Dibandingkan dengan tahun 2014, target PNBP IAR dan IKRAP mengalami peningkatan, yaitu dari 1,2 milyar menjadi 1,45 milyar rupiah. Hal ini sejalan

dengan semakin meningkatnya angka realisasi dari IAR dan IKRAP. Pada tahun 2015, tingkat pencapaian dari IAR dan IKRAP mencapai 127,13%. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 7,3% dari tahun 2014.

Tabel 10.10. Perkembangan PNBP dari Bidang IAR dan IKRAP pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
		(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	Target (%)
1	2011	560.000	1.082.898	193,37
2	2012	900.000	1.314.140	146,02
3	2013	950.000	1.452.164	152,86
4	2014	1.200.000	1.437.905	119,83
5	2015	1.450.000	1.843.453	127,13

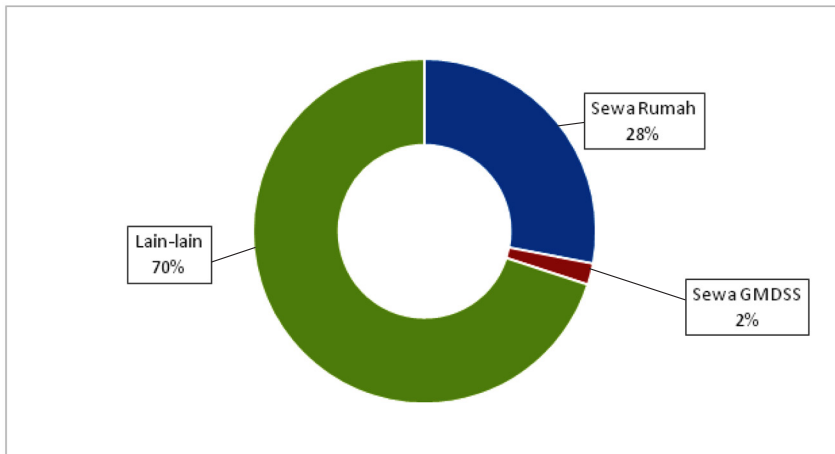


Gambar 10.7. Perkembangan Target dan Realisasi IAR dan IKRAP pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

10.3.4. PNBP Lainnya

Sumber penerimaan PNBP lainnya yang dihasilkan oleh Ditjen SDPPI

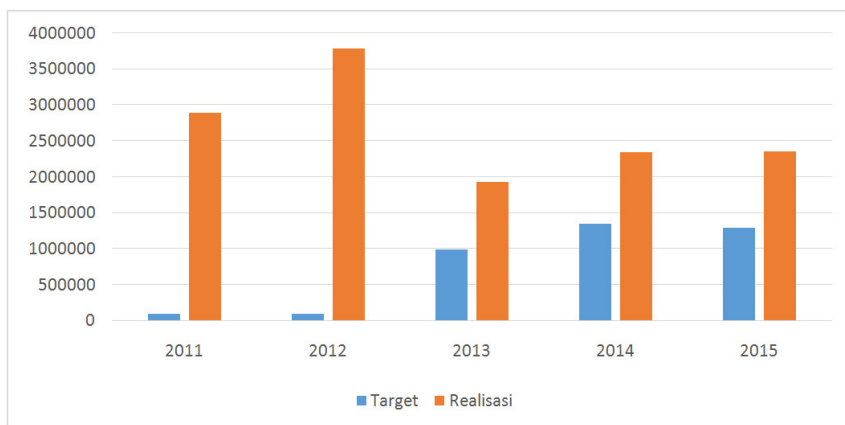
berasal dari sewa rumah dinas, sewa GMDSS, dan pendapatan lainnya. Pada akhir tahun 2015, jumlah PNBП yang didapatkan dari sumber tersebut adalah sebesar 182,66% atau sebesar Rp. 2.362.696.392. PNBП dari sumber lain-lain memiliki sumbangan terbesar dalam PNBП lainnya yakni sebanyak 70% dari total PNBП lainnya, sementara PNBП dari sewa rumah dinas berada di posisi kedua dengan jumlah sumbangan sebanyak 28%, dan sewa GMDSS menyumbang sebanyak 2% dari total PNBП lainnya. Pada tabel 10.11 akan dijelaskan mengenai perkembangan PNBП dari sumber lainnya sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, sementara pada Gambar 10.8 menjelaskan mengenai proporsi PNBП lainnya pada tahun 2015.



Gambar 10.8. Proporsi PNBП Lainnya pada Tahun 2015

Tabel 10.11. Perkembangan PNBP dari Sumber Lain-Lain pada Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
		(Ribuan Rp.)	(Ribuan Rp.)	Target (%)
1	2011	103.373	2.889.665	2795,38
2	2012	103.774	3.791.750	3653,85
3	2013	998.341	1.937.299	194,05
4	2014	1.351.375	2.348.156	173,76
5	2015	1.293.500	2.362.696	182,66



Gambar 10.9. Perkembangan dan Realisasi Target PNBP Sumber Lainnya pada Tahun 2011 Tahun 2015

10.4. PERKEMBANGAN EKSPOR IMPOR ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Sektor komunikasi juga melakukan kegiatan ekspor dan impor terutama pada alat dan perangkat komunikasi. Sebagaimana dengan tahun-tahun

sebelumnya terlihat bahwa pada tahun 2015 neraca perdagangan bidang alat dan perangkat komunikasi selalu mengalami defisit. Hal ini terlihat dari nilai impor yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai eksportnya (Tabel 10.16).

Tabel 10.12. Ekspor dan Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi pada Tahun 2008 s.d. Tahun 2015

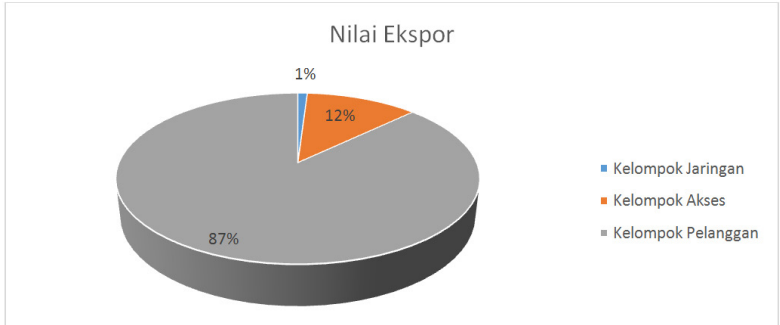
Tahun	Ekspor		Impor	
	Nilai	Berat	Nilai	Berat
	(US\$)	(kg)	(US\$)	(kg)
2008	1.044.207.325	55.282.207	1.130.915.894	20.398.992
2009	1.886.732.217	42.314.730	2.503.657.803	48.611.492
2010	2.310.105.995	56.333.735	3.619.695.162	62.600.497
2011	2.681.090.192	66.745.199	4.246.802.605	55.264.763
2012	1.284.076.360	28.578.023	3.893.405.777	51.044.989
2013	1.155.003.309	24.611.820	4.058.390.415	43.011.294
2014	1.128.086.153	22.051.269	8.814.272.812	81.508.885
2015	1.659.538.464	34.376.287	5.979.863.039	87.158.639

Pada tahun 2015, nilai impor kelompok HS untuk pelanggan (*Customer Premises Equipment/CPE*) berbasis nirkabel mencapai US\$ 2,22 miliar (Tabel 10.13) atau berkontribusi sebesar 37,15% dari total nilai impor alat dan perangkat komunikasi (Gambar 10.11), besaran nilai impor tersebut jauh diatas nilai ekspor. Kelompok HS untuk pelanggan berbasis nirkabel meliputi berbagai alat dan perangkat telekomunikasi dan dipisahkan menjadi telekomunikasi publik dan telekomunikasi khusus. Perangkat telekomunikasi untuk publik berupa terminal telepon, modem dan perangkat telekomunikasi pada *home appliancel* seperti *smart TV*, pemutar suara dan *audio amplifier*, sementara perangkat telekomunikasi khusus adalah radio portabel, radio amatir, dekoder, *radio paging*, *handy talky*, *walkie talkie*, *wi-fi (wireless LAN)*, *bluetooth*, dan sebagainya.

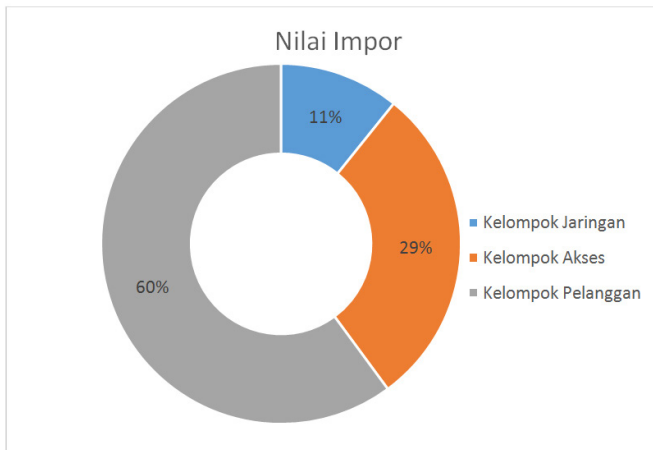
Tabel 10.13. Komposisi Ekspor Impor padaTahun 2015 berdasarkan Kelompok HS (*Harmonized System*)

Kelompok <i>Harmonized System</i> (HS)*	Ekspor		Impor	
	Nilai (US\$)	Berat (Kg)	Nilai (US\$)	Berat (Kg)
1. Kelompok Jaringan				
A. Sentral/Node	1.332.275	15.904	95.651.269	981.443
B. Berbasis Internet Protocol (IP)	1.332.275	15.904	95.651.269	981.443
C. Media Transmisi/Transport	2.037.117	19.143	192.335.181	2.185.267
D. Pendukung Jaringan	12.043.271	1.290.302	260.720.903	21.414.002
2. Kelompok Akses				
A. Kabel	1.438.809	39.912	103.273.032	1.091.882
B. Nirkabel	134.388.036	2.879.837	891.381.459	11.043.034
C. Pendukung Akses	61.055.854	1.733.178	746.445.662	18.991.071
3. Kelompok Pelanggan (CPE)				
A. Berbasis Kabel	600.803.345	12.067.455	1.269.217.045	15.245.064
B. Berbasis Nirkabel	751.192.430	14.644.169	2.221.305.583	13.346.353
C. Pendukung CPE	93.915.052	1.670.483	103.881.636	1.879.080
Total	1.659.538.464	34.376.287	5.979.863.039	87.158.639

- *1. *Harmonized system* (HS) adalah standar penomoran yang ditetapkan secara internasional dalam aktivitas perdagangan internasional.
2. Penetapan penomoran *Harmonized system* (HS) untuk alat dan perangkat telekomunikasi dalam perdagangan internasional Indonesia diatur didalam Peraturan Menteri no 5 tahun 2013 tentang Alat dan Perangkat Telekomunikasi
- Sumber: www.bps.go.id (data diolah).

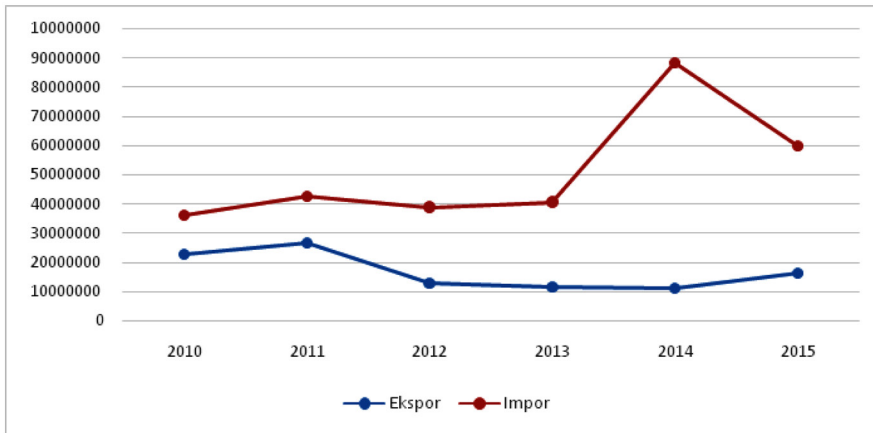


Gambar 10.10. Kontribusi Ekspor pada Tahun 2015 berdasarkan Kelompok Penomoran *Harmonized System*



Gambar 10.11. Kontribusi Impor pada Tahun 2015 berdasarkan Kelompok Penomoran *Harmonized System*

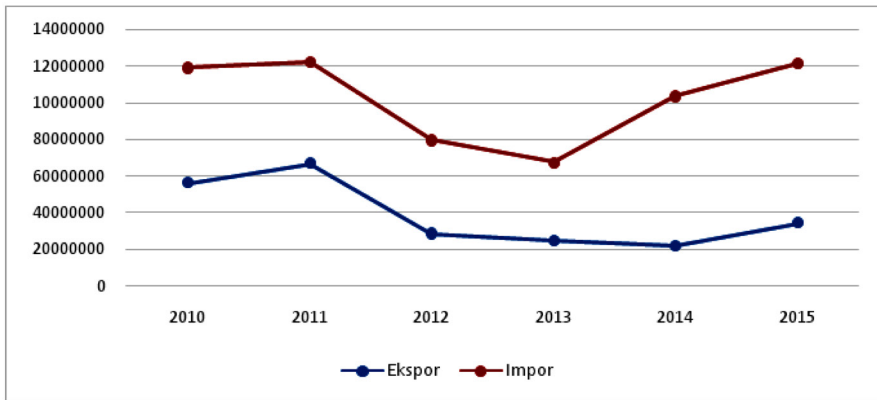
Tren perkembangan ekspor impor berdasarkan nilainya untuk bidang alat dan perangkat telekomunikasi periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada Gambar 10.12. Data perkembangan nilai impor selama kurun tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sangat fluktuatif dan mencapai puncaknya pada tahun 2014, namun pada tahun 2015, nilai impor untuk bidang alat dan perangkat telekomunikasi mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada nilai ekspor alat dan perangkat telekomunikasi yang mencapai puncaknya pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 – 2014, nilai ekspor ini mengalami penurunan, dan baru pada tahun 2015 terdapat kenaikan nilai ekspor untuk alat dan perangkat telekomunikasi.



Gambar 10.12 Tren Perkembangan Nilai Ekspor Impor pada Tahun 2010 s.d. Tahun 2015

Untuk tren perkembangan ekspor impor berdasarkan beratnya untuk bidang alat dan perangkat telekomunikasi periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada Gambar 10.13. perkembangan berat ekspor dan impor pada kurun waktu 2010 – 2015 sangat fluktuatif. Disini dapat terlihat bahwa perkembangan berat impor alat dan perangkat telekomunikasi pada tahun 2010 dan 2011 cenderung stabil, namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2014, terdapat kenaikan berat impor alat dan perangkat telekomunikasidan mencapai puncaknya pada tahun 2015, dimana berat impor alat dan perangkat telekomunikasi lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi fluktuatif ini juga terjadi pada berat ekspor alat dan perangkat telekomunikasi. Berat ekspor terbesar dicapai pada tahun 2011, dengan berat ekspor mencapai 66.745.199, namun semenjak 2012 terus mengalami penurunan, dengan penurunan berat terbesar terjadi pada tahun 2014 yakni menjadi 22.051.269. Di tahun 2015, berat ekspor alat dan perangkat telekomunikasi mulai mengalami peningkatan kembali menjadi 34.376.287 , meskipun belum sebesar tahun 2011.



Gambar 10.13 Tren Perkembangan Berat Ekspor Impor pada Tahun 2010 s.d. Tahun 2015

